



**BUKU AJAR**  
**PERBANDINGAN GERAKAN ANTI KORUPSI**  
**ANTARA KOREA SELATAN DAN INDONESIA**

Mata Kuliah : Kebijakan Anti Korupsi

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Disusun oleh:

**Budi Setiyono, Ph.D**

**Muhammad Adnan, MA**

**Lusia Astrika, M.Si.**

**LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN**

**UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**SEMARANG**

**2016**

# BUKU AJAR

## PERBANDINGAN GERAKAN ANTI KORUPSI

### ANTARA KOREA SELATAN DAN INDONESIA

Disusun oleh:

Budi Setiyono, Ph.D  
Muhammad Adnan, MA  
Lusia Astrika, M.Si.

Mata Kuliah	:	Kebijakan Anti Korupsi
SKS	:	3 SKS
Semester	:	V
Program Studi	:	Ilmu Pemerintahan
Fakultas	:	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**Diterbitkan oleh:**  
Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan  
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG  
Jl. Imam Barjo, SH No. 1 Semarang

196 hal + xii

ISBN: 978-602-1065-35-8

Cetakan I : 2016

**Dicetak oleh:**

CATUR KARYA MANDIRI  
Jl. Mangga VI No. 71, Semarang  
Telp. : (024) 8419620  
Email : info@mycrebo.com

Isi diluar tanggung jawab percetakan

**Hak cipta dilindungi Undang-Undang**

Dilarang mencetak dan menerbitkan sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara dan dalam bentuk apapun tanpa seizin penulis dan penerbit

## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Daftar Isi.....	iii
Kata Pengantar.....	v
Analisis Pembelajaran .....	vi
Tinjauan Mata Kuliah .....	vii
Bab I Korupsi di Negara Berkembang .....	1
Bab II Korupsi dan Demokrasi .....	2
Korupsi: Pengertian, Penyebab, dan Konsekuensi.....	12
Korupsi dan demokrasi, serta peran OMS dalam pemberantasan korupsi.....	24
Bab III Demokratisasi dan Pembangunan Ekonomi di Korea Selatan.....	43
Proses demokratisasi dan pembangunan ekonomi Korea Selatan sebagai pelajaran bagi Indonesia .....	43
Pembangunan Ekonomi Korea .....	66
Bab IV Evolusi Problematika Korupsi di Korea Selatan dan Faktor Penyebabnya.....	80
Korupsi di Korea Sebelum, dan Setelah Demokratisasi .....	80
Faktor Penyebab Korupsi di Korea Selatan.....	96
Bab V Perang Terhadap Korupsi di Korea .....	115
Perkembangan dan Peran Badan Anti Korupsi Korea Selatan dalam memberantas Korupsi. ....	115
Komisi Independen Anti Korupsi Korea (KICAC) .....	117



Anti Corruption and Civil Rights Commission (ACRC) ..	121
Perbandingan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) .....	131
Peran OMS Korea dalam Melawan Korupsi.....	140
Jenis Peran OMS dalam Melawan Korupsi di Korea Selatan .....	152
Kemitraan dengan Sektor Publik.....	160
Prestasi yang Telah Dicapai dan Tantangan ke Depan	161
Bab VI Contoh OMS Anti Korupsi di Korea Selatan.....	168
Daftar Pustaka.....	188
Glosarium.....	191
Index .....	194

## Kata Pengantar

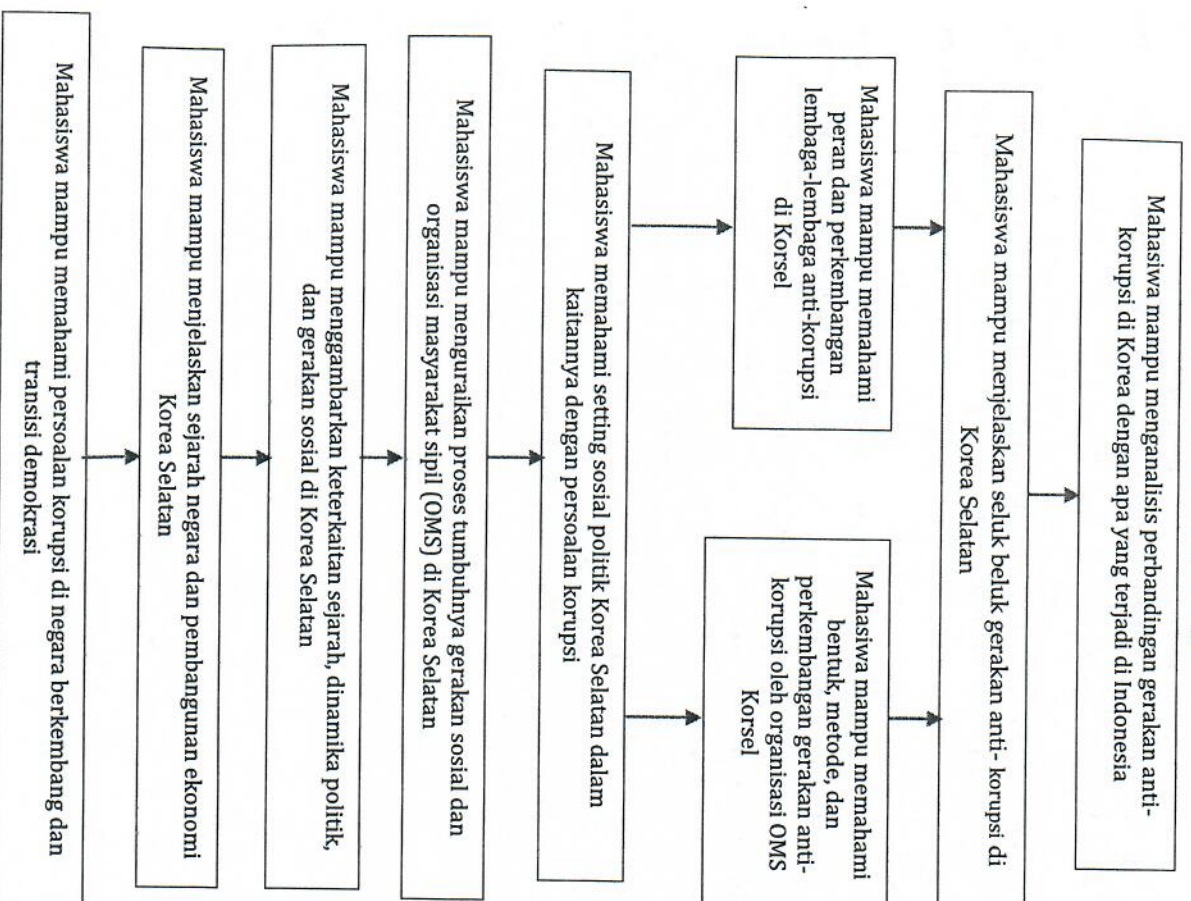
Segenap rasa syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan segala limpahan rahmatNya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan buku ajar ini dengan baik. Buku ajar ini dimaksudkan untuk dapat dipergunakan sebagai salah satu acuan dan referensi bagi mata kuliah Kebijakan Anti Korupsi di Departemen Ilmu Pemerintahan. Di samping itu, buku ini juga diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan bagi para pengambil kebijakan dan aktifs anti korupsi.

Buku ini tentu saja masih memiliki banyak kekurangan karena keterbatasan riset yang dilakukan baik dari segi waktu maupun biaya yang tersedia. Oleh karena itu kami berharap agar para pembaca dapat memberikan masukan-masukan yang bersifat membangun untuk kesempurnaannya.

Terima kasih yang tidak terhingga kami sampaikan kepada Direktorat Pengembangan Pembelajaran dan Kerjasama Akademik (DP2KA)-Universitas Diponegoro, rekan-rekan dosen di Departemen Ilmu Pemerintahan, dan Ratih Mega Swari yang telah banyak membantu penelitian dan penulisan buku ini.



## ANALISIS PEMBELAJARAN (PETA KOMPETENSI)



## TINJAUAN MATA KULIAH

### I. Deskripsi Singkat

Mata Kuliah Kebijakan Anti-Korupsi memberikan pembekalan kepada mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan untuk dapat mengetahui, menggambarkan dan menganalisis faktor penyebab korupsi, keterkaitan korupsi dalam setting sosial-politik, serta menyusun desain kebijakan anti-korupsi. Untuk sampai pada tujuan tersebut, mahasiswa harus mampu mengetahui berbagai seluk beluk persoalan korupsi, termasuk mengetahui bagaimana peran yang dapat dilakukan organisasi masyarakat sipil (OMS) dalam ikut serta memberantas korupsi. Agar pemahaman mahasiswa tentang kebijakan anti korupsi dapat lebih mendalam, mereka perlu pula mengetahui kondisi yang terjadi di negara lain. Dengan pemahaman tersebut, mereka kelak dapat menciptakan pilihan kebijakan (*policy options*) dalam pemberantasan korupsi.

### II. Relevansi Mata Kuliah

Bangsa Indonesia pada saat ini sedang gencar mewacanakan pemberantasan korupsi. Berbagai perangkat dan metode diterapkan oleh pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat luas untuk memastikan tercapainya impian agar negara dapat terbebas dari korupsi. Akan tetapi, sejauh ini, walaupun banyak peraturan, program, dan lembaga anti-korupsi telah dibuat, hasilnya belum terlalu menggembirakan. Mahasiswa Ilmu Pemerintahan perlu belajar dari negara lain untuk membandingkan kelemahan dan kelebihan kita, sehingga tindakan yang lebih progresif dan efektif mungkin bisa kita raih. Korea Selatan, adalah salah satu negara yang memiliki banyak kemiripan historis dan politis dengan kita. Termasuk dalam persoalan korupsi dan kaitannya dengan setting sosial politik. Kita perlu mempelajari bagaimana mereka memerangi korupsi sebagai bahan referensi bagi kita di Indonesia.



### III. Kompetensi

#### 1. Standar Kompetensi

Setelah membaca buku ajar ini, mahasiswa Ilmu Pemerintahan yang mengikuti mata kuliah Kebijakan Anti Korupsi diharapkan untuk dapat menjelaskan seluk beluk persoalan korupsi di Korea Selatan, bagaimana peran lembaga anti korupsi, dan peran organisasi masyarakat sipil dalam memberantas korupsi. Selain itu, mereka juga dapat membuat perbandingan dengan kondisi di Indonesia.

#### 2. Kompetensi Dasar

- 2.1. Kemampuan menggambarkan keterkaitan sejarah, dinamika politik, dan gerakan sosial di Korea Selatan;
- 2.2. Kemampuan memahami setting sosial politik Korea Selatan dalam kaitannya dengan persoalan korupsi;
- 2.3. Kemampuan memahami peran dan perkembangan lembaga-lembaga anti-korupsi di Korea Selatan;
- 2.4. Kemampuan memahami bentuk, metode, dan perkembangan gerakan anti-korupsi yang digelorakan oleh organisasi masyarakat sipil (OMS);
- 2.5. Kemampuan menganalisis perbandingan gerakan tersebut dengan apa yang terjadi di Indonesia.

#### 3. Indikator

- 3.1. Kemampuan menggambarkan keterkaitan sejarah, dinamika politik, dan gerakan sosial di Korea Selatan, dicapai melalui indikator:
  - a. Mahasiswa mampu menjelaskan sejarah negara dan pembangunan ekonomi bangsa Korea Selatan secara singkat,

- b. Mahasiswa mampu menjelaskan tahapan-tahapan krusial dari perkembangan sejarah pembangunan ekonomi Korea Selatan,
    - c. Mahasiswa mampu menguraikan proses tumbuhnya gerakan sosial dan organisasi masyarakat sipil (OMS) di Korea Selatan.

- 3.2. Kemampuan memahami setting sosial politik Korea Selatan dalam kaitannya dengan persoalan korupsi, dicapai melalui indikator:

- a. Mahasiswa mampu menjelaskan dinamika sosial politik di Korea Selatan, khususnya keterkaitan dunia industri dan politik,
  - b. Mahasiswa mampu menguraikan desain model pembangunan yang bertumpu pada *crony capitalism*,
  - c. Mahasiswa mampu menguraikan tumbuh dan berkembangnya *chaebol* dalam lanskap dan konstalasi politik Korea Selatan.

- 3.3. Kemampuan memahami peran dan perkembangan lembaga-lembaga anti-korupsi di Korea Selatan, dicapai melalui indikator:

- a. Mahasiswa mampu menjelaskan proses berdirinya Korea Independent Commission Against Corruption (KICAC),
  - b. Mahasiswa mampu menguraikan alasan dan proses terjadinya evolusi KICAC menjadi Anti-Corruption and Civil Rights Commission (ACRC),
  - c. Mahasiswa mampu menyebutkan peran-peran yang dilakukan oleh KICAC dan ACRC beserta kelebihan dan kekurangan masing-masing.



3.4. Kemampuan memahami bentuk, metode, dan perkembangan gerakan anti-korupsi yang digelorkan oleh organisasi masyarakat sipil (OMS), dicapai melalui indikator:

- a. Mahasiswa mampu menjelaskan tumbuhnya OMS di Korea Selatan,
- b. Mahasiswa mampu menjelaskan munculnya kepedulian OMS terhadap persoalan korupsi,
- c. Mahasiswa dapat menjelaskan metode dan strategi yang dipakai OMS dalam berperan memerangi korupsi,
- d. Mahasiswa dapat menyebutkan pengaruh dan hasil-hasil yang telah diperoleh OMS dalam pemberantasan korupsi.

3.5. Kemampuan menganalisis perbandingan gerakan tersebut dengan apa yang terjadi di Indonesia.

- a. Mahasiswa mampu mengidentifikasi persamaan dan perbedaan gerakan OMS antara Korea Selatan dan Indonesia,
- b. Mahasiswa mampu menyebutkan kelebihan dan kelemahan gerakan OMS di masing-masing negara,
- c. Mahasiswa mampu membuat *policy options* untuk meningkatkan peran OMS di Indonesia.

#### IV. Susunan Bahan Ajar

##### Bahasan I.

Korupsi di Negara Berkembang, dengan sub pokok bahasan:

- a. Negara Berkembang dan Persoalan Korupsi

##### Bahasan II.

Korupsi dan Demokrasi, dengan sub pokok bahasan:

- a. Korupsi: Pengertian, Penyebab, dan Konsekuensi
- b. Korupsi dan demokrasi, serta peran OMS dalam pemberantasan korupsi

##### Bahasan III.

Demokratisasi dan Pembangunan Ekonomi di Korea Selatan, dengan sub pokok bahasan:

- a. Proses demokratisasi dan pembangunan ekonomi Korea Selatan sebagai pelajaran bagi Indonesia
- b. Pembangunan Ekonomi Korea

##### Bahasan IV.

Evolusi Problematika Korupsi di Korea Selatan dan Faktor Penyebabnya, dengan sub pokok bahasan:

- a. Korupsi di Korea Sebelum dan Setelah Demokratisasi
  - b. Faktor Penyebab Korupsi di Korea Selatan
- 115 Perang Terhadap Korupsi di Korea dan Pelajaran Yang Bisa Dipetik, dengan sub pokok bahasan:
- a. Perkembangan dan Peran Badan Anti Korupsi Korea Selatan dalam memberantas Korupsi
  - b. Peran OMS Korea dalam Melawan Korupsi

##### Bahasan V.

Bahasan VI. Contoh OMS Anti Korupsi di Korea Selatan, dengan sub pokok bahasan:

- a. PSPD dan CCEJ

#### V. Petunjuk Bagi Mahasiswa Dalam Mempelajari Bahan Ajar

1. Mahasiswa membaca penjelasan yang telah diterangkan dalam setiap bab.
2. Mahasiswa melakukan diskusi kelompok tentang pokok bahasan yang ada di setiap bab.
3. Mahasiswa melakukan presentasi hasil diskusi kelompok di depan kelas.
4. Mahasiswa mengerjakan soal-soal pertanyaan dan mengecek jawabannya di pembahasan,



5. Mahasiswa melakukan pengayaan materi dengan mencari informasi tambahan dari sumber lain seperti buku, artikel jurnal, berita koran dan media lain.

## **BAB I**

### **POKOK BAHASAN**

### **KORUPSI DI NEGARA BERKEMBANG**

#### **1. SUB POKOK BAHASAN:**

**Negara Berkembang dan Persoalan Korupsi**

#### **1.1. PENDAHULUAN**

##### **1.1.1. Deskripsi Singkat**

Sub Pokok Bahasan ini mengantarkan mahasiswa untuk mengetahui pokok-pokok utama yang berkaitan dengan problematika korupsi di negara berkembang.

##### **1.1.2. Relevansi**

Mahasiswa Ilmu Pemerintahan perlu mampu mengetahui latar belakang bahwa korupsi adalah masalah universal umat manusia. Akan tetapi, keadaan di negara-negara berkembang dengan kompleksitas dalam bidang sosial dan ekonomi, hubungan kekefahaman, buruknya tata kelola negara, dan gaji PNS yang rendah, menyebabkan korupsi lebih mudah tumbuh subur dibandingkan dengan negara maju. Ketidaktepatan dalam melakukan analisis --dan akhirnya berujung pada pembuatan kebijakan yang kurang tepat-- justru akan memperparah keadaan. Oleh karena itu diperlukan kecakapan dalam melihat persoalan korupsi secara jernih dan kontekstual.

##### **1.1.3 Kompetensi**

###### **a. Standar Kompetensi**

Setelah mengikuti pokok bahasan ini selama satu pertemuan maka diharapkan mahasiswa akan dapat menjelaskan



gambaran persoalan korupsi di negara berkembang beserta segenap potensi akibatnya.

b. Kompetensi Dasar

1. Kemampuan menjelaskan persoalan korupsi di negara berkembang.
2. Kemampuan menjelaskan potensi akibat yang muncul dari persoalan korupsi.

## 1.2. PENYAJIAN

### 1.2.1 Uraian dan contoh

Korupsi adalah masalah universal umat manusia, bukan fenomena baru dan eksklusif yang hanya menjadi masalah di satu negara dalam kurun waktu tertentu saja. Tidak ada masyarakat yang mungkin bebas sepenuhnya dari suap dan korupsi. Terlebih keadaan di negara-negara berkembang --dimana perubahan yang cepat dalam bidang sosial dan ekonomi, hubungan kekerabatan yang kuat, munculnya lembaga-lembaga baru, tumpang tindihnya kewenangan, gaji PNS yang rendah, dan kadang-kadang pandangan yang bertentangan tentang perilaku publik yang tepat-- adalah faktor yang sangat kondusif untuk tumbuhnya korupsi. Sebagaimana dikemukakan oleh laporan World Bank (1991: 132):

*[c]orruption can rarely be reduced unless its large underlying causes are addressed. It flourishes in situations where domestic and international competition is suppressed, rules and regulations are excessive and discretionary, civil servants are underpaid, or the organization they serve has unclear or conflicting objectives. (korupsi jarang dapat dikurangi kecuali penyebab-penyebabnya yang besar ditangani. (Masalah) ini berkembang dalam situasi di mana kompetisi domestik dan internasional ditekan, aturan dan peraturan yang berlebihan dan mengekang, PNS yang kurang dibayar, atau organisasi yang*

mereka layani tidak memiliki tujuan yang jelas atau bertanggung).

Namun, sejak tahun 1990-an korupsi telah muncul sebagai salah satu perhatian utama dalam masyarakat internasional. Program Anti Korupsi telah dimasukkan dalam agenda pembangunan nasional serta paket bantuan donor internasional. Perjanjian Anti Korupsi (United Nations Convention Against Corruption –UNCAC) telah ditandatangani dan diratifikasi tahun 2004. Majelis Umum PBB bahkan telah menunjuk tanggal 9 Desember sebagai Hari Internasional Anti-Korupsi untuk meningkatkan kesadaran anti-korupsi, pencegahan dan memeranginya secara lebih baik.

Sejalan dengan itu, sejak tahun 1989, negara-negara G7 juga sepakat mendirikan *The Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF) yang kemudian diikuti oleh puluhan negara lainnya. Gugus tugas ini diberi tugas untuk mempelajari tren pencucian uang (*money laundering*), pemantauan peraturan, kegiatan keuangan dan pengkakan hukum yang diambil di tingkat nasional dan internasional, melaporkan kepatuhan, dan mengeluarkan rekomendasi dan standar untuk memerangi pencucian uang. Pada tahun pertama, FATF mengeluarkan laporan yang berisi empat puluh rekomendasi untuk lebih efektif memerangi pencucian uang. Standar-standar ini direvisi pada tahun 2003 untuk mencerminkan berkembangnya pola dan teknik dalam pencucian uang di skala internasional.

Kekhawatiran terhadap korupsi tersebut berkembang karena lingkungan politik, sosial dan ekonomi yang berubah di seluruh dunia dan juga karena pengakuan bertahap oleh civitas akademika dan dampak negatif pada ekonomi, sosial dan pembangunan politik (Tanzi 1998: 559-64). Dengan meningkatnya kesadaran terhadap bahaya korupsi, pemerintah dan badan-badan internasional mencari langkah-langkah efektif untuk mengendalikan ancaman global ini. Banyak penelitian telah dilakukan untuk mencari mekanisme yang efektif untuk memecahkan korupsi. Sebuah kekayaan pengetahuan telah



terakumulasi dalam hal apa pendekatan yang mungkin dilakukan. Masalahnya adalah, bahwa ada kurangnya kesepakatan umum mengenai apa pendekatan yang tepat dan apa yang menjelaskan keberhasilan dan kegagalan dalam gerakan anti-korupsi ini (Jain 2001: 102). Tampaknya bahwa beberapa negara yang lebih berhasil dari yang lain dalam mengendalikan korupsi meskipun mereka berada di wilayah yang sama atau memiliki berbagi banyak fitur yang sama.

Di negara-negara demokrasi baru, korupsi yang akut sering disebut sebagai alasan untuk menggulingkan rezim otoriter di negara-negara tersebut. Rezim otoriter memberikan jalan untuk praktek politik korup dan pemilihan umum yang manipulatif. Alokasi sumber daya publik dikelola secara partikularistik dan tidak adil; praktek rente dan pemerasan rakyat umum terjadi; aturan hukum dilakukan secara parsial dan terbalik (mereka yang berkuasa berada di atas hukum); dan negara dianggap sebagai instrumen untuk pembegalan dan pengayaan dari beberapa aktor lingkaran kekuasaan saja. Tidak heran, di Asia, Afrika dan Amerika Latin rezim otoriter runtuh akibat tekanan rakyat karena ketidakpuasan mereka terkait dengan masalah korupsi kronis, serta dengan faktor lain seperti perpecahan rezim, krisis ekonomi, dan tekanan internasional (lihat Hope & Chikulo 2000; Gill 2000; Seligson 2002). Rezim tersebut diantaranya adalah, misalnya, Shah Pahlavi di Iran yang tumbang di tahun 1979, Idi Amin di Uganda tahun 1979, Duvalier di Haiti tahun 1985, Marcos di Philipines tahun 1986, Sani Abacha di Nigeria tahun 1998, juga Chun Doo-Hwan di Korea Selatan tahun 1988 dan Suharto di Indonesia tahun 1998.

Walau demikian, proses demokratisasi setelah berakhirnya rezim-rezim otoritas tidak selalu memberikan jaminan akan efektifitas pengekanan terhadap korupsi. Dalam banyak kasus, persoalan korupsi menjadi lebih buruk karena pemerintah baru yang demokratis justru menjadi salah satu sumber korupsi (Moran 2001). Demokratisasi harusnya dapat memproduksi jenis rezim baru yang memberantas monopoli kekuasaan dan menghilangkan sikap memperlakukan

negara sebagai warisan karena dipaksa bersaing dengan kelompok atau partai politik lain yang mempraktekkan alokasi sama secara universal. Sumber daya publik yang sebelumnya dinikmati berdasarkan patronase, kolusi, dan nepotisme didistribusikan secara lebih merata dan relatif setara. Akan tetapi, persaingan politik demokratis tidak dengan sendirinya penangkal korupsi dan partikularisme. Negara demokrasi baru sangat jarang mencapai pemerintahan yang adil karena mereka umumnya mereka gagal untuk memaksakan kendala normatif pada perilaku elite predator yang akan menghasilkan alokasi sumber daya publik berdasarkan universalisme etis, seperti persamaan di depan hukum dan perlakuan yang berimbang tentang semua warga negara oleh pemerintah.

Beberapa negara telah mengadakan banyak putaran pemilu dan membuat berbagai lembaga anti-korupsi, akan tetapi belum membuat sedikit kemajuan dalam mencapai praktek universalisme etis ini. Pemegang kekuasaan dan pembuat kebijakan yang baru biasanya tidak siap untuk menggunakan peluang dengan yang mereka miliki untuk memberantas korupsi dengan tegas. Sebaliknya, mereka cenderung mengikuti pola-pola perilaku dari pendahulu mereka, menyalahgunakan kekuasaan diskresi yang sekarang mereka miliki. Kondisi ini cenderung membuat frustrasi dan kecewa orang pada umumnya, karena mereka mengira demokratisasi tidak memiliki makna positif bagi kehidupan mereka. Sebaliknya, korupsi telah menghasilkan gerombolan baru yang menjadi predator rakyat.

Ketika kekecewaan tersebut terus berlanjut, maka orang kehilangan kepercayaan pada sistem demokrasi. Sebagai Linz & Stepan (1996) berpendapat, jika pemerintah demokratis tidak dapat memecahkan masalah yang dihadapi kehidupan sehari-hari rakyat, demokratisasi atau bahkan demokrasi yang sudah terkonsolidasi sekalipun mungkin ditinggalkan, dan pada saat yang sama, pilihan non-demokratis dapat memperoleh simpati publik yang signifikan. Dalam situasi tersebut, ada kemungkinan bahwa demokratisasi akan dianggap



sebagai kesia-siaan dan pendukung setia demokrasi mulai kehilangan rasa hormat terhadap produk dan prosedur demokrasi itu sendiri. Akhirnya, hal ini bisa menyebabkan runtuhnya dan delegitimasi terhadap sistem demokrasi keseluruhan (Anderson & Tverdova 2003: 105; Linz & Stepan 1996).

Tidak heran, kegagalan pemerintah dalam menangani korupsi telah mendorong masyarakat sipil di beberapa negara untuk ikut bertindak dalam upaya yang memberantas korupsi (World Bank 2000; Eigen 2004). Di Indonesia dan Korea Selatan, rakyat membentuk ratusan organisasi anti-korupsi, yang sejak tahun 2000 telah mencoba untuk menggelorakan gerakan antikorupsi melalui berbagai jaringan. Organisasi-organisasi masyarakat sipil (OMS), seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi keagamaan, organisasi profesi, hari ini memainkan peran penting dalam mengungkap dan mengambil masalah korupsi ke dalam domain publik, dan telah membuat sejumlah prestasi mengesankan. OMS di banyak tempat telah berhasil dalam membawa pejabat negara yang telah terlibat dalam praktek korupsi ke pengadilan, yang telah menghasilkan hukuman penjara. Selain itu, peran OMS tidak terbatas pada bermain 'pengawas' bagi pemerintah, tetapi juga mencakup inisiasi sejumlah kebijakan strategis. Di bawah pengaruh OMS, sejumlah kerangka kelembagaan dan hukum untuk memerangi korupsi telah dibentuk.

### 1.2.2. Latihan

1. Terangkan bagaimana korupsi menjadi masalah universal umat manusia!
2. Mengapa keadaan di negara-negara berkembang jauh lebih kompleks dalam masalah korupsi dibanding negara maju?
3. Apa saja respon yang dilakukan dunia dalam menangani korupsi sejak tahun 1990an?
4. Berikan contoh di negara mana korupsi yang akut sering disebut sebagai alasan untuk menggulingkan rezim otoriter?

5. Benarkah proses demokratisasi setelah berakhirnya rezim-rezim otoriter dapat menghasilkan pemerintah yang mampu dalam menangani korupsi secara efektif? Mengapa?

### 1.3. PENUTUP

#### 1.3.1. Tes Formatif

Pilihlah salah satu jawaban yang benar, dengan memberikan tanda silang!

1. Korupsi di negara berkembang mudah terjadi karena:
  - A. Terjadi perubahan yang cepat dalam bidang sosial dan ekonomi
  - B. Adanya hubungan kekerabatan yang kuat
  - C. Munculnya lembaga-lembaga baru yang tumpang tindih kewenangannya
  - D. Semua jawaban A, B, C benar
2. Piagam Anti Korupsi yang dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah:
  - A. UNCLOS
  - B. UNCAC
  - C. UNTAC
  - D. FATF
3. Kepala negara berikut dijatuhkan oleh gerakan rakyat berkaitan dengan perkara korupsi, KECUALI:
  - A. Shah Pahlavi di Iran
  - B. Idi Amin di Uganda
  - C. Duvalier di Haiti
  - D. Ronald Reagan di Amerika Serikat
4. Diantara prinsip-prinsip universalisme etis di negara demokratis adalah sebagai berikut, KECUALI:



- A. Monopoli kekuasaan dan memperlakukan negara sebagai warisan
- B. Persamaan di depan hukum
- C. Perlakuan yang berimbang tentang semua warga negara oleh pemerintah
- D. Distribusi kekayaan yang adil

5. Negara demokrasi baru banyak yang tidak berhasil memberantas korupsi karena :

- A. Tidak membuat lembaga Anti Korupsi
- B. Pemegang kekuasaan baru tidak siap menggunakan peluang dengan yang mereka miliki untuk memberantas korupsi dengan tegas.
- C. Tidak didukung militer.
- D. Tidak mengikuti UNCAC

### 2.3.2. Umpan Balik

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif ini yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar ini.

Tingkat penguasaan =  $\frac{\text{Jumlah jawaban yang benar}}{\text{Jumlah soal}} \times 100\%$

5

Arti tingkat penguasaan:

90 – 100%	: baik sekali
80 – 89%	: baik
70 – 79%	: cukup
< 70%	: kurang

### 2.3.3. Tindak lanjut

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar selanjutnya. Bagus! Jika masih dibawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar ini, terutama bagian yang belum dikuasai.

### 2.3.4. Rangkuman

Negara berkembang memiliki berbagai persoalan yang kompleks, yang menyebabkan mereka mudah mendapatkan korupsi sebagai persoalan yang sulit dipecahkan. Demokratisasi yang seharusnya dapat memproduksi jenis rezim baru yang mampu memberantas korupsi, tidak secara otomatis menghasilkan pemerintahan yang kapabel. Persaingan politik demokratis tidak dengan sendirinya penangkal korupsi dan partikularisme.

Walaupun beberapa negara telah mengadakan banyak putaran pemilu dan membuat berbagai lembaga anti-korupsi, mereka tidak mampu membuat kemajuan. Penguasa baru cenderung mengikuti pola-pola perilaku dari pendahulu mereka, menyalahgunakan kekuasaan diskresi mereka sekarang dimiliki. Dalam kondisi seperti inilah biasanya muncul gerakan dari organisasi masyarakat sipil (OMS) untuk ikut memberantas korupsi.

### 2.3.5. Kunci Jawaban Tes Formatif

Nomor 1 jawaban D, Semua jawaban A, B, C benar

Nomor 2 jawaban B, UNCAC

Nomor 3 jawaban D, Ronald Reagan di Amerika Serikat

Nomor 4 jawaban A, Monopoli kekuasaan dan memperlakukan negara sebagai warisan

Nomor 5 jawaban B, Pemegang kekuasaan baru tidak siap menggunakan peluang dengan yang mereka miliki untuk memberantas korupsi dengan tegas



## DAFTAR PUSTAKA

- Anderson C.J. and Tverdova, Y.V., 'Corruption and Political Allegiances, and Attitudes Towards Government in Contemporary Democracies', *American Journal of Political Science*, Vol. 47 (1), pp. 91-109. (2003)
- Eigen, P. 'Chasing Corruption Around the World: How Civil Society Strengthen Global Governance', Lecture transcript for Arthur and Frank Payne Distinguished Lecture Stanford Institute for International Studies, 4 October 2004.
- Iyayi, F., 'The primitive accumulation of capital in a neo-colony: the Nigerian case', *Review of African Political Economy*, Vol. 13 (35), pp. 27 - 39. (1986).
- Jain, A.K. 'Corruption: A Review' *Journal of Economic Surveys*, 15 (1), pp. 71-121. (2001)
- Johnston, M. (ed.), *Civil Society and Corruption: Mobilizing for Reform*, Lanham, MD: University Press of America, pp. 23-32. (2003)
- Linz, J. J., and Stepan, A. *Problems of Democratic Transition and Consolidation: Southern Europe, South America, and Post-Communist Europe*. Baltimore: Johns Hopkins University Press. (1996)
- Scott, J.C., 'The Analysis of Corruption in Developing Nations', *Comparative Studies in Society and History*, Vol. 11 (3), pp. 315-41. (1969).
- Setiyono, B., Adnan, M. Astrika, L. *Laporan Penelitian Perbandingan Gerakan Anti Korupsi Korea Selatan dan Indonesia*, FISIP UNDIP (2015)
- World Bank, *Citizen Participation in National Governance: The role of civil society in devising and implementing anti-corruption strategies* [online, accessed 21 March 2015, available at: [http://www.worldbank.org/wbi/governance/ac\\_courses.html](http://www.worldbank.org/wbi/governance/ac_courses.html)]. (2004)

## SENARAI

- demokratisasi : proses transisi dari pemerintahan otoriter menuju pemerintahan demokratis yang biasanya ditandai dengan pelaksanaan pemilihan umum yang jujur dan adil.
- money laundering* : pencucian uang, yakni tindakan untuk menyembunyikan uang hasil kejahatan dengan cara menginvestasikan pada kegiatan bisnis atau properti supaya terlihat sah.
- OMS : Organisasi Masyarakat Sipil, yakni organisasi yang didirikan secara sukarela, tidak bertujuan mencari profit, atau menduduki jabatan politik.
- patronase : sikap mengistimewakan seseorang atau kelompok dalam suatu urusan secara tidak adil



## BAB II

### POKOK BAHASAN

### KONSEPSI KORUPSI DAN DEMOKRASI

#### 1. SUB POKOK BAHASAN:

**Korupsi: Pengertian, Penyebab, dan Konsekuensi**

#### 1.3. PENDAHULUAN

##### 1.1.1. Deskripsi Singkat

Sub Pokok Bahasan ini mengantarkan mahasiswa menjelaskan secara teoritis definisi korupsi ditinjau dari berbagai macam perspektif, kategori dan faktor-faktor penyebabnya. Di dalamnya juga akan dijelaskan hubungan antara korupsi dengan demokrasi, serta upaya-upaya pemberantasan korupsi yang melibatkan peran OMS.

##### 1.1.2. Relevansi

Mahasiswa Ilmu Pemerintahan perlu mampu menjelaskan definisi korupsi, hubungan korupsi dengan demokrasi, upaya pemberantasan korupsi, dan peran OMS secara teoritis karena beberapa sebab: 1) sebagai landasan pengetahuan dasar untuk memahami pengertian korupsi, kategori korupsi, dan faktor-faktor penyebab korupsi; 2) bisa berpikir bahwa korupsi di suatu negara berkaitan erat dengan proses demokratisasi yang terjadi; 3) bisa berpikir bahwa peran OMS sangat penting dalam upaya pemberantasan korupsi di suatu negara.

#### 1.1.3 Kompetensi

##### a. Standar Kompetensi

Setelah mengikuti pokok bahasan ini selama satu pertemuan maka diharapkan mahasiswa akan dapat menjelaskan definisi

korupsi menurut para ahli, hubungan korupsi dengan demokrasi, serta mampu menjelaskan peran OMS dalam pemberantasan korupsi.

##### b. Kompetensi Dasar

1. Kemampuan menjelaskan pengertian korupsi.
2. Kemampuan menjelaskan hubungan korupsi dengan demokrasi.
3. Kemampuan menjelaskan peran OMS dalam pemberantasan korupsi.

#### 1.4. PENYAJIAN

##### 1.4.1 Uraian dan contoh

Korupsi memiliki definisi yang beragam, tetapi yang paling umum digunakan mengacu pada penyalahgunaan jabatan publik untuk kepentingan pribadi (Rose-Ackerman 1978; Moodie 1980; Andvig *et al* 2000: 11; Huther & Shah 2000: 1). Definisi ini mencakup berbagai bentuk interaksi antara pejabat sektor publik dan agen lainnya. Dalam konteks ini, uang sering terlibat, seperti dalam suap atau sogok untuk kontrak pengadaan publik. Dalam konteks yang lain, akan tetapi, keuntungan pribadi dapat berupa sesuatu non-monetar, seperti dalam kasus patronase dan nepotisme (Blundo & Olivier de Sardan 2006; Chabal & Daloz 1999; Olivier de Sardan 1999). Definisi ini juga mencakup tindakan di mana tidak ada interaksi dengan aktor eksternal (atau aktor eksternal tidak secara eksplisit terlibat), seperti penggelapan dana pemerintah, atau penjualan atau penyalahgunaan milik pemerintah. Sebuah indikasi lebih lanjut dari kecenderungan untuk terjadinya korupsi dalam suatu masyarakat/instansi tertentu dapat dilakukan dengan aplikasi rumus korupsi Robert Klitgaard (1998), yakni:  $C = M + D - A$ , dimana, korupsi (C) sama dengan kekuatan monopoli (M) ditambah kekuasaan pejabat (D) dikurangi akuntabilitas (A). Artinya semakin tinggi monopoli dan kekuasaan pada suatu titik,



dan pada saat yang sama sistem akuntabilitas rendah/buruk, maka korupsi akan lebih mudah terjadi.

Definisi korupsi sebagai penyalahgunaan jabatan publik, akan tetapi, telah dikritik karena (i) terlalu legalistik dan (ii) berdasarkan ideal Barat pemisahan publik dan swasta yang tidak sesuai dengan konteks budaya banyak negara berkembang khususnya di negara Asia-Afrika. Adapun kritik pertama, gagasan penyalahgunaan jabatan tentu menyiratkan penyimpangan dari beberapa standar. Standar tidak selalu berdasarkan hukum formal, ia bisa juga dilihat dari perspektif moral, di mana peran yang tepat dari pemegang jabatan berasal dari prinsip-prinsip etika dasar. Oleh karena itu definisi korupsi tidak dengan sendirinya tergantung pada aturan hukum positif yang mungkin tidak lengkap atau insidental. Kritik yang kedua, tentang dasar dalam cita-cita Barat tentang aplikasi pemisahan publik/swasta, tidak selalu sesuai dengan keadaan di negara-negara non-Barat. Di beberapa negara-negara Asia-Afrika (seperti Arab Saudi, Brunei Darussalam, Kuwait, Bhutan, Tonga, dan Lesotho), hampir tidak terdapat garis demarkasi yang jelas antara konsep publik dan private. Oleh karena itu, selain deskripsi umum, ada definisi korupsi dari perspektif sempit berdasarkan konteks analisis yang digunakan. Perspektif tersebut dikelompokkan menjadi tiga (Heidenheimer 1989b; Collier 2000), yakni:

- 1) *public-office-centered*,
- 2) *market-centered*, dan
- 3) *public-interest-centered*.

Dari sudut pandang *public-office-centered*, korupsi dipandang sebagai penyimpangan perilaku dari tugas normal peran pejabat publik atau pelanggaran aturan untuk melayani kepentingan pribadi, termasuk suap, nepotisme, dan penyalahgunaan wewenang (Nye 1967, dikutip dalam Heidenheimer 1989b: 150). Kemudian, dari perspektif yang berpusat pada pasar (*market-centered*), korupsi didefinisikan

sebagai penggunaan jabatan publik oleh pejabat dengan memonopoli kantor mereka, membuat undang-undang dan peraturan lainnya (seperti pajak, subsidi, bahkan privatisasi) sebagai sarana memaksimalkan kepentingan diri mereka (Van Klaveren 1989, dikutip dalam Heidenheimer 1989b; Rose-Ackerman 1999: 117). Sedangkan dari perspektif kepentingan publik (*public-interest-centered*), korupsi diidentifikasi sebagai tindakan pemegang kekuasaan yang mendukung siapa pun memberikan penghargaan atau pemberian tertinggi/terbanyak dan sehingga mempengaruhi kerusakan kepentingan masyarakat (Friederick 1966, dikutip dalam Heidenheimer 1989b).

Korupsi tidak hanya berbentuk tindakan suap, penggelapan dan pencurian, tetapi juga oleh nepotisme dan kronisme. Dalam spektrum ini, Shah & Schacter (2004) berpendapat, korupsi mencakup tiga jenis luas kategori: (a) 'korupsi besar' (*grand corruption*), yaitu, sejumlah kecil elite pejabat melakukan pencurian atau penyalahgunaan secara luas atas sejumlah sumber daya publik; (b) 'state capture' atau '*regulatory capture*', yaitu kolusi yang dilakukan oleh pegawai publik dan swasta untuk memperoleh keuntungan pribadi; dan (c) 'korupsi birokrasi' atau '*petty corruption*', yaitu keterlibatan sejumlah besar pegawai publik tingkat rendah dalam menyalahgunakan jabatan publik untuk mendapat suap kecil atau hadiah. '*Grand corruption*' dan '*state capture*' biasanya dilakukan oleh elit politik atau pejabat senior pemerintah yang merancang kebijakan atau undang-undang untuk menguntungkan diri sendiri dengan memungkinkan mereka untuk menyalahgunakan sejumlah besar pendapatan dan fasilitas umum serta mendapatkan suap dari perusahaan nasional maupun transnasional. Sementara itu, 'korupsi birokrasi' atau '*petty corruption*' biasanya dilakukan oleh pegawai negeri sipil biasa sebagai bagian terdepan dari pelaksanaan kebijakan dan pelayanan pemerintah. Korupsi tersebut biasanya terjadi pada titik pertukaran hubungan antara PNS dan warga negara --kepada siapa mereka memberikan pelayanan publik secara



langsung. Misalnya, terjadi di layanan imigrasi, polisi, rumah sakit, pajak, sekolah, atau otoritas perizinan (Shah & Schacter 2004: 41).

Sebagaimana dikemukakan oleh Rose-Ackerman (1997), ukuran dan kejadian korupsi mungkin dapat dikaitkan dengan empat faktor kunci:

1. tingkat manfaat publik yang tersedia
2. kekuatan kewenangan (*discretionary*) pejabat
3. tingkat risiko yang terkait dengan transaksi korupsi
4. daya tawar antara koruptor dan korban

Dalam menganalisis faktor penyebab korupsi, para ahli yang mewakili negara-negara berpendidikan tinggi dan rendah sepakat pada tiga penyebab paling penting dari korupsi dan kesepakatan umum tentang pentingnya sejumlah faktor lain. Hal ini mencakup:

- norma dan nilai-nilai dari politisi dan pegawai negeri
- kurangnya kontrol, pengawasan, audit
- pola hubungan antara bisnis, politik, negara.

Dikatakan bahwa korupsi sebenarnya karena sebagian besar orang mempertahankan diri dari akibat terjadinya aksi dan reaksi dari unsur-unsur tertentu dalam suatu masyarakat. Elemen-elemen tersebut saling kunci satu sama lain dalam suatu lingkaran setan termasuk biaya politik tinggi, politisasi birokrasi, pengacauan logika anggaran negara oleh partai-partai politik, kontrol atas janji pejabat yang lemah, jumlah pegawai negeri yang banyak dan berpengaruh pada gaji yang rendah (Cobb & Gonzalez 2005: 6).

Definisi korupsi dan pengenalan terhadap seluk-beluknya menjadi isu yang sangat penting untuk memahami apakah, dan jika demikian bagaimana, strategi anti-korupsi mungkin dirumuskan, dilaksanakan dan dinilai. Sebuah titik awal yang penting adalah untuk mengatasi beberapa pertanyaan kunci seperti:

1. Apa jenis korupsi yang paling merusak dan di mana lembaga-lembaga atau negara?
2. Apa hubungan antara korupsi dan kemiskinan, dan
3. Bagaimana suatu negara dapat mengurangi korupsi?

Dalam lingkup pertanyaan-pertanyaan tersebut, tiga tingkat penilaian analisis penting yang luas dan harus dapat dilakukan (Doig 1998), yakni:

- penyebab dan dampak korupsi - misalnya, seberapa jauh penyebab korupsi dipengaruhi oleh faktor geografis, politik, ekonomi dan budaya, dan pada titik hubungan antara proses politik dan administrasi, dan antara sektor publik dan swasta
- lingkungan politik, ekonomi, kelembagaan dan sosial - misalnya, apakah korupsi terjadi pada lembaga tertentu dan bagaimana konfigurasi politik, administratif dan ekonomi yang berbeda menimbulkan tingkat yang berbeda atau jenis korupsi yang lain, dan dengan demikian dampak yang berbeda pada kelompok yang berbeda dalam masyarakat.
- ekonomi global dan hubungan antara korupsi, penipuan, kejahatan terorganisir dan arus modal internasional yang terlarang - misalnya, bagaimana kejahatan terorganisir berperan dan sejauh mana korupsi adalah kondisi yang diperlukan atau cukup diperlukan untuk bentuk-bentuk tertentu dari perilaku kriminal, apa bentuk kejahatan kalau ada atau tidak ada korupsi, serta apakah kejahatan terorganisir melakukan korupsi yang berkaitan dengan pencucian uang?

### 1.2.2 Latihan

1. Sebut dan jelaskan definisi korupsi menurut beberapa ahli!
2. Bagaimanakah kritik yang dilontarkan terhadap pengertian korupsi sebagai penyalahgunaan jabatan publik?
3. Bagaimanakah definisi korupsi dari perspektif sempit berdasarkan konteks analisis yang digunakan?



4. Jelaskan tiga jenis kategori korupsi menurut Shah & Schacter!
5. Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi ukuran dan kejadian korupsi!

## 1.5. PENUTUP

### 1.5.1 Tes Formatif

Pilihlah salah satu jawaban yang benar, dengan memberikan tanda silang!

1. Kritik terhadap korupsi sebagai penyalahgunaan jabatan publik, antara lain:
  - A. Berdasarkan ideal Barat pemisahan publik dan swasta yang tidak sesuai dengan konteks budaya banyak negara berkembang khususnya di negara Asia-Afrika.
  - B. Penyalahgunaan jabatan tertentu menyiratkan penyimpangan dari beberapa standar.
  - C. Dasar dalam cita-cita Barat tentang aplikasi pemisahan publik dan swasta tidak selalu sesuai dengan keadaan di negara-negara non barat.
  - D. Standar dilihat dari perspektif moral di mana peran yang tepat dari pemegang jabatan berasal dari prinsip etika dasar.
2. Ada 3 definisi korupsi dari perspektif sempit, yakni:
  - A. Public-market-centered, market-oriented, dan market-interest-centered.
  - B. Management-oriented, judicial-centered, dan public-office-oriented.
  - C. Public-office-oriented, market-centered, dan public-interest-centered.
  - D. Market-centered, judicial-oriented, dan behavioural-oriented.
3. Cakupan korupsi menurut Shah & Schacter adalah:
  - A. Regulatory capture, mandatory corruption, dan state corruption.

- B. Grand corruption, state capture, dan petty corruption.
- C. Petty corruption, state corruption, dan regulatory corruption.
- D. State corruption, imitation capture, dan petty corruption.

4. Salah satu faktor kunci korupsi menurut Rose -Ackerman (1997), adalah:

- A. Daya dukung antara koruptor dan korban.
- B. Tingkat popularitas publik yang tersedia.
- C. Tingkat keuntungan yang berkaitan dengan transaksi korupsi.
- D. Kekuatan kewenangan (*discretionary*) pejabat.

5. Salah satu penyebab penting dari korupsi antara lain:

- A. Norma dan nilai-nilai dari masyarakat.
- B. Pola hubungan antara bisnis, politik, dan negara.
- C. Kurangnya partisipasi masyarakat.
- D. Semuanya benar.

### 1.3.2 Umpan Balik

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar ini.

Tingkat penguasaan =  $\frac{\text{Jumlah jawaban yang benar}}{\text{Jumlah soal}} \times 100\%$

5

Arti tingkat penguasaan:

90 - 100%	: baik sekali
80 - 89%	: baik
70 - 79%	: cukup
< 70%	: kurang



### 1.3.3 Tindak lanjut

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar selanjutnya. Bagus! Jika masih dibawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar ini, terutama bagian yang belum dikuasai.

### 1.3.4 Rangkuman

Korupsi memiliki definisi yang beragam, tetapi yang paling umum digunakan mengacu pada penyalahgunaan jabatan publik untuk kepentingan pribadi. Definisi ini mencakup berbagai bentuk interaksi antara pejabat sektor publik dan agen lainnya. Dalam konteks ini, uang sering terlibat, seperti dalam suap atau sogok untuk kontrak pengadaan publik. Dalam konteks yang lain, akan tetapi, keuntungan pribadi dapat berupa sesuatu non-monetar, seperti dalam kasus patronase dan nepotisme. Definisi ini juga mencakup tindakan di mana tidak ada interaksi dengan aktor eksternal (atau aktor eksternal tidak secara eksplisit terlibat), seperti penggelapan dana pemerintah, atau penjualan atau penyalahgunaan milik pemerintah.

Sebagaimana dikemukakan oleh Rose-Ackerman (1997), ukuran dan kejadian korupsi mungkin dapat dikaitkan dengan empat faktor kunci, yakni tingkat manfaat publik yang tersedia, kekuatan kewenangan (*discretionary*) pejabat, tingkat risiko yang terkait dengan transaksi korupsi, dan daya tawar antara koruptor dan korban.

### 1.3.5 Kunci jawaban tes formatif

Nomor 1 jawaban A, Berdasarkan ideal Barat pemisahan publik dan swasta yang tidak sesuai dengan konteks budaya banyak negara berkembang khususnya di negara Asia-Afrika.

Nomor 2 jawaban C, Public-office-oriented, market-centered, dan public-interest-centered.

Nomor 3 jawaban B, Grand corruption, state capture, dan petty corruption.

Nomor 4 jawaban D, Kekuatan kewenangan (*discretionary*) pejabat.

Nomor 5 jawaban D, semuanya benar.

### DAFTAR PUSTAKA

- Anderson C.J. and Y.V. Tverdova. 'Corruption and Political Allegiances, and Attitudes Towards Government in Contemporary Democracies', *American Journal of Political Science*, 47 (1), 91-109. (2003)
- Aspinall, E. *Opposing Suharto: Compromise, Resistance, and Regime Change in Indonesia*, California: Stanford University Press. (2005)
- Eigen, P. 'Chasing Corruption Around the World: How Civil Society Strengthen Global Governance', Lecture transcript for Arthur and Frank Payne Distinguished Lecture Stanford Institute for International Studies, 4 October 2004 [Online, accessed 21 February 2008, at [www.iis-db.stanford.edu/evnts/3922/Eigen10'04.pdf](http://www.iis-db.stanford.edu/evnts/3922/Eigen10'04.pdf)] (2004)
- Gill, G. *The Dynamics of Democratization: Elites, Civil Society and the Transition Process*, London: MacMillan Press. (2000)
- Hope, K.R. Sr., and B. Chikulo (eds.) *Corruption and development in Africa*, London: Palgrave. (2000)
- Jain, A.K. 'Corruption: A Review' *Journal of Economic Surveys*, 15 (1), pp. 71-121. (2001)
- Johnston, M. (ed.). *Civil Society and Corruption: Mobilizing for Reform*, Lanham, MD: University Press of America. (2005)
- Linz, J. J. and A. Stepan. *Problems of Democratic Transition and Consolidation: Southern Europe, South America, and Post-*



- Communist Europe. Baltimore: Johns Hopkins University Press. (1996)
- McCusker, R. 'Review of anti-corruption strategies' Canberra: Australian Institute of Criminology [online, accessed 22 September 2015, [http://www.aic.gov.au/media\\_library/publications/tbp/tbp023/tbp023.pdf](http://www.aic.gov.au/media_library/publications/tbp/tbp023/tbp023.pdf)] (2006)
- Moran, J. Patterns of corruption and development in East Asia, *Third World Quarterly*, 20 (3), 569-87. (1999)
- Moran, J. Democratic transitions and forms of corruption, *Crime, Law and Social Change*, 36 (4), 379-93. (2001)
- Pippidi, A.M. 'Controlling Corruption Through Collective Action' *Journal of Democracy*, 24 (1), 101-115. (2013)
- Pope, J. *Confronting Corruption: The Elements of a National Integrity System*, Berlin: Transparency International. (2000)
- Rose-Ackerman, S. *Corruption: A Study in Political Economy*, New York: Academic Press. (1978)
- Rose-Ackerman, S. 'The Political Economy of Corruption' in Elliot, K. A. (ed.), *Corruption and the Global Economy*, Washington DC: Institute for International Economics, pp. 31-60. (1997a)
- Rose-Ackerman, S. 'The Role of the World Bank in Controlling Corruption', *Law and Policy in International Business*, Vol. 29, pp. 93-114. (1997b)
- Rose-Ackerman, S., *Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform*, Cambridge: Cambridge University Press. (1999)
- Schedler, A. Restraining the State: Conflicts and Agents of Accountability, in Schedler, A., Diamond, L. and Plattner, M.F. (eds), *The Self-Restraining State: Power and Accountability in New Democracies*, Boulder: Lynne Reinner, 332-339. (1999)
- Seligson, M. A. The Impact of Corruption on Regime Legitimacy: A Comparative Study of Four Latin American Countries, *The Journal of Politics*, 64 (2), pp. 408-33. (2002)

- Setiyono, B., Adnan, M. dan Astrika, L. *Laporan Penelitian Perbandingan Gerakan Anti Korupsi di Indonesia dan Korea Selatan FISIP UNNDIP* (2015)
- Setiyono, B. and McLeod, R. 'Civil society organisations' contribution to the anti-corruption movement in Indonesia' *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 46 (3), 347-370. (2010)
- Tanzi, V. *Policies, institutions and the dark side of economics*, Cheltenham, UK; Northampton, Mass., USA: E. Elgar. (2000)
- World Bank. *Anti-corruption in Transition: A Contribution to the Policy Debate*, Washington DC: World Bank (2000)

## SENARAI

- Anggaran negara : Sejumlah akumulasi uang yang dikelola negara dari pajak, pengelolaan usaha, eksploitasi sumber daya alam, pelayanan publik, dan penerimaan lain yang digunakan untuk membiayai jalannya pemerintahan.
- discretionary : Kewenangan yang dimiliki seseorang (biasanya karena jabatannya) untuk menentukan kebijakan yang belum diatur sebelumnya.
- suap : Pemberian kepada pejabat atau pegawai (pemerintah) dengan maksud untuk memperlancar urusan atau memperoleh pelayanan istimewa.



## **2. SUB POKOK BAHASAN:**

**Korupsi, demokratisasi, serta peran OMS dalam pemberantasan korupsi.**

## **2.1 PENDAHULUAN**

### **2.1.1 Deskripsi Singkat**

Sub bahasan pokok ini mengantarkan mahasiswa untuk menjelaskan hubungan korupsi dengan demokrasi, bagaimana kecenderungan prevalensi korupsi yang terjadi di negara demokrasi dan negara non-demokrasi, serta di negara maju dan negara berkembang. Lebih lanjut mahasiswa mampu menjelaskan efektifitas demokratisasi dalam upaya pemberantasan korupsi, serta akses demokratisasi bagi pemberantasan korupsi di negara demokrasi baru. Akan dibahas pula mengenai peran OMS dalam upaya pemberantasan korupsi.

### **2.1.2 Relevansi**

Mahasiswa Ilmu Pemerintahan perlu menjelaskan hubungan antara korupsi dengan demokratisasi yang terjadi di suatu negara karena beberapa sebab: 1) sebagai pengetahuan awal untuk bisa memahami keterkaitan korupsi dengan proses demokrasi; 2) bisa menjelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi di negara-negara berkembang; 3) bisa menyebutkan teori-teori yang menjelaskan fenomena korupsi di negara demokrasi baru; 4) bisa menjelaskan peran OMS dalam upaya pemberantasan korupsi.

### **2.1.3 Kompetensi**

#### **a. Standar Kompetensi**

Setelah mengikuti pokok bahasan ini selama satu pertemuan maka diharapkan mahasiswa akan dapat menjelaskan keterkaitan antara korupsi yang terjadi di suatu negara dengan proses demokrasi yang dijalankan. Mahasiswa juga diharapkan mampu

menyebutkan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi maraknya korupsi di negara transisi demokrasi, serta menjelaskan teori-teori yang membahas fenomena tersebut. Lebih lanjut, mahasiswa mampu menjelaskan peran strategis yang dimiliki OMS dalam upaya pemberantasan korupsi.

#### **b. Kompetensi Dasar**

1. Kemampuan menjelaskan keterkaitan korupsi dengan demokrasi.
2. Kemampuan menjelaskan faktor-faktor penyebab korupsi di negara demokrasi baru.
3. Kemampuan menjelaskan teori-teori yang mengulas fenomena maraknya korupsi di negara transisi demokrasi.
4. Kemampuan menjelaskan peran strategis OMS dalam upaya pemberantasan korupsi.

## **2.2. PENYAJIAN**

### **2.2.1. Uraian dan contoh**

Berbicara dari aspek penyebab korupsi, adalah sangat menarik untuk mencari jawaban terhadap teka-teki pertanyaan mengapa negara berkembang –termasuk negara transisi demokrasi dan non-demokrasi– memiliki kecenderungan prevalensi korupsi yang lebih tinggi apabila dibandingkan dengan negara-negara maju dan atau demokratis? Data Corruption Perception Index (CPI) dari Transparansi International dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa negara-negara non-demokrasi selalu berada pada level bawah, sedangkan negara demokratis berada pada level atas di daftar ranking survey tersebut. Fakta semacam ini akan menuntut kita untuk mendapatkan jawaban mengenai faktor-faktor penyebab yang mempengaruhi masalah ini.



**Tabel 1: Daftar Negara CPI tertinggi dan terendah**

10 Negara rekor CPI tertinggi				10 Negara rekor CPI terendah			
Rank	Country	2014	2013	Rank	Country	2014	2013
1	Denmark	92	91	166	Eritrea	18	20
2	New Zealand	91	91	166	Libya	18	15
3	Finland	89	89	166	Uzbekistan	18	17
4	Sweden	87	89	169	Turkmenistan	17	17
5	Norway	86	86	170	Iraq	16	16
5	Switzerland	86	85	171	South Sudan	15	14
7	Singapore	84	86	172	Afghanistan	12	8
8	Netherlands	83	83	173	Sudan	11	11
9	Luxembourg	82	80	174	North Korea	8	8
10	Canada	81	81	174	Somalia	8	8

Sumber: <http://www.transparency.org/cpi2014/results>

Ada beberapa teori yang dapat menjelaskan fenomena ini. Salah satunya adalah 'teori ketimpangan distribusi kekayaan' yang menjelaskan bahwa semakin besar kesenjangan pendapatan, semakin tinggi tingkat korupsi di suatu negara (Rothstein & Uslaner 2005; Husted 1999: 342). Dalam kaitan ini, Amartya Sen dalam bukunya yang terkenal *Development as Freedom* (1999), berpendapat bahwa tiap individu, untuk mencapai potensi optimum mereka, harus bebas dari dominasi sosial-politik sepihak dan harus menggabungkan sumber daya mereka untuk mengejar kepentingan mereka bersama secara kolektif dan menyediakan barang-barang publik untuk sebanyak mungkin manusia. Dengan demikian, negara yang demokratis memungkinkan adanya perwujudan tujuan kebebasan untuk mendistribusikan sumber daya publik secara sama dan adil untuk semua orang. Sebaliknya, negara non-demokratis pada umumnya memiliki ketimpangan pendapatan yang tinggi antar golongan, akibat

sistem politik yang tidak memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh masyarakat. Sebagaimana dikatakan oleh Rothstein & Uslaner (2005), adanya distribusi sumber daya dan peluang berperan membentuk keyakinan orang memiliki kemauan untuk berbagi nasib yang sama dengan nilai-nilai yang serupa. Tiap individu cenderung lebih suka untuk berbagi dengan orang lain seraya menempatkan dirinya sebagai bagian dari masyarakat yang lebih besar manakala mereka merasakan adanya pemerataan sumber daya dan peluang yang adil. Sebaliknya, di dalam kondisi ketimpangan yang tinggi, tiap individu akan cenderung mengutamakan kepentingan diri sendiri, dan sangat mungkin menggunakan korupsi sebagai jalan untuk memenuhi kepentingan tersebut (hal. 52). Dalam kasus ini, korupsi lebih merupakan tanda gejala (*symptom*) adanya masalah berkait dengan proses distribusi kekayaan yang tidak merata, dan bukan sekedar proyek distribusi kekayaan (lihat Scott 1972).

Agak berbeda dengan teori sebelumnya, teori akumulasi modal memandang persoalan korupsi di negara-negara berkembang sebagai cara akumulasi modal primitif oleh para elit domestik atau kelompok kapitalis yang mengeksploitasi rakyat untuk mengejar akumulasi modal (Iyayi 1986). Hal ini terjadi terutama di negara-negara bekas penjajahan, seperti di Afrika dan Asia, dimana kelompok-kelompok predator bekerjasama satu sama lain untuk merampok kekayaan negara. Cara yang sama sebenarnya pernah dilakukan juga di negara-negara maju pada saat kelas kapitalis mereka berkolusi dengan kekuasaan untuk mengumpulkan kekayaan melalui kolonialisme (Hicks 2004: 11). Sebagaimana pendapat Iyayi (1986: 28-9), korupsi yang terjadi di negara berkembang adalah disebabkan karena elit dan kelompok-kelompok kapitalis masih tumbuh dan tidak memiliki kesempatan untuk melakukan akumulasi modal melalui penjajahan dan eksploitasi eksternal di negara lain.

Dari perspektif lain, teori *elite capture* menjelaskan bahwa korupsi di negara berkembang terjadi karena tersedianya kesempatan



bagi elite untuk memperkaya diri (Szeffel 2000; Treisman 2000). Dalam konteks ini, sumber daya yang seharusnya ditujukan untuk kepentingan masyarakat umum, dirampas oleh beberapa individu yang memiliki status superior - baik itu ekonomi, politik, pendidikan, atau etnis. Individu atau kelompok memanfaatkan program pemerintah yang ditujukan untuk mendistribusikan sumber daya atau dana untuk masyarakat umum dengan menggunakan pengaruh elit mereka untuk mengarahkan bantuan tersebut sedemikian rupa sehingga terutama menguntungkan individu atau kelompok tertentu saja. Hal ini terjadi karena biasanya terdapat korelasi antara kesempatan untuk memperkaya diri dengan berbagai variabel (termasuk misalnya: sejauh mana pembangunan ekonomi, khususnya sejarah dan latar belakang budaya, perkembangan politik, tingkat pendidikan, sistem administrasi dan hukum). Walaupun terdapat penjelasan tentang variabel penyebab ini, teori ini sepakat bahwa tinggi-rendahnya prevalensi korupsi dalam suatu masyarakat dipengaruhi kemungkinan resiko, yakni sejauh mana suatu masyarakat menyeimbangkan antara kemungkinan sanksi atau hukuman dengan kemungkinan manfaat yang diambil dari tindakan korupsi dalam konteks psikologis, sosial dan finansial (Treisman 2000). Suatu negara yang memiliki perangkat sistem hukum, ekonomi, politik, dan sosial yang dapat memaksimalkan kemungkinan risiko (tertangkap dan mendapat hukuman berat) akan cenderung memiliki tingkat korupsi yang lebih rendah. Karenanya dapat dipahami bahwa korupsi yang tinggi di negara-negara berkembang sering disebabkan karena adanya dominasi hirarki dan otoritas dari elite yang kebal hukum sehingga mengurangi efektivitas sistem mereka dalam mewujudkan tatanan sosial yang setara (Treisman 2000: 400). Lagi pula, negara-negara berkembang pada umumnya memiliki pemerintahan yang biasanya masih didominasi oleh budaya *clientelistic* yang kuat, penegakan hukum yang lemah, intervensi negara yang tinggi dalam kegiatan pribadi, serta mekanisme akuntabilitas yang buruk (Heywood 1997; Adsera, Boix & Payne 2003).

Terlepas dari berbagai teori yang menjelaskan, pada intinya, korupsi yang terjadi di negara berkembang terjadi karena kompleksitas struktur sosial-politik yang tidak seimbang dan egaliter antara masyarakat umum dengan kelompok elite di negara-negara itu. Dalam konteks ini, banyak orang percaya bahwa demokratisasi dianggap sebagai obat mujarab untuk menghilangkan korupsi. Demokrasi bisa mendorong terjadinya egalitarianisme yang pada akhirnya memperkecil peluang bagi elite untuk memperkaya diri sendiri secara ilegal. Sejalan dengan hal ini, mereka menyatakan gagasan bahwa proses demokratisasi bisa mendorong terbentuknya instrumen yang dapat mengakhiri kesalahan rezim otoriter yang menghancurkan kepentingan rakyat di negara-negara berkembang (Cunningham 2002; Doig 2000; Johnston 2000b). Demokratisasi dapat menciptakan instrumen seperti pemilu, kebebasan informasi, hak berserikat, hak berpartisipasi, dan lain-lain yang pada akhirnya dapat mewujudkan suatu masyarakat terbuka, sehingga manipulasi dan penyimpangan dapat dipersempit. Secara lebih khusus, demokratisasi juga memungkinkan adanya kesempatan bagi media massa untuk mengakses informasi dan membuat proses-proses politik dan pengambilan keputusan menjadi mudah diakses dan diketahui secara luas oleh publik, sehingga tidak ada ruang atau alasan bagi siapapun untuk menyalahgunakan kekuasaan (Randall 1993: 32).

Akan tetapi, muncul pertanyaan kritis berkaitan dengan fakta bahwa proses demokratisasi di banyak negara berkembang tidak juga berperan signifikan dalam menekan persoalan korupsi. Negara demokratis baru yang mengalami gelombang demokratisasi sejak pertengahan 1970-an, tidak mampu mengkonstruksi sistem hukum, sosial dan politik yang efektif sehingga korupsi masih tetap merajalela seperti pada masa pemerintahan otoriter. Meski berbagai usaha telah mereka lakukan, tetapi banyak riset menemukan bukti bahwa korupsi justru makin merajalela di banyak negara (Beichelt 2004; Fleischer, 1997; White & White, 1996; Hope & Chikulo 2000; Nickson 1996;



Seligson 2002). Pejabat-pejabat baru terjebak pada praktek pemerintahan yang sudah sedemikian kotor dan tidak mampu keluar dari jebakan itu. Indeks Persepsi Korupsi (CPI) dari Transparency International juga menunjukkan bahwa angka CPI di sebagian besar negara demokrasi baru tidak jauh berbeda dari rekan mereka yang masih di bawah rezim otoriter. Mengapa proses demokratisasi tidak cukup untuk membuat perbaikan dalam penanganan korupsi? Bahkan bisa jadi, demokrasi hanya mengkonsolidasikan korupsi sebelumnya dan menumbuhkan korupsi-korupsi yang baru?

Dalam kaitan ini, studi yang dilakukan Moran (2001: 378-9) menemukan bahwa proses transisi menuju demokrasi justru diwarnai oleh berbagai variabel yang berimplikasi terhadap perluasan korupsi. Penelitian serupa yang dilakukan oleh Rose & Shin (2001) juga menemukan bahwa proses demokratisasi di berbagai negara, sementara di satu sisi dapat menghasilkan keabsahan rezim demokratis, tapi di sisi lain juga memiliki potensi untuk mengembangkan korupsi. Mereka menyimpulkan:

*"A regime that is an incomplete democracy, with free elections but lacking essential elements of the modern state, may survive indefinitely but only at a price. Major derogations from the rule of law and untrustworthy institutions of civil society limit the effectiveness of a broken-back democracy"* (Suatu rezim yang demokrasiya tidak paripurna, dengan Pemilu bebas tapi tidak memiliki elemen esensial sebagai negara modern, mungkin bisa bertahan tapi dengan kompensasi harga. Kerusakan dari aturan hukum dan lembaga civil society yang tidak terpercaya membatasi efektivitas kembalinya demokrasi yang sudah terlanjut rusak). (2001: 351)

Riset World Bank (2000) juga menunjukkan fenomena serupa. Dalam studi yang menganalisis keadaan negara-negara Eropa Timur bekas Uni Soviet, Bank Dunia menemukan bahwa proses transisi yang memberikan kekuasaan pada lembaga dan pejabat baru di tengah-

tengah redistribusi aset negara besar-besaran, menyebabkan lahan subur bagi korupsi. Pejabat memanfaatkan lemahnya kapasitas rakyat dan tiadanya civil society dalam mengawasi redistribusi itu (hal. xix).

Mengapa negara demokrasi baru justru terjebak pada merebaknya korupsi yang parah? Pada prinsipnya, hal ini disebabkan karena proses demokratisasi menyebabkan ketidakstabilan, kekacauan dan ketidakpastian sosial-politik yang menciptakan suasana kondusif bagi terjadinya korupsi (Rose Ackerman 2000; Campante, Chor & Anh Do 2008). Masalah ini terjadi karena ketidakstabilan sistem politik dan ketidakjelasan fungsi-fungsi institusi negara dapat memberikan ruang lebih besar bagi orang jahat untuk korupsi; lebih dari itu, negara demokrasi baru juga biasanya memiliki berbagai masalah akut lain yang membuat korupsi merajalela. Termasuk di antara masalah tersebut adalah kurangnya legitimasi pemerintah, ketidakmampuan anggaran negara untuk membayar pegawai, lemahnya kapasitas para pemimpin politik untuk kompetisi, ketimpangan dalam distribusi harta kekayaan, maraknya fragmentasi sosial, dan lemahnya posisi dan kapasitas rakyat dalam berpartisipasi (Johnston 2000a: 2-3; 2000b; Beichelt 2004: 127). Selanjutnya, negara-negara demokrasi baru masih memiliki struktur pemerintahan yang belum berfungsi dengan baik dalam mengendalikan dan mengelola sumber daya komunal. Pada area supra struktur politik, kelemahan sistem politik ditandai dengan tidak adanya peradilan yang independen, peraturan negara yang berlebihan, kepemimpinan pemerintah yang elitis, lembaga penegak hukum yang tidak efektif, pengawasan parlemen yang lemah, dan birokrasi yang tidak profesional; sedangkan pada area infrastruktur politik, kelemahan ditandai oleh adanya partai politik yang rakus, media massa yang partisan, civil-society yang masih lemah, dan rakyat yang tidak terorganisir (Moran, 2001; World Bank 2004 & 2005a: 10-11; Gray & Kaufman 1998).

Dalam situasi seperti itu, tidak ada sistem akuntabilitas yang efektif, yang memungkinkan para pejabat menjalankan tugas dengan



baik. Karena pengaruh aktor dan pendekatan lama masih bercokol, pergantian rezim tidak disertai dengan perubahan sistem akuntabilitas yang kompatibel dengan struktur dan nilai yang demokratis (Moran 2001: 389-92). Perubahan-perubahan memang dilakukan, akan tetapi substansinya tidaklah terlalu berbeda dengan pola lama. Terlebih, politisi dan pembuat kebijakan baru pada umumnya tidak memiliki pengalaman yang memadai dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan masih harus banyak belajar untuk melaksanakan tugas mereka. Akibatnya, produk hukum dan kebijakan yang mereka buat kadang tidak terkonsep dan terkoordinasi dengan baik. Kondisi ini menyebabkan problem baru: pada satu sisi, pejabat dapat menghindari dari tanggung jawab untuk bekerja sesuai dengan harapan publik, pada sisi lain, walaupun mereka ingin bekerja baik, para pejabat mungkin mengalami kebingungan dengan mekanisme, peraturan, dan petunjuk yang tidak jelas dan berubah-ubah. Sistem akuntabilitas yang belum stabil ini menyebabkan pemegang kekuasaan tidak bisa melaksanakan prinsip pemerintahan yang baik, sehingga eskalasi korupsi tidak juga berkurang.

Kondisi ini diperparah dengan kinerja lembaga penegak hukum. Mindset mereka selama ini biasanya telah terbentuk sebagai lembaga penindas rakyat daripada mewujudkan keadilan dan melayani kepentingan rakyat. Tentara, jaksa, hakim dan polisi, misalnya, pada masa otoriter dibentuk, dididik, dan digunakan sebagai alat penguasa untuk mengamankan pemerintah yang korup, sehingga pola cara pandang dan bertindak mereka tidak mudah berubah pada masa demokratis. Walaupun tokoh otoriter telah hilang, mereka justru dapat memiliki lebih banyak kebebasan untuk mencari tuan-tuan baru untuk bersekongkol melakukan korupsi (Lindsey 2002: 2-12).

Negara demokratis baru juga ditandai oleh pola hubungan yang tidak seimbang antara warga negara dan politisi. Walaupun dalam proses-proses demokrasi formal, seperti Pemilu, antusiasme warga terlihat tinggi, akan tetapi, pemilih cenderung memposisikan politisi

dan pejabat sebagai bos daripada sebagai wakil dan pelayan sehingga mereka tidak memiliki minat untuk meminta akuntabilitas para pejabat yang sudah mereka pilih (Soule 2004: 2). Alih-alih mengontrol dan mengawasi, pemilih justru terjebak dalam posisi sebagai obyek mobilisasi yang membela pemimpin politik mereka secara membabi buta tanpa sikap yang kritis. Selain itu, sebagaimana dinyatakan Soule (2004: 2-3), pemilih juga tidak terbiasa untuk mencari informasi tentang track record politisi dan mekanisme-mekanisme demokrasi baru. Hal ini dimanfaatkan oleh para politisi yang tidak kredibel dengan menggunakan uang dan cara-cara klientelistik untuk mendapat dukungan pemilih (Scott, 1972b: 92; Keefer 2004: 26). Di kebanyakan negara, partai didirikan secara *top-down* oleh para elite dari atas, bukan tumbuh *bottom-up* dari gerakan massa di tingkat bawah. Akibatnya, partai politik lebih suka memilih sistem perwakilan proporsional agar politisi selalu bergantung pada elite para pemimpin partai bukan pada dukungan dari konstituen mereka sendiri (Sidel 1996; Carothers 2002: 9-14). Pada akhirnya, Pemilu dan bentuk-bentuk kompetisi politik tidak dapat berfungsi sebagai mekanisme seleksi kepemimpinan dengan tepat.

Kelemahan warga negara juga terlihat dalam melakukan pemantauan terhadap berbagai fungsi birokrasi. Karena dilekang selama puluhan tahun oleh pemerintah, warga negara tidak terbiasa untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pelayanan umum, bahkan mereka berposisi inferior jika berhadapan dengan birokrasi. Sementara, birokrasi sendiri masih diliputi oleh, dan melanjutkan, praktek-praktek otoriterianisme dimana bekerja lebih sebagai pelayan dan pelindung penguasa, bukan menjadi penyedia layanan publik. Dalam konteks Indonesia, banyak usaha telah dilakukan oleh CSOs, akademisi, dan media untuk meningkatkan kesadaran akan hak-hak publik, akan tetapi, biaya melakukan tindakan kolektif untuk mengendalikan birokrasi biasanya tinggi. Belum lagi dengan ancaman resiko yang membayangi warga negara yang kritis. Akibatnya, rakyat



tetap lebih suka membayar uang suap yang jauh lebih nyaman, dan bahkan sering kali lebih murah, daripada mengambil resiko berjuang untuk mendapatkan hak-hak mereka (World Bank 2003: viii).

Kelemahan akuntabilitas publik juga diakibatkan oleh buruknya mekanisme hubungan akuntabilitas antara legislatif, eksekutif dan instansi penyedia layanan yang terhalang oleh lemahnya politisi-politisi yang belum berpengalaman dalam menyampaikan ide atau gagasan yang harmonis dengan kementerian dan penyedia layanan. Politisi baru ini biasanya tidak memiliki ilmu dan pengalaman yang cukup memadai untuk mengawasi birokrasi. Sebagai contoh, dalam kasus yang terjadi di Argentina misalnya, para politisi tidak mampu mengimbangi birokrat senior yang sangat berpengalaman, yang telah terbiasa menjalankan kekuasaan yang berlebihan selama periode otoriter (Eaton 2003). Selain itu, akibat ketidakpastian karir dan jenjang politik, para politisi juga cenderung untuk memusatkan perhatian mereka pada kepentingan jangka pendek daripada isu-isu jangka panjang (Bank Dunia 2003: vii). Akibatnya, para politisi di parlemen cenderung tidak memperlihatkan usaha untuk mengumpulkan informasi secara sistematis dan berkelanjutan tentang kinerja lembaga pemerintah yang akan meningkatkan akuntabilitas mereka (World Bank 2003: viii). Mereka lebih mengutamakan usaha supaya "tetap terpilih" dibandingkan dengan usaha untuk membuat sistem yang baik dalam mensejahterakan rakyat. Disamping itu, partai-partai politik di negara-negara demokratis baru juga biasanya cenderung 'lapar kekuasaan' dengan maksud untuk memperkuat kemampuan finansial. Banyak dari mereka ingin bercokol di kantor eksekutif dan enggan mengembangkan budaya oposisi yang kuat di parlemen, sehingga membuat kontrol mekanisme antara parlemen dan pemerintah tidak berfungsi.

Kondisi tersebut diperparah oleh kenyataan akan adanya keterlambatan dalam membentuk lembaga yang dirancang khusus untuk memerangi korupsi. Di banyak negara, lembaga anti-korupsi biasanya terbentuk justru ketika situasi korupsi sudah parah, dengan

pola yang bermetamorfosa. Sebagai contoh, KPK di Indonesia, baru terbentuk tahun 2004, enam tahun setelah reformasi berlangsung di tahun 1998. Walaupun sebelumnya telah ada lembaga semacam Timastipikor (Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), akan tetapi tim itu tidak memiliki diskresi yang kuat untuk melawan korupsi.

Pada sisi lain, kemampuan kelompok-kelompok pro-reformasi, masyarakat bisnis, dan media massa, dalam memantau pemerintah masih terlalu lemah dan tidak berpengalaman. Mereka pada umumnya masih memiliki ketergantungan ekonomi dan politik kepada pemerintah dalam kadar tertentu. Para pengusaha dan pemilik media, misalnya, seringkali juga merangkap menjadi pengurus partai yang berkuasa. Tidak heran apabila kondisi ini memungkinkan terjadinya pembentukan sistem monopoli dalam struktur pemerintahan, dan pada akhirnya membuat korupsi menjadi dilembagakan dalam aktifitas politik dan ekonomi (Setiyono 2012; Johnston 2000b: 10). Kelompok orang yang super kaya memanfaatkan keadaan seperti ini dengan memberikan sogokan kepada pejabat untuk membentuk undang-undang negara, kebijakan, dan peraturan yang menguntungkan mereka. Mereka, bersama dengan para politisi, berubah menjadi mafia terorganisir dalam korupsi (Kaufmann 2003: 21). Akibat lebih lanjut, korupsi berkembang tidak hanya pada sektor pemerintahan, tetapi juga sektor swasta/pasar. Boleh dikatakan, korupsi menjadi insentif dalam penetapan struktur ekonomi-politik dan keterkaitan antara kekuasaan pemerintah dan sektor bisnis (Kaufmann 2003: 21).

Memperhitungkan keadaan ini, korupsi yang terjadi dalam negara demokrasi baru adalah merupakan persoalan yang kompleks dan multidimensional. Jatuhnya rezim otoriter tidak selalu menjadi penyelesaian masalah. Inisiatif memerangi korupsi harus memperhatikan kelemahan di berbagai sektor dan perlu diperhitungkan secara simultan. Tentu saja, berbagai kreatifitas dan alternatif usaha harus dicari, utamanya tindakan untuk mempercepat



proses reformasi yang menggerakkan peningkatan akuntabilitas (Johnston & Kpundeh 2004: 5).

Inisiatif-inisiatif tersebut harus dihasilkan oleh pelaku yang bebas dari kepentingan politik jangka pendek. Mereka haruslah aktor yang kredibel yang mampu membujuk para elite dan rakyat biasa bahwa reformasi adalah penting dan itu sesuai dengan kepentingan mereka untuk melakukannya (Johnston & Kpundeh 2004: 6). Di antara aktor tersebut adalah organisasi masyarakat sipil (OMS). Mereka pada umumnya telah mencatat peran penting selama, dan menjadi katalis untuk, runtuhnya rezim-rezim otoriter (Diamond 1994: 5). Berbagai riset menunjukkan bahwa, peran aktor-aktor masyarakat sipil itu sangat penting dalam meniatuhkan rezim-rezim otoriter dan selanjutnya mempengaruhi proses demokratisasi menjadi terkonsolidasi (lihat O'Donnell & Schmitter 1986; Rueschemeyer, Stephens & Stephens 1992; Haynes 1997).

Terlebih lagi, sebagaimana pendapat dari Hayden, Court & Mease (2004: 62-3), dampak peran OMS dalam perumusan kebijakan di negara-negara transisi demokrasi sangat penting karena, seperti sudah disebutkan diatas, aktor-aktor negara dan sistem akuntabilitas formal masih dalam keadaan lemah atau belum mampu memainkan perannya dalam memerangi korupsi. OMS dapat mengambil peran yang substantif karena pejabat pemerintah dan aktor swasta umumnya telah menjadi kelompok kepentingan dalam korupsi sehingga mereka apatis terhadap agenda pemberantasan korupsi. Sejalan dengan hal tersebut, Partai politik juga memiliki minat untuk menginisiasi secara sungguh-sungguh kebijakan antikorupsi, karena agenda seperti itu berpotensi membahayakan kepentingan mereka sendiri.

Kenyataan bahwa warga negara biasa masih cenderung sibuk dengan kepentingan survival dalam menghadapi kehidupan sehari-hari, menjadikan mereka memiliki kemampuan yang terbatas untuk mengambil tindakan yang signifikan. Situasi ini menyebabkan OMS dapat berperan sentral dalam menutup kelemahan publik. OMS dapat

berperan untuk menjadi mediator antara mereka yang memerintah dan menuntut peningkatan akuntabilitas penyelenggara negara (World Bank 2000: 44-5; Cornwall & Gaventa 2001).

Dalam perspektif yang lebih luas, OMS memiliki berbagai karakteristik khas yang memungkinkan mereka untuk bisa berperan luas dan efektif dalam agenda pemberantasan korupsi. Bila partai-partai politik cenderung mewakili kepentingan parsial untuk mendapatkan akses terhadap institusi kekuasaan, sehingga tidak jarang menyeret mereka ke sikap oportunistik; OMS secara normatif tidak mempunyai modus untuk memperoleh kekuasaan politik, sehingga dapat memperjuangkan kepentingan publik secara lebih natural (Pietrzyk 2003: 42). OMS berfungsi sebagai alternatif entitas yang independen untuk melakukan tekanan dan monitoring pelaksanaan mekanisme akuntabilitas formal dalam struktur hubungan kekuasaan negara.

Upaya-upaya tersebut bila dilakukan secara berkelanjutan dan terus menerus, dapat membentuk kebiasaan yang baik (*healthy habit*) dalam penyelenggaraan negara, sehingga pada akhirnya dalam jangka panjang akan dapat merangsang proses demokratisasi yang sukses dan mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik.

## 2.2.2 Latihan

1. Mengapa prevalensi korupsi cenderung lebih tinggi di negara non demokrasi? Jelaskan!
2. Jelaskan teori-teori yang mengemukakan fenomena tingginya kecenderungan korupsi di negara non demokrasi!
3. Bagaimanakah peran demokratisasi terhadap tingkat korupsi di suatu negara?
4. Mengapa negara-negara demokrasi baru cenderung mengalami perluasan korupsi? Jelaskan!
5. Apa sajakah faktor yang mempengaruhi tingginya korupsi di negara berkembang?



## 2.3. PENUTUP

### 2.3.1. Tes Formatif

Pilihlah salah satu jawaban yang benar, dengan memberikan tanda silang!

1. Teori ketimpangan distribusi menjelaskan tentang:

- A. Semakin besar kesenjangan pendapatan, semakin tinggi tingkat korupsi di suatu negara
- B. Kebebasan untuk mendistribusikan sumber daya publik secara sama dan adil bagi semua orang.
- C. Semakin demokratis suatu negara, semakin tinggi tingkat korupsi yang terjadi di negara tersebut.
- D. Kebebasan dari dominasi sosial politik sepihak.

2. Penyebab terjadinya korupsi di negara berkembang, antara lain:

- A. Dominasi hirarki dan otoritas dari elit yang kebal hukum yang mengurangi efektivitas sistem dalam mewujudkan tatanan sosial yang setara.
- B. Tersedianya kesempatan untuk elit memperkaya diri.
- C. Kompleksitas struktur sosial-politik yang tidak seimbang dan egaliter antara masyarakat umum dengan kelompok elit di negara itu.
- D. Proses distribusi kekayaan yang tidak merata.

3. Negara demokrasi baru terjebak dalam korupsi karena:

- A. Tidak adanya peraturan yang independen dan peraturan negara yang berlebihan.
- B. Ketidakstabilan sistem politik dan ketidakjelasan fungsi institusi negara.
- C. Kepemimpinan pemerintah yang elitis dan lembaga hukum yang tidak efektif
- D. Ketimpangan kekayaan dan lemahnya kapasitas pemimpin untuk berkompetisi.

4. Demokratisasi dianggap sebagai obat mujarab bagi korupsi, karena:

- A. Bisa mendorong egalitarianisme yang memperkecil kesempatan elit memperkaya diri secara ilegal
- B. Mendorong terbentuknya sistem untuk melanggengkan rezim otoriter.
- C. Mewujudkan masyarakat yang liberal sehingga manipulasi dan penyimpangan dapat dipersempit.
- D. Memberikan kesempatan media masa untuk monopoli informasi publik.

5. Karakteristik khas OMS dalam agenda pemberantasan korupsi adalah:

- A. Cenderung mewakili kepentingan parsial untuk mendapatkan akses terhadap institusi kekuasaan politik.
- B. Membawa aspirasi masyarakat menengah ke bawah untuk disuarakan di tingkat pusat.
- C. Memiliki sistem keanggotaan yang terorganisir berdasarkan asas kebersamaan.
- D. Sebagai alternative entitas yang independen untuk melakukan tekanan dan monitoring pelaksanaan mekanisme akuntabilitas formal dalam struktur hubungan kekuasaan negara.

### 2.3.2 Umpan Balik

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar ini.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah jawaban yang benar}}{5} \times 100\%$$



Arti tingkat penguasaan:

90 – 100%	: baik sekali
80 - 89%	: baik
70 – 79%	: cukup
< 70%	: kurang

### 2.3.3 Tindak lanjut

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar berikutnya. Bagus! Jika masih dibawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar ini, terutama bagian yang belum dikuasai.

### 2.3.4 Rangkuman

Proses demokratisasi di banyak negara berkembang tidak juga berperan signifikan dalam menekan persolan korupsi. Pejabat-pejabat baru terjebak pada praktek pemerintahan yang sudah sedemikian kotor dan tidak mampu keluar dari jebakan itu. Mengapa proses demokratisasi tidak cukup untuk membuat perbaikan dalam penanganan korupsi? Berbagai studi menemukan bahwa proses transisi menuju demokrasi justru diwarnai oleh berbagai variable yang berimplikasi terhadap perluasan korupsi.

Hal tersebut disebabkan karena proses demokratisasi menyebabkan ketidakstabilan, kekacauan dan ketidakpastian sosial-politik yang menciptakan suasana kondusif bagi terjadinya korupsi. Dalam situasi seperti itu, tidak ada sistem akuntabilitas yang efektif, yang memungkinkan para pejabat menjalankan tugas dengan baik. Sistem akuntabilitas yang belum stabil ini menyebabkan pemegang kekuasaan tidak bisa melaksanakan prinsip pemerintahan yang baik, sehingga eskalasi korupsi tidak juga berkurang. Dalam situasi seperti inilah, muncul benih pergerakan OMS untuk menstimulasi perbaikan dalam akuntabilitas publik.

### 2.3.5 Kunci Jawaban tes formatif

Nomor 1 jawaban A, Semakin besar kesenjangan pendapatan, semakin tinggi tingkat korupsi di suatu negara

Nomor 2 jawaban C, Kompleksitas struktur sosial-politik yang tidak seimbang dan egaliter antara masyarakat umum dengan kelompok elit di negara itu.

Nomor 3 jawaban B, Ketidakstabilan sistem politik dan ketidakjelasan fungsi institusi negara.

Nomor 4 jawaban C, Bisa mendorong egaliteranisme yang memperkecil kesempatan elit memperkaya diri secara ilegal

Nomor 5 jawaban D, Sebagai alternative entitas yang independen untuk melakukan tekanan dan monitoring pelaksanaan mekanisme akuntabilitas formal dalam struktur hubungan kekuasaan negara.

### DAFTAR PUSTAKA

- Iyayi, F., 'The primitive accumulation of capital in a neo-colony: the Nigerian case', *Review of African Political Economy*, Vol. 13 (35), pp. 27 – 39. (1986).
- Husted, B. W. 'Wealth, Culture, and Corruption', *Journal of International Business Studies*, Vol. 30 (2), pp. 339-59. (1999)
- Johnston, M. (ed.), *Civil Society and Corruption: Mobilizing for Reform*, Lanham, MD: University Press of America, pp. 23-32. (2003)
- Kaufmann, D. (2003), *Rethinking Governance: Empirical Lessons Challenge Orthodoxy*, Washington D.C.: The World Bank.
- Kaufmann, D. (2005), 'Myths and Realities of Governance and Corruption', in *Global Competitiveness Report 2005-06* (2005): pp. 81-98 [Online accessed 04 November 2008, available at



[http://www.worldbank.org/wbi/governance/pdf/21\\_GCR\\_Kaufmann.pdf](http://www.worldbank.org/wbi/governance/pdf/21_GCR_Kaufmann.pdf)

- Pietrzyk, D.I., 'Democracy or Civil Society?' *Politics*, Vol. 23 (1), pp 38-45. (2003)
- Rothstein, B. and Uslaner, E.M. 'All for all: equality, corruption and social trust', *World Politics*, Vol. 58 (1), pp. 41-72. (2005)
- Scott, J.C., 'The Analysis of Corruption in Developing Nations', *Comparative Studies in Society and History*, Vol. 11 (3), pp. 315-41. (1969).
- Setyono, B., Adnan, M. Astrika, L. *Laporan Penelitian Perbandingan Gerakan Anti Korupsi Korea Selatan dan Indonesia*, FISIP UNDIP (2015)

## SENARAI

- akuntabilitas : pertanggungjawaban yang harus diberikan pejabat kepada rakyat atas anggaran, kewenangan dan kekuasaan yang diberikan kepada mereka
- CPI : *Corruption Perception Index*, survey tahunan yang dilakukan oleh organisasi Transparency International untuk mengetahui bagaimana persepsi orang pada umumnya terhadap prevelensi korupsi di suatu negara.
- elite capture* : Tindakan pemimpin masyarakat yang menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi

## BAB III POKOK BAHASAN DEMOKRATISASI DAN PEMBANGUNAN EKONOMI DI KOREA SELATAN

### 1. SUB POKOK BAHASAN:

Proses demokratisasi dan pembangunan ekonomi Korea Selatan sebagai pelajaran bagi Indonesia.

#### 1.1. PENDAHULUAN

##### 1.1.1. Deskripsi Singkat

Sub Pokok Bahasan ini mengantarkan mahasiswa menjelaskan proses perkembangan demokrasi dan pembangunan ekonomi di Korea Selatan. Didalamnya akan diterangkan peristiwa-peristiwa pokok yang signifikan terjadi dalam sejarah demokrasi dan pembangunan ekonomi di Korea Selatan, beserta dampak-dampak yang berhubungan dengan peristiwa tersebut.

##### 1.1.2. Relevansi

Mahasiswa Ilmu Pemerintahan perlu menjelaskan proses perkembangan demokrasi dan pembangunan ekonomi di Korea Selatan ini karena beberapa sebab: 1) sebagai pengetahuan awal untuk bisa memahami proses demokratisasi dan pembangunan ekonomi suatu negara, serta relevansinya dengan masalah korupsi; 2) bisa berpikir bahwa dalam proses demokratisasi dan pembangunan ekonomi suatu Negara masih banyak ditemukan kendala – kendala dan keterbatasan; 3) bisa menemukan pelajaran dari proses demokratisasi dan pembangunan ekonomi negara lain agar dapat diaplikasikan di Indonesia.



### 1.1.3 Kompetensi

#### a. Standar Kompetensi

Setelah mengikuti pokok bahasan ini selama dua pertemuan maka diharapkan mahasiswa akan dapat menjelaskan proses demokratisasi dan pembangunan ekonomi Korea Selatan dan akhirnya mampu memetik pelajaran bagi pembangunan Indonesia.

#### b. Kompetensi Dasar

1. Kemampuan menjelaskan proses demokratisasi Korea Selatan
2. Kemampuan menjelaskan pembangunan ekonomi Korea Selatan
3. Kemampuan menjelaskan kendala atau kesulitan yang dialami Korea Selatan

### 1.2. PENYAJIAN

#### 1.2.1. Uraian dan contoh

Korea Selatan pada saat ini merupakan negara yang memiliki kekuatan yang sangat berpengaruh dalam skala global. Pengaruh itu tumbuh seiring dengan munculnya perusahaan-perusahaan berteknologi tinggi di bidang elektronik dan otomotif raksasa seperti Samsung, LG dan Hyundai-KIA pada abad ke-21. Kemajuan Korea itu sering disejajarkan dengan prestasi kemajuan negara Jerman. Bila kemajuan Jerman digambarkan dengan istilah terkenal "Keajaiban di Sungai Rhine", yang merupakan periode kebangkitan Jerman (Barat) setelah Perang Dunia II, maka kemajuan Korea Selatan digambarkan dengan istilah "Keajaiban di Sungai Han".

Istilah tersebut merujuk pada periode pertumbuhan ekonomi yang sangat fantastis, industrialisasi, pencapaian teknologi tinggi, urbanisasi, pembangunan gedung gedung pencakar langit, modernisasi, investasi dan marketisasi produk berskala global dan tingginya kesejahteraan rakyat yang diraih Korea Selatan dari puing-puing Perang Dunia ke-2, Penjajahan Jepang, dan

Perang Korea. Periode ini dimulai dari Rencana Lima Tahun yang dicanangkan pada tahun 1962, hingga periode industrialisasi dan kebangkitan Korsel sampai detik ini. Sejak tahun 2000an, selain ekonomi yang didukung oleh para *Chaebol*, ekonomi Korea Selatan mendapat sumbangan triliunan dolar dari bisnis K-Pop, K-Drama dan wisata operasi plastik.

Meskipun prestasi besar telah diraih oleh negara ini, namun kondisi sejarah demokrasi Korea Selatan yang tidaklah mulus di masa awal. Sebaliknya kondisi yang sangat sulit karena konsepsi 'negara kuat' dan 'otoritarian' yang telah dibangun dalam sejarah modern Korea. Pertama-tama, pemikiran menciptakan negara yang kuat berasal dari pendirian negara antikomunis dengan kekuasaan yang hegemonik yang kuat yang didirikan pada pasca kolonialisme Jepang. Pada saat itu, Perang Dingin terjadi secara intensif segera setelah kemerdekaan nasional. Negara-negara bekas jajahan menjadi ajang rebutan pengaruh blok komunis dan blok Barat / Sekutu. Korea juga terlibat dan mengalami perang ideologis tersebut. Konflik politik antara kiri dan kanan selama periode pasca kemerdekaan kemudian menyeret Korea dalam perang saudara yang membelah negara tersebut dalam dua wilayah: Utara yang pro komunis; dan Selatan yang pro Sekutu/Amerika. Kejadian tersebut menciptakan sebuah kondisi di mana pemerintah antikomunis yang kuat dapat dengan mudah terbentuk di Korea Selatan. Selanjutnya, untuk membendung pengaruh komunisme, dan memastikan supremasi dalam perang melawan Korea Utara, rezim diktator militer Korea Selatan melakukan sentralisasi kekuasaan dan pemaksaan ekstrim dalam pelaksanaan pembangunan. Dengan dalih pembangunan negara, rezim militer melakukan mobilisasi ekonomi yang mengutamakan kalangan terbatas dalam rangka untuk mempromosikan percepatan pertumbuhan ekonomi. Setelah Perang Korea berakhir, kekuasaan otoriter di bawah rezim militer tetap bertahan selama jangka waktu yang panjang di Korea Selatan karena pemerintahan mereka menginginkan pengendalian dan pelaksanaan



pembangunan ekonomi yang terstruktur dalam perencanaan yang sentralistik.

Akan tetapi, pemerintahan otoriter tersebut menyebabkan munculnya pengunjuk rasa untuk bergabung dengan gerakan demokratisasi. Semakin otoriter pemerintahan, semakin kuat pula penyebaran gerakan demokratisasi itu. Selain itu, terjadi perubahan sosial yang masif diakibatkan oleh industrialisasi secara sukses dan menciptakan kelas menengah baru yang tidak puas. Mereka menuntut untuk berpartisipasi secara lebih luas, serta menginginkan distribusi kekayaan nasional yang lebih merata.

Sejarah kontemporer Korea dimulai dari pembagian wilayah Korea menjadi dua wilayah Korea Utara dan Korea Selatan setelah kemenangan Blok Sekutu di dalam Perang Dunia II, yang mengakhiri 35 tahun Penjajahan Jepang atas wilayah Korea. Pembagian tersebut diprakarsai oleh Amerika Serikat (AS) dan Uni Soviet melalui sebuah proposal yang sebenarnya ditolak oleh hampir seluruh bangsa Korea. Amerika Serikat dan Uni Soviet, dibawah perjanjian yang disponsori oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), pada saat itu setuju untuk sementara menduduki negara Korea sebagai "wilayah perwalian" dengan zona pengawasan yang didemarkasi pada area sepanjang 38 derajat lintang utara. Uni Soviet berkuasa di bagian utara sedangkan Amerika Serikat di bagian selatan. Perwalian ini bertujuan untuk mendirikan pemerintah sementara Korea yang akan menjadi "bebas dan merdeka pada waktunya" dalam jangka waktu lima tahun (Savada and Shaw 1990).

Walau demikian, dua negara super power tersebut nampaknya tetap ingin mempertahankan pengaruh mereka di wilayah Korea. Sehingga, meskipun proposal tersebut pada awalnya meniadakan adanya pelaksanaan pemilihan umum di seluruh Korea, mereka tidak pernah membiarkan proses itu terjadi, bahkan secara diam-diam justru mendukung dari belakang para pemimpin pro mereka masing-masing yang berseberangan satu sama lain. Pada akhirnya kesepakatan

pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan umum tidak pernah tercapai sehingga dua negara tersebut secara efektif didirikan, dimana masing-masing mengklaim kedaulatan atas seluruh Semenanjung Korea. Tanpa adanya titik temu, pada tanggal 15 Agustus 1948, Republik Korea (selatan) didirikan oleh kelompok nasionalis yang didukung Amerika Serikat dan mengangkat Syngman Rhee, aktifs kemerdekaan binaan Jenderal Amerika Douglas MacArthur dan mantan Ketua Pusat Komite Persiapan Kemerdekaan (The Independence Promotion Central Committee), sebagai presiden pertama Republik Korea (Korea Selatan). Pada perkembangan berikutnya sebulan kemudian, Korea Utara juga didirikan atas prakarsa Uni Soviet yang mengangkat Kim Il-Sung, pejuang gerilya binaan Uni Soviet, sebagai presiden Republik Demokratik Rakyat Korea (DPRK) pada bulan September 1948. Kedua negara kemudian terlibat dalam perang saudara berkepanjangan sampai dengan pada saat ini.

Dengan demikian, negara Korea Selatan secara resmi dimulai ketika pembentukan negara Republik pada 15 Agustus 1948, meskipun Syngman Rhee (yang kemudian menjadi Presiden pertama Korea Selatan) telah mendeklarasikan pembentukannya lebih awal di Seoul pada 13 Agustus 1948. Perjalanan sejarah Korea Selatan diwarnai oleh pemerintahan yang demokratis dan otoritis secara bergantian. Masa awal kemerdekaan diandai oleh terbentuknya pemerintahan sipil/republik pertama yang demokratis, tapi lama kelamaan menjadi otoritis hingga akhirnya jatuh pada tahun 1960.

Segera setelah menjabat, Rhee melaksanakan undang-undang yang sangat membatasi perbedaan pendapat politik. Banyak lawan politik (terutama yang berhaluan kiri) ditangkap, dan bahkan dalam beberapa kasus, mereka dibunuh. Kebijakan tersebut berpuncak pada peristiwa dimana pada tanggal 26 Juni 1949, rival politik Rhee yang paling serius, Kim Gu, dibunuh; pembunuhan tersebut digambarkan oleh sejarawan Inggris Max Hastings sebagai salah satu "karya" Rhee (Hastings 1988: 42). Pola ini segera menjadi tanda yang jelas bahwa



gaya pemerintahan Rhee telah menjelma menjadi otoriter. Dia mengizinkan pasukan keamanan internal (dipimpin oleh tangan kanan-nya, Kim Chang-ryong) untuk menahan dan menyiksa tersangka komunis dan agen-agen Korea Utara. Pemerintahannya juga menguasai beberapa pembantaian, termasuk penindasan Jeju Uprising di pulau Jeju, di mana Komisi Kebenaran Korea Selatan melaporkan adanya kematian 14.373 korban, 86% di tangan pasukan keamanan dan 13,9% di tangan pemberontak komunis (Hastings 1988: 43).

Kekejaman Rhee yang disertai perilaku korup, menyebabkan munculnya gerakan rakyat yang menuntut dia mundur. Gerakan dipicu adanya pembunuhan politik, walaupun ketidakpuasan ekonomi juga menjadi pemicu. Jatuhnya pemerintahan disebabkan karena demonstrasi besar-besaran oleh rakyat yang dipelopori mahasiswa pada tanggal 19 April 1960. Demonstrasi tersebut sebagai bentuk protes terhadap upaya presiden Syngman Rhee untuk mempertahankan kedudukan walaupun dia dianggap melakukan kecurangan dalam pemilu yang dilakukan pada 15 Maret 1960. Sebelumnya, Syngman telah dua kali memperpanjang masa kepemimpinannya melalui amandemen konstitusional pada tahun 1952 dan 1954. Karena persoalan tersebut, mahasiswa menuntut agar hasil pemilu tersebut dibatalkan. Pemerintah mengerahkan polisi yang mengakibatkan bentrokan keras dengan mahasiswa.

Gerakan mahasiswa ini didukung oleh masyarakat luas dan militer, sehingga tentara membangkang ketika diperintahkan oleh pemerintah untuk bergerak membantu polisi yang kewalahan untuk menghalangi gelombang demonstran yang hampir menguasai kantor kepresidenan. Dalam masa gejolak berikutnya pada bulan April, diperkirakan terdapat korban sebanyak 184 orang tewas dan lebih 6.000 orang terluka akibat tindakan represif polisi. Akibat huru-hara ini, Presiden Syngman dan kabinetnya bubar pada bulan April 1960. Demonstrasi ini menandakan gerakan demokratisasi dan hak asasi pertama dari rakyat Korea dalam sejarah Korea pasca kemerdekaan.

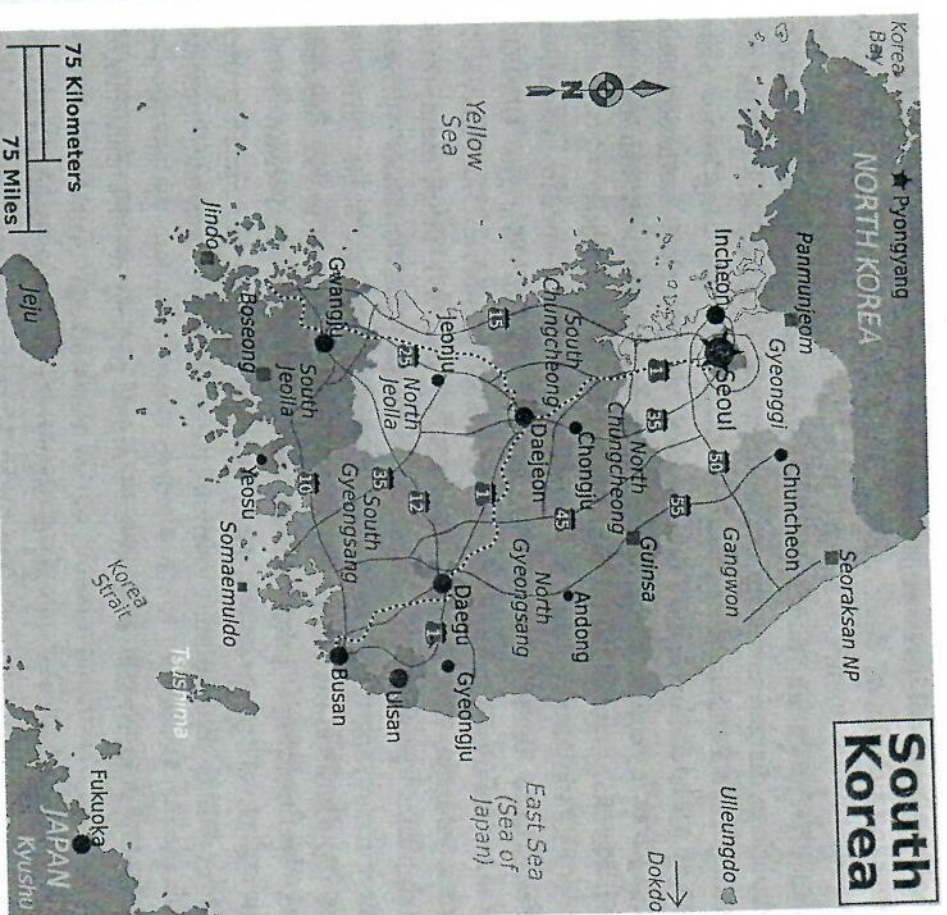
Pasca kerusuhan, dua badan legislatif baru dibuat dan membentuk Majelis Nasional yang kemudian mengamandemen konstitusi dan memilih Yun Po-sun sebagai presiden. Selanjutnya Presiden Yun menunjuk Chang Myon sebagai perdana menteri sehingga terbentuklah pemerintahan Republik Kedua pada bulan Juli 1960. Akan tetapi, pemerintahan yang baru dengan dukungan Partai Demokrat yang berkuasa tidak memiliki kemampuan untuk memerintah secara efektif. Kondisi perekonomian terus terpuruk, gejala politik terus terjadi dan tidak terkendali, sementara bayang-bayang pengaruh komunis juga mengancam Korea Selatan. Keadaan rakyat yang miskin menyebabkan komunisme berkembang dengan cepat. Tidak hanya itu, bentrokan militer dengan Korea Utara juga meningkat sehingga memperparah kemampuan pemerintahan dalam mengendalikan permasalahan-permasalahan dalam negeri. Pihak militer yang sebelumnya ikut mendorong gerakan mahasiswa menjadi sangat kecewa dan khawatir terhadap perkembangan yang terjadi.

Kekawatiran kelompok angkatan bersenjata terhadap ancaman Korea Utara, terutama, kemudian mendorong mereka di bawah komando Jendral Park Chung-Hee bergerak melakukan kudeta militer. Satu tahun setelah masa pemerintahan demokratis, tepatnya pada tanggal 16 Mei 1961, Park Chung-hee menyatakan berakhirnya kepemimpinan Presiden Yun dan membentuk pemerintahan junta militer untuk mengembalikan stabilitas sosial. Pemerintah mensponsori dua buah partai baru, yakni Partai Republik Demokrasi dan Partai Demokrasi Baru. Untuk mengejar pembangunan ekonomi, pemerintah membuat Rencana Pengembangan Ekonomi terpusat jangka panjang 25 tahun dan menengah berfase 5 Tahunan yang dimulai pada tahun 1962.

Pelaksanaan pembangunan nasional pada masa pemerintahan Park, akan tetapi, diwarnai oleh banyak pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Terjadi perampasan tanah rakyat oleh pemerintah untuk kepentingan proyek-proyek besar, sementara pers dibatasi dalam



melakukan pemberian. Banyak wartawan, tokoh oposisi, dan mahasiswa ditangkap, dipenjara, dan disiksa tanpa pengadilan yang fair ketika mereka mengkritik pemerintah. Disamping itu, konsepsi-konsepsi dan kebijakan ekonomi yang istimewa diberikan kepada pengusaha-pengusaha tertentu yang diproyeksikan untuk menjadi konglomerat (Chaebol). Hal ini menyebabkan perpecahan dikalangan warga Korea: pada satu sisi ada kelompok yang mendukung Park atas jasa memperkuat pertahanan dari agresi Korea Utara dan kemajuan pembangunan ekonomi, pada sisi lain ada orang-orang yang mengutuk cara otoriter yang dia praktekkan selama berkuasa. Generasi tua yang hidup selama pemerintahan Park cenderung memberikan penghargaan positif, sebaliknya generasi muda yang tidak mengalami masa krisis cenderung menyalahkan Park atas berbagai pelanggaran HAM. Pada masa kememimpinan Park, Korea menjadi terkenal sebagai kekuatan ekonomi baru di tingkat global, dan terdaftar sebagai salah satu dari sepuluh "Asia of the Century" yang dibuat oleh majalah Time pada tahun 1999. Akan tetapi, generasi baru dari Korea cenderung percaya bahwa pemerintahan otoriter tidak bisa dibenarkan, dan menjadi penghalang Korea Selatan menjadi negara demokrasi. Ia juga ditentang kelompok rekonsiliasi yang menghendaki adanya penyatuan kembali (reunifikasi) antara Korea Utara dan Selatan.



Sumber: [http://www.graphatlas.com/south\\_korea.php](http://www.graphatlas.com/south_korea.php)

Ketidakpuasan terhadap Presiden Park Chung-hee, mengakibatkan dia dibunuh pada tahun 1979 oleh Kim Jae-gyu, direktur KCIA (Korea Central Intelligent Agency). Selanjutnya, pemerintahan Korea beralih ke tangan Jendral Chun Doo-Hwan yang memimpin kudeta militer yang sukses dari pemerintah Korea Selatan sebelumnya. Chun kemudian membentuk Komite Kebijakan Pertahanan



Darurat Nasional dan mengambil alih jabatan presiden sesuai dengan rencana politiknya. Pada tanggal 17 Mei, Chun Doo-hwan memaksa Kabinet untuk memperluas darurat militer untuk seluruh bangsa, yang sebelumnya tidak diterapkan ke pulau Jeju-do. Darurat militer diperluas dengan menutup universitas, melarang kegiatan politik dan selanjutnya pengendalian pers dan LSM. Pada saat yang sama, akan tetapi, kepemimpinan Chun segera diikuti oleh ketidakpuasan masyarakat yang menginginkan pengurangan peran politik militer dan pelaksanaan transisi pemerintahan yang lebih demokratis.

Pada masa awal kepemimpinan Chun, pecah peristiwa Pergerakan Demokratisasi Mei yang terjadi di Gwangju. Gerakan Demokrasi Gwangju pada prinsipnya adalah pemberontakan rakyat di kota Gwangju, Korea Selatan dari 18-27 Mei 1980 untuk memprotes kebijakan pemerintah berkaitan dengan pelaksanaan proyek mencusuar yang dinilai merugikan kepentingan rakyat kecil. Peristiwa ini diperkirakan menelan korban sebanyak 606 orang tewas. Gerakan ini, sesungguhnya telah dimulai sebelum Chun Doo-hwan resmi menjabat sebagai presiden. Pada awalnya gerakan ini adalah protes yang damai anti militer, namun pada akhirnya berubah menjadi perlawanan bersenjata dimana warga Gwangju mengorganisir perang terhadap pemerintah (dengan merampok gudang senjata dan kantor polisi lokal). Tindakan tersebut dipicu oleh tindakan brutal pemerintah terhadap mahasiswa Jeonnam University - yang berdemonstrasi terhadap pemerintah Chun Doo-hwan. Mereka ditembaki, dibunuh, dan dipukuli dalam serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya oleh pasukan pemerintah. Mahasiswa, buruh dan rakyat biasa pada akhirnya melawan dengan kekerasan. Pemberontakan ini berakhir dengan kekalahan pada 27 Mei 1980. Pemerintah Chun Doo-hwan menganggap insiden sebagai pemberontakan yang terinspirasi oleh simpatisan komunis Korut. Akan tetapi, tidak ada bukti yang meyakinkan untuk mengkaitkan gerakan ini sebagai gerakan komunis, sehingga pada tahun 1997, sebuah monumen nasional didirikan di daerah tersebut,

dan tanggal 18 Mei ditetapkan sebagai hari peringatan nasional untuk mengembalikan kehormatan para korban. Pada tahun 2011, untuk mengenang Pemberontakan 18 Mei melawan Rezim Militer dibuat perpustakaan khusus yang terletak di balai kota Gwangju yang tertulis di Memory UNESCO World Register.

Pasca insiden Gwangju, Chun dan pemerintahnya memerintah Korea Selatan dengan menerapkan kekuasaan yang despotik sampai tahun 1987, ketika seorang mahasiswa Universitas Nasional Seoul, Park Jong-chul, disiksa sampai mati. Pada tanggal 10 Juni 1987, Asosiasi Imam Katolik untuk Keadilan mengungkapkan insiden itu, dan menyalakan Gerakan Demokrasi di seluruh negeri. Pada bulan Juni 1987, Chun menominasikan Roh Tae-woo sebagai calon presiden dari Partai Keadilan Demokrat yang berkuasa. Hal ini secara luas dianggap sebagai menyerahkan kursi presiden kepada Roh, dan memicu aksi unjuk rasa besar pro-demokrasi di Seoul dan kota-kota lain di bulan Juni tahun 1987. Akhirnya, pihak Chun, Partai Keadilan Demokrat, dan pemimpinnya, Roh Tae-Woo mengumumkan Deklarasi 6.29, yang berisi serangkaian kebijakan reformasi politik, termasuk akan diadakannya pemilihan presiden secara langsung. Roh memenangkan pemilu dengan margin yang sempit terhadap dua pemimpin oposisi utama, Kim Dae-Jung dan Kim Young-Sam. Roh adalah seorang jenderal militer ketika ia membantu Chun memimpin pasukan untuk menumpas Gerakan Demokratisasi Gwangju pada tahun 1980.

Pemerintahan Roh segera menjanjikan untuk meneruskan paket deklarasi 6.29 dan mengambil peran penting untuk menjadi tuan rumah Olimpiade Seoul pada tahun 1988. Dia juga dikenal untuk kebijakan luar negerinya yang disebut sebagai "Nordpolitik", (yang merupakan terobosan besar dari pemerintahan sebelumnya untuk melakukan reunifikasi dan mengakhiri konflik dengan Korea Utara). Sesuai dengan janjinya, Roh berkomitmen untuk melakukan reformasi demokratis. Dia juga bertemu dengan Presiden Corazon Aquino untuk



serangkaian pembicaraan antara Filipina dan Korea Selatan untuk meningkatkan hubungan ekonomi, sosial dan budaya. Pemerintahan Roh berakhir pada tahun 1992. Dalam suatu pemilu yang dinilai cukup demokratis, partainya (Partai Keadilan Demokrat) berkoalisi dengan partai yang sebelumnya menjadi oposisi, yakni Partai Perdanaian Demokrat dan mengusung Kim Young-sam.

Kim terpilih sebagai presiden sipil pertama pada tahun 1992, setelah pemerintahan militer lebih dari 30 tahun. Ia dilantik pada tanggal 25 Februari 1993, dan menjabat lima tahun tunggal, memimpin kampanye besar-besaran anti-korupsi, melakukan penangkapan dua presiden pendahulunya (Chun dan Roh), dan membuat kebijakan internasionalisasi yang disebut *Segyehwa*.

Pemerintahan Kim Young-sam berusaha untuk mereformasi pemerintah dan ekonomi. Kim juga memberikan amnesti kepada ribuan tahanan politik, dan menghilangkan tuntutan pidana terhadap para demonstran pro-demokrasi yang telah ditangkap selama pembantaian Gwangju. Selain itu, salah satu tindakan pertama pemerintah adalah memulai kampanye anti-korupsi, seperti dengan menuntut pejabat pemerintah dan militer untuk mempublikasikan catatan keuangan mereka, yang menyebabkan pengunduran diri beberapa perwira tinggi dan anggota kabinet. Dia memerintahkan Chun dan Roh ditangkap atas tuduhan korupsi dan pengkhianatan, memenangkan tuntutan pengadilan terhadap keduanya. Kampanye anti-korupsi yang dia luncurkan juga mencakup upaya untuk mereformasi dominasi para Chaebol, konglomerat besar Korea Selatan yang mendominasi perekonomian.

Sayangnya, tuduhan korupsi putra keduanya, menyebabkan hilangnya kepercayaan rakyat; partainya kehilangan mayoritas tipis di Majelis Nasional pada tahun 1996. Hilangnya kepercayaan rakyat juga berkait dengan terjadinya Krisis Moneter Asia yang menyeret Korea Selatan dalam posisi diambang kebangkrutan pada tahun 1997, yang menyebabkan perusahaan KIA Motors runtuh segera setelah itu, tepat

pada tahun terakhir masa kepresidenannya. (Presiden Korea Selatan dibatasi untuk jangka 5 tahun tunggal sesuai dengan Konstitusi tahun 1987 dari Republik Korea.)

Kim Young-sam digantikan oleh presiden sipil selanjutnya, yakni Kim Dae-jung. Dia bersekutu dengan Kim Jong-pil, mengalahkan Lee Hoi-chang, pengganti yang ditunjuk Kim Young-sam, dalam pemilihan yang diadakan pada tanggal 18 Desember 1997. Kim Dae-jung dilantik sebagai Presiden kedelapan Korea Selatan pada 25 Februari 1998, menandai pertama kalinya dalam sejarah Korea bahwa partai yang berkuasa mentransfer kekuasaan secara damai kepada oposisi yang terpilih secara demokratis. Pemilihan itu diwarnai dengan kontroversi, karena lawannya, Lee Hoi-chang, adalah mantan Hakim Agung dan dikenal sebagai lulusan terbaik dari Seoul National University School of Law. Lee secara luas dipandang sebagai elitis dan pencalonannya rusak lebih lanjut oleh tuduhan bahwa putranya menghindari wajib militer. Secara kontras, pendidikan Kim hanya terbatas pada sekolah menengah kejuruan, dan membuat banyak orang Korea bersimpati dengan banyaknya cobaan dan kesengsaraan yang Kim telah alami sebelumnya.

Kim Dae-jung adalah Presiden ke-8 dari Korea Selatan 1998-2003, dan pada tahun 2000 menjadi penerima Hadiah Nobel Perdamaian. Dia disebut "Nelson Mandela dari Asia" untuk peran rekonsiliasi setelah lama melakukan oposisi terhadap pemerintahan otoriter. Dia juga dikenal memiliki kebijakan bersahabat yang disebut sebagai kebijakan Sinar Matahari (*Sunshine policy*) terhadap Korea Utara. Kim menyerukan pengkembangan aksi militer terhadap Korea Utara untuk meredakan upaya pengembangan senjata nuklir dan terus membujuk Pyongyang untuk meredakan krisis. Dia berjanji semua warga Korea bahwa ia akan mengambil tanggungjawab aktif jika Korea Utara mencoba untuk mempersenjatai diri dengan senjata nuklir, walaupun pada akhirnya usaha tersebut gagal. Kim Dae-jung menjabat presiden di tengah-tengah krisis ekonomi yang melanda Korea Selatan



pada tahun terakhir dari pemerintahan Kim Young-sam. Dia penuh semangat mendorong reformasi ekonomi dan restrukturisasi yang direkomendasikan oleh Dana Moneter Internasional (IMF), dalam proses yang secara signifikan mengubah lanskap ekonomi Korea Selatan. Setelah perekonomian menyusut 5,8 persen pada tahun 1998, tumbuh kembali menjadi 10,2 persen pada tahun 1999. Pada dasarnya, kebijakan-kebijakannya adalah untuk membuat pasar lebih adil dengan memegang Chaebol (konglomerat) bertanggung jawab kepada publik, misalnya, dengan melakukan transparansi yang lebih besar dalam praktik akuntansi. Subsidi negara untuk perusahaan-perusahaan besar juga dikurangi secara dramatis. Selama kepresidenannya, dia memperkenalkan desain negara kesejahteraan kontemporer Korea Selatan, dan berhasil menggiring pemulihan ekonomi negara, membawa era baru transparansi ekonomi dan memupuk peran yang lebih besar untuk Korea Selatan di panggung dunia, termasuk kejayaan FIFA World Cup, yang diselenggarakan bersama dengan Jepang pada tahun 2002. Kim menyelesaikan jabatan presiden 5 tahun pada tahun 2003 dan digantikan oleh Roh Moo-hyun. Sebuah perpustakaan presiden di Universitas Yonsei dibangun untuk melestarikan warisan Kim, dan ada pusat konvensi bernama dia di kota Gwangju, yakni Kim Dae-jung Convention Center.

Presiden Korea selanjutnya adalah Roh Moo-hyun yang menjadi Presiden kesembilan Republik Korea (2003-2008). Karir politik Roh sebelumnya berfokus pada advokasi hak asasi manusia untuk aktivis mahasiswa di Korea Selatan. Karir politiknya kemudian diperluas untuk fokus pada mengatasi regionalisme dalam politik Korea Selatan, yang berpuncak pada pemilihan presiden. Dia mendapat banyak pengikut di kalangan pengguna internet muda, terutama melalui situs OhmyNews, yang membantu keberhasilannya dalam pemilihan presiden.

Terpilihnya Roh adalah momentum penting bagi munculnya generasi baru politisi Korea, yang disebut "generasi 386", (istilah ini mengacu pada orang-orang di usia tiga puluhan ketika istilah ini

diciptakan, yang menempuh pendidikan universitas di tahun 1980-an, dan yang lahir di 1960). Generasi ini telah menjadi veteran demo mahasiswa terhadap pemerintahan otoriter, enderung menganjurkan proses perdamaian terhadap Korea Utara, dan bahkan bersedia untuk mengorbankan hubungan baik dengan Amerika Serikat.

Roh memulai karir politik pada tahun 1988 ketika ia direkrut oleh Kim Young-sam untuk bergabung dengan Partai Reunifikasi Demokrat. Pada tahun yang sama, ia mencalonkan diri dan terpilih sebagai anggota Majelis Nasional, yang mewakili Dong-gu, Busan. Roh menjuluki pemerintahannya sebagai "Pemerintah Partisipatif," dan memperkenalkan agenda baru yang ambisius. Diantara kebijakan Roh termasuk kelanjutan *Sunshine policy*, dialog terhadap Korea Utara, menjadikan Korea sebagai pusat bisnis di Asia-Timur Laut, perluasan kesejahteraan sosial, mewujudkan pembangunan yang lebih merata dengan konsep "pembangunan nasional yang seimbang" untuk membantu daerah-daerah yang tertinggal, pemberantasan korupsi, reformasi pendidikan dan sistem pajak, penataan kembali (dengan kontrol dan pengurangan) supremasi kelompok chaebol, reformasi hubungan pekerja-manajemen, reformasi media massa, dan membangun kembali hubungan dengan Amerika Serikat dan Jepang.

Kebijakannya untuk memberantas korupsi di dalam pemerintah termasuk program reformasi administrasi birokrasi, menyebabkan ia harus menghadapi penentangan yang massif dari para pejabat politisi dan pejabat birokrasi senior, khususnya ketika melakukan reformasi kejaksaan. Instansi kejaksaan bersama tokoh-tokoh konservatif selalu mengolok-olok semua kebijakan presiden. Oleh karena itu, meskipun mendapatkan dukungan dan harapan publik yang tinggi di awal pemerintahannya, jabatan kepresidenannya mendapatkan oposisi yang kuat dari aparat penegak hukum, Partai Nasional yang konservatif dan media yang dimanfaatkan kelompok penentangannya. Mereka terus-menerus menuduhkan ketidakmampuan, dan kritik yang sering menghinia di media massa. Akibatnya, banyak kebijakan Roh, termasuk



rencana untuk memindahkan ibukota, dan rencana untuk membentuk koalisi dengan oposisi, juga diserang sehingga menyebabkan koalisi tersebut tidak efektif, kalau tidak dikatakan gagal total. Roh mengakhiri jabatan presiden pada tahun 2008. Pasca pensiun sebagai presiden, Roh menjalani hidup di kampung halamannya di Bongha Maeul.

Empat belas bulan kemudian, Roh dituduh menerima suap oleh jaksa, dan proses hukum selanjutnya sangat menyedot perhatian publik dan dunia internasional. Proses hukum ini menyebabkan runtuhnya "fraksi politisi Pro-Roh", dan berbuntut pada kekalahan penggantian dari Partai Reunifikasi Demokrat di Majelis Nasional, dan kekalahan penerus yang ditunjuk Roh dalam pemilihan presiden. Karena tekanan mental yang berat, Roh bunuh diri pada 23 Mei 2009 dengan melompat dari tebing gunung di belakang rumahnya yang bernama "Bueong-i Bawi" (Owl Rock), setelah meninggalkan catatan bunuh diri pada komputer pribadinya.

Roh digantikan oleh Lee Myung-bak yang menjadi Presiden ke-10 Korea Selatan (2008 - 2013). Sebelum terpilih sebagai presiden, Lee adalah CEO dari Hyundai Engineering and Construction, serta walikota Seoul dari 1 Juli 2002 - 30 Juni 2006. Lee adalah lulusan dari Universitas Korea dan menerima gelar kehormatan dari Paris Diderot University pada 13 Mei 2011.

Berbeda dengan Roh, Lee mengubah garis pendekatan pemerintah Korea ke Jepang menjadi lebih ke Korea Utara, tapi lebih dengan mempraktekkan strategi garis keras seiring meningkatnya provokasi dari Utara, meskipun ia mendukung dialog regional dengan Rusia, Cina dan Jepang. Di bawah Lee, Korea Selatan meningkatkan visibilitas dan pengaruh dalam kancah global, sehingga menjadi tuan rumah dari KTT G-20 Seoul tahun 2010. Namun, kontroversi yang signifikan terjadi mengenai inisiatif pemerintah yang dianggap terlalu elitis sehingga menyebabkan beberapa faksi terlibat dalam oposisi sipil dan protes terhadap pemerintah yang berkuasa. Bahkan Faksi reformis di dalam Partai Saenuri (partai presiden Lee) sangat menentang

terhadap Lee. Ia mengakhiri masa jabatan lima tahunnya pada tanggal 25 Februari 2013, dan digantikan oleh Park Geun-hye.

Park Geun-hye adalah Presiden kesebelas dan saat ini Korea Selatan. Dia adalah wanita pertama yang terpilih sebagai Presiden di Korea Selatan. Park juga adalah kepala perempuan pertama negara dalam sejarah modern di wilayah Northeastern Asia, dan presiden Korea Selatan pertama yang telah lahir sebagai seorang warga negara Korea Selatan. Sebelum presiden, dia adalah ketua Partai konservatif Grand National (GNP) antara tahun 2004 dan 2006 dan antara 2011 dan 2012 (GNP berubah nama menjadi "Saenuri Partai" pada bulan Februari 2012). Ayahnya adalah Park Chung-hee, yang merupakan Presiden Korea Selatan dari tahun 1962 ke 1979. Dia umumnya dianggap sebagai salah satu politisi paling berpengaruh di Korea Selatan sejak presiden Kim Young-sam dan Kim Dae-jung. Pada 2013 dan 2014, Park dinominasikan sebagai 11 wanita paling berpengaruh di dunia dan wanita paling kuat di Asia Timur dengan daftar majalah Forbes dari 100 Wanita Paling Kuat di Dunia.

Walaupun Park terkenal sebagai seorang liberalis, akan tetapi Sejak 2009, dia mulai lebih fokus pada isu-isu kesejahteraan, dan melakukan advokasi pelayanan kesejahteraan yang disesuaikan dengan kebutuhan rakyat Korea Selatan. Park terkenal ketat dan tanpa kompromi melaksanakan kepatuhan terhadap janji-janji politik. Pada tahun 2010 saat menjadi anggota Majelis Nasional, misalnya, ia berhasil berhenti upaya pemerintah Lee membatalkan rencana untuk membangun kota Sejong sebagai ibukota dan pusat pemerintahan yang baru, dengan alasan rencana itu adalah janji yang telah diberikan kepada rakyat.

Visi administrasi pemerintahan baru President Park Geun-hye adalah "era baru harapan dan kebahagiaan". Lima tujuan pemerintahnya adalah 1) penciptaan lapangan pekerjaan berpusat pada ekonomi kreatif, 2) penyesuaian pekerjaan dan kesejahteraan, 3) pendidikan berorientasi ekonomi kreatif dan pengayaan budaya, 4)



masyarakat yang aman dan bersatu dan 5) melakukan langkah-langkah keamanan yang kuat untuk perdamaian yang berkelanjutan di Semenanjung Korea. Pemerintahan Park Geun-hye bertekad untuk menciptakan pemerintahan yang dapat dipercaya, bersih, dan mampu melalui melaksanakan tujuan tersebut, dengan menerapkan strategi dan tugas yang terkait.

Dalam pidato pelantikan dirinya di Gedung Majelis Nasional, Park berbicara tentang rencananya untuk membuka era baru melalui "kemakmuran ekonomi, kebahagiaan masyarakat, dan pengayaan budaya". Dia sangat berharap bahwa Korea Utara akan menyerahkan senjata nuklirnya dan menempuh jalan perdamaian dan pembangunan bersama, dan menyatakan bahwa dasar untuk era bahgia adalah unifikasi di mana semua orang Korea akan dapat menikmati kemakmuran dan kebebasan dan mewujudkan impian mereka. Park juga berbicara bahwa dia akan membangun proses *trust-building* di Semenanjung Korea. Dalam pidato pelantikan, Park menyajikan empat prinsip panduan untuk mewujudkan visi administrasinya, yakni: kesejahteraan ekonomi, kebahagiaan rakyat, pengayaan budaya, dan pembentukan dasar untuk unifikasi damai.

### 1.2.2 Latihan

1. Mengapa Korea Selatan digambarkan dengan istilah "Keajaiban di Sungai Han"? Jelaskan!
2. Ceritakan sekilas tentang masa transisi kepemimpinan dalam sejarah kontemporer Korea!
3. Pada masa pemerintahan Presiden Roh Tae-Woo, Korea Selatan menerapkan kebijakan luar negeri yang disebut sebagai "Nordpolitik". Bagaimanakah kebijakan "Nordpolitik" tersebut? Jelaskan!

4. Presiden Roh Moo-Hyun menjuluki pemerintahannya sebagai "Pemerintahan Partisipatif", jelaskan beberapa kebijakan populer yang diterapkan pada masa pemerintahannya!
5. Sebutkan visi administrasi dan tujuan pemerintahan Presiden Park Geun-hye!

### 1.3. PENUTUP

#### 1.3.1. Tes Formatif

Pilihlah salah satu jawaban yang benar, dengan memberikan tanda silang!

1. Presiden Korea Selatan yang disebut sebagai "Nelson Mandela dari Asia" dan menerima Hadiah Nobel Perdamaian adalah:
  - A. Park Chung-hee
  - B. Roh Tae-woo
  - C. Kim Dae-jung
  - D. Park Geun-hye
2. Tujuan pemerintahan Presiden Park Geun-Hye salah satunya adalah:
  - A. Melakukan langkah-langkah keamanan yang kuat untuk perdamaian yang berkelanjutan di Semenanjung Korea.
  - B. Penciptaan lapangan pekerjaan berpusat pada sektor pertanian.
  - C. Masyarakat yang heterogen dan damai
  - D. Melakukan perluasan lapangan pekerjaan di seluruh pelosok negeri
3. Visi administrasi pemerintahan Park Geun-hye adalah:
  - A. Era kemerdekaan berserikat.
  - B. Era kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
  - C. Era pemerintahan yang berdaulat.
  - D. Era baru harapan dan kebahagiaan.



4. Istilah yang menggambarkan kemajuan Korea Selatan adalah:

- A. Keajaiban sungai Rhine
- B. Keajaiban sungai Han
- C. Keajaiban sungai YangTse
- D. Keajaiban Gunung Fuji

5. Kebijakan *Segyehwa* yang diterapkan pada pemerintahan Kim Young-sam bermakna:

- A. Kebijakan internasionalisasi Korea Selatan.
- B. Kebijakan privatisasi Korea Selatan.
- C. Kebijakan anti korupsi Korea Selatan.
- D. Kebijakan moneter Korea Selatan.

### 1.3.2 Umpan Balik

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1.

Tingkat penguasaan =  $\frac{\text{Jumlah jawaban yang benar}}{\text{Jumlah soal}} \times 100\%$

5

Arti tingkat penguasaan:

90 - 100%	: baik sekali
80 - 89%	: baik
70 - 79%	: cukup
< 70%	: kurang

### 1.3.3 Tindak lanjut

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar selanjutnya. Bagus! Jika

masih dibawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar ini, terutama bagian yang belum dikuasai.

### 1.3.4 Rangkuman

Kemajuan Korea Selatan digambarkan dengan istilah "Keajaiban di Sungai Han". Istilah tersebut merujuk pada periode pertumbuhan ekonomi yang sangat fantastis, industrialisasi, pencapaian teknologi tinggi, urbanisasi, pembangunan gedung-gedung pencakar langit, modernisasi, investasi dan marketisasi produk berskala global dan tingginya kesejahteraan rakyat yang diraih Korea Selatan dari puing-puing Perang Dunia ke-2, Penjajahan Jepang, dan Perang Korea. Periode ini dimulai dari Rencana Lima Tahun yang dicanangkan pada tahun 1962, hingga periode industrialisasi dan kebangkitan Korsel sampai detik ini. Sejak tahun 2000an, selain ekonomi yang didukung oleh para Chaebol, ekonomi Korea Selatan mendapat sumbangan triliunan dolar dari bisnis K-pop, K-drama dan wisata operasi plastik.

Sebagaimana terjadi di negara-negara lain, tuntutan demokrasi di Korea berkait erat dengan tumbuhnya kelas menengah terpelajar yang tidak puas dengan sistem politik dan kinerja pemerintah. Kelas menengah ini tentu saja tumbuh dari usaha pembangunan ekonomi yang digalakkan oleh pemerintah. Sebaliknya, pembangunan ekonomi senantiasa dipengaruhi oleh kondisi sosial politik. Dinamika politik Korea Selatan berputar dalam seken yang kadang bententangan dari satu masa ke masa yang lain. Korea Selatan pernah memiliki pemerintahan yang menerapkan pendekatan demokratis, lalu despotik-otoritarian, dan kemudian demokratis kembali sejak negara itu merdeka dari penjajahan Jepang.



### 1.3.5 Kunci Jawaban tes formatif

Nomor 1 jawaban C, Kim Dae-jung

Nomor 2 jawaban A, Melakukan langkah-langkah keamanan yang kuat untuk perdamaian yang berkelanjutan di Semenanjung Korea

Nomor 3 jawaban D, Era baru harapan dan kebahagiaan

Nomor 4 jawaban B, Keajaiban Sungai Han

Nomor 5 jawaban A, Kebijakan Internasionalisasi Korea Selatan

### DAFTAR PUSTAKA

- Hastings, Max. *The Korean War*, New York: Simon & Schuster (1988)
- Jip, Choi Jang. *Structure Change of Contemporary South Korean Politics*, Seoul: Ggachi (1989)
- Jip, Choi Jang. *Theory of South Korean Democracy*, Seoul: Hangil (1993)
- Savada, A.M and Shaw W. (editor). *South Korea: A Country Study*, Washington: GPO for the Library of Congress. (1990)
- Setiyono, B., Adnan, M. dan Astrika, L. Laporan Penelitian Perbandingan Gerakan Anti-Korupsi Korea Selatan dan Indonesia (2015)

### SENARAI

- Chaebol* : istilah Korea untuk menyebut kelompok pemodal besar yang memiliki kegiatan usaha raksasa
- diktaktor : penguasa yang memerintah secara mutlak, tidak memberikan ruang kritik bagi rakyat, dan biasanya menggunakan kekerasan dan senjata untuk mempertahankan kekuasaan

- investasi : penanaman modal pada satu kegiatan ekonomi untuk memperoleh keuntungan
- otoritarian : pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan secara otoriter, tidak mentoleransi adanya oposisi
- Sunshine policy* : kebijakan yang cenderung kepada perwujudan perdamaian antara Korea Selatan dan Korea Utara
- urbanisasi : perpindahan penduduk dari desa ke kota, biasanya dengan motif untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik



## 2. SUB POKOK BAHASAN: Pembangunan Ekonomi Korea

### 2.1. PENDAHULUAN

#### 2.1.1 Deskripsi Singkat

Sub bahasan pokok ini mengantarkan mahasiswa untuk menjelaskan pembangunan ekonomi yang terjadi di Korea Selatan sejak kemerdekaan negara tersebut hingga sekarang. Tidak jauh berbeda dengan sejarah Indonesia, Korea Selatan adalah negara yang lama dijajah negara lain dan baru terbebas dari penjajahan Jepang pada tahun 1945. Akan tetapi, selama periode yang singkat Korea Selatan mampu mencapai modernisasi yang jauh lebih mengesankan dibandingkan negara-negara lain di dunia. Hasil modernisasi yang terkompresi tersebut sangat bermanfaat sebagai sumber pembelajaran bagi negara-negara dunia ketiga lainnya yang hingga kini masih mengalami keterpurukan ekonomi.

#### 2.1.2 Relevansi

Mahasiswa Ilmu Pemerintahan perlu menjelaskan pembangunan ekonomi Korea Selatan karena beberapa sebab: 1) sebagai pengetahuan awal untuk bisa memahami pergolakan ekonomi yang terjadi di Korea Selatan dari awal kemerdekaan hingga kini; 2) bisa menjelaskan langkah-langkah strategis yang ditempuh pemerintah Korea Selatan dalam mewujudkan kemandirian ekonomi secara cepat; dan 3) bisa mengambil pelajaran tentang kesuksesan ekonomi Korea Selatan bagi Indonesia yang sama-sama merdeka di tahun 1945.

#### 2.1.3 Kompetensi

##### a. Standar Kompetensi

Setelah mengikuti pokok bahasan ini selama satu pertemuan, maka diharapkan mahasiswa dapat menjelaskan pembangunan ekonomi yang terjadi di Korea Selatan sejak awal

kemerdekaan hingga kini, mampu memetik pelajaran dari upaya-upaya Korea Selatan dalam mencapai kemandirian ekonomi untuk kemudian bisa dijadikan pelajaran bagi Indonesia.

##### b. Kompetensi Dasar

1. Kemampuan menjelaskan pergolakan ekonomi Korea Selatan pasca kemerdekaan sampai sekarang.
2. Kemampuan menjelaskan upaya-upaya strategis Korea Selatan untuk mencapai kemandirian ekonomi.
3. Kemampuan menjelaskan perbandingan pembangunan ekonomi yang terjadi di Korea Selatan dengan Indonesia.

### 2.2. PENYAJIAN

#### 2.2.1. Uraian dan contoh

Sejarah kontemporer Korea Selatan meliputi periode yang tidak jauh berbeda dengan sejarah Indonesia, mulai dari kemerdekaan negara tersebut dari penjajahan Jepang pada tahun 1945 sampai dengan sekarang. Selama periode agak pendek tersebut, akan tetapi, Korea Selatan telah mencapai proses modernisasi yang jauh lebih mengesankan dibanding dengan negara lain. Mereka telah dapat meletakkan landasan penting -seperti industrialisasi yang pesat dan konsolidasi demokrasi yang cukup maju. Banyak ahli menyatakan bahwa Korea Selatan mampu melakukan lompatan katak mengingat prestasi itu dicapai dalam periode yang terkompresi dalam waktu singkat. Hasil modernisasi terkompresi seperti itu sangat bermanfaat sebagai sumber pembelajaran, mengingat di antara banyak negara Dunia Ketiga yang tertambat memulai modernisasi, Korea Selatan adalah contoh langka yang sukses. Hari ini Korea Selatan berkembang lebih berhasil dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat dan pemerintahan yang lebih bersih daripada di negara Dunia Ketiga lainnya.



**Tabel 2.1. Data Ekonomi Korea Selatan dalam tiga tahun terakhir**

	2014	2015	2016*
Population (million)	50.4	50.6*	50.8
GDP (US\$ billion)	1,410	1,393*	1,450
Real GDP growth (%)	3.3	2.6*	3.1
GDP per capita (US\$)	27,970	27,513*	28,524
Inflation (%)	0.8	0.7	1.4
Unemployment (%)	3.5	3.6	3.5
Exports (US\$ billion)	572.7	526.9	544.0
Export (% change)	+2.3	-8.0	+3.2
Imports (US\$ billion)	525.5	436.5	461.0
Import (% change)	+1.9	-17.0	+5.6
Exchange Rate (US\$ 1 = Won)	1,099.3	1,156.7*	1,210.0

Sumber: dikompilasi dari IMF dan Bank of South Korea

Kata "keajaiban" sering dipakai untuk menggambarkan pencapaian pesat Korea Selatan menjadi negara ekonomi terbesar ke-13 dunia dan menjadi rujukan bagi negara-negara berkembang yang lain. Sebuah prestasi yang dianggap banyak orang sebagai "sangat mustahil" mengingat Korea Selatan adalah negara yang tercabik-cabik Perang Saudara yang mengerikan. Sampai dengan tahun 1960an, akibat penjajahan dan perang saudara, jutaan warga negaranya hidup dalam kemiskinan serta ratusan ribu penganggur berjuang keras memenuhi keperluan hidup sehari-hari. Akan tetapi, hanya dalam waktu kurang dari 4 dekade, negara miskin ini bergerak secara mencengangkan dan berubah menjadi salah satu pusat ekonomi dunia. Ibukota Seoul dan kota-kota lainnya segera berubah menjadi kota utama dan pusat bisnis dan perdagangan di Asia serta mempunyai infrastruktur modern.

**Tabel 2.2. Bantuan Ekonomi AS ke Korea Selatan tahun 1950an (US\$ million)**

Tahun	GNP (A)	Bantuan AS (B)	B/A (%)
1953	1,361	194	14.3
1954	1,467	154	10.5
1955	1,414	237	16.8
1956	1,459	327	22.4
1957	1,672	383	22.9
1958	1,897	321	16.9
1959	1,980	222	11.2
1960	1,996	245	12.3

Sumber: diadopsi dari Shin (2003: 48).

Pada tahun 1960 Korea Selatan adalah salah satu termiskin dari 25 negara paling miskin di dunia. Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita mereka hanya \$ 82 (harga tahun 1960). Pemulihan ekonomi selama periode 1953-1961 sangat lambat dan sangat bergantung pada bantuan keuangan AS. Pemulihan didasarkan pada kebijakan pembangunan substitusi impor, tetapi kebijakan ini diakui telah gagal pada awal tahun 1960.

Kondisi pasar tenaga kerja pada saat itu juga tidak menguntungkan bagi pekerja. Dalam situasi kelimpahan tenaga kerja, yang disebabkan oleh masuknya imigran pedesaan ke kota-kota serta kekurangan pekerjaan, menyebabkan banyak pekerja berharga upah murah dan menganggur. Gerakan buruh yang lemah juga berarti bahwa pekerja hanya memiliki sedikit pengaruh terhadap pembentukan kebijakan negara. Pekerja hampir tidak dalam posisi di mana mereka bisa meningkatkan agenda kebijakan dalam rangka mewujudkan kepentingan mereka pada waktu itu (Shin 2003: 54).



Para petinggi Amerika Serikat (AS) pada saat itu menggambarkan Korea sebagai "kasus tanpa harapan" (*hopeless case*) atau "negara yang tak dapat ditolong" (Hart-Landsberg 1993). Namun, kinerja perekonomian Korea selama empat dekade berikutnya atau lebih menunjukkan hasil yang jauh lebih progresif dari yang diperkirakan oleh para pembuat kebijakan seperti pada tahun 1960. Setelah hampir empat dekade pertumbuhan yang cepat, pada tahun 1997 PDB per kapita Korea mencapai sekitar \$ 11.000 (harga tahun 1997). Pada saat sekarang PDB per kapita mereka diperkirakan mencapai angka \$ 23.892 (harga tahun 2015). Korea sekarang anggota dari Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) dan salah satu dari sedikit negara yang tampaknya telah berhasil lulus dari Dunia Ketiga. Sebagai hasil dari kinerja yang luar biasa ini banyak literatur mendokumentasikan perkembangan ekonomi politik Korea Selatan selama periode ini.

Berbeda dengan pemerintah sebelumnya, yang menampilkkan kurangnya inisiatif politik terhadap pembangunan ekonomi, junta militer mulai campur tangan dalam proses pembangunan dengan Rencana Pembangunan Ekonomi Pertama Lima Tahun. Rencana termasuk setidaknya dua aspek perencanaan ekonomi: pertama, pembentukan target pertumbuhan terhadap kinerja ekonomi makro, investasi, struktur industri dan neraca perdagangan; kedua, kesediaan pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dengan instrumen kebijakan termasuk kebijakan industri, kebijakan perdagangan dan kebijakan makro-ekonomi (SJ Kim, 1991: 338-45; Jones dan Sakong, 1980: 38-9). Di titik-titik ini, pembangunan ekonomi Korea dapat dipahami sebagai proses realisasi perencanaan yang rasional oleh negara.

Sejak dicanangkan pada tahun 1962, rencana pembangunan ekonomi tersebut dilaksanakan dengan meminjam dana dari luar negeri. Untuk melaksanakan ambisi ini, Korea Selatan memulainya dengan memproduksi barang ekspor yang diproduksi dengan mesin

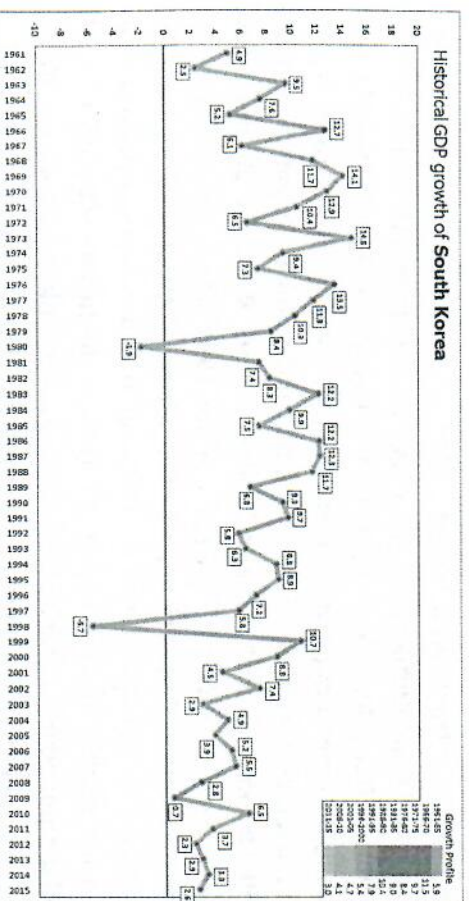
dan bahan impor. Selain itu, investasi asing dipermudah dengan membuat berbagai kebijakan pro-investasi dan membangun berbagai sarana dan infrastruktur industri. Korea juga mengirim putra-putrinya ke negara maju untuk belajar dan magang di berbagai perusahaan. Pada tahun 1970an, dengan tenaga kerja yang sangat terampil, Korea Selatan mulai bisa membuat produk tiruan yang menyaingi produk dari negara maju. Kapasitas ekonomi negara ini bertambah maju dengan menguasai industri kimia berat. Ekspor produk-produk kimia berat meningkat pesat pada periode ini. dan pada tahun 1962 penekanan bergeser ke pengembangan industri berorientasi ekspor. Investasi yang besar di negara itu dalam pendidikan swasta dan publik selama periode setelah perang telah memberikan tenaga kerja well-educated dan ini menjadi tulang punggung industri baru. Titik awal untuk industrialisasi Korea Selatan adalah pada kegiatan berorientasi ekspor, bagaimanapun telah menjadi pilihan yang tepat, karena dengan PDB per kapita hanya US \$ 87 mereka, jauh lebih kompetitif daripada kebanyakan negara-negara tetangga.

Rencana pembangunan lima tahunan tahap pertama (1962-1966) terbukti menjadi katalis untuk transformasi yang luar biasa dari perekonomian, yang memungkinkan Korea untuk mencapai status negara baru industrialisasi (*new industrialised country*--NIC) pada tahun 1970. Hal ini terus disertai dengan pertumbuhan yang cepat selama tahun 1970an meskipun pada periode ini terdapat dua krisis minyak. Korea masuk sebagai kelompok negara berkembang maju, yang terdiri dari Malaysia, Hong Kong, Singapura dan Taiwan.

Dalam era Rencana Lima Tahun ke-2 yang berlangsung 1967-1971, kegiatan diprioritaskan modernisasi struktur industri dan promosi ekonomi mandiri. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, penekanan dari Rencana Lima Tahun Kedua adalah pada promosi ekspor lebih lanjut dan pengembangan industri berat dan kimia termasuk baja, mesin dan petrokimia (Shin 2003: 56).



**Tabel 3.1. Sejarah Pertumbuhan Ekonomi Korea Selatan**



Sumber: [www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org)

Negara memperkenalkan serangkaian undang-undang untuk mendukung industri ini. Termasuk dalam paket ini diantaranya adalah: Undang-undang Pengembangan Industri Teknik (1967), Undang-Undang untuk Pembangunan Gedung Industri Kapal (1967), Undang-Undang Promosi Industri Tekstil (1967), Undang-Undang Pengembangan Industri Elektronik (1969), Undang-Undang Pengembangan Industri Petrokimia (1970), Undang-Undang Pengembangan Industri Baja (1970), dan UU untuk Pengembangan Non-Logam Pemurnian Industri (1971). Selama periode Rencana Kedua ini, perekonomian Korea mampu mewujudkan tingkat pertumbuhan GNP tinggi sebesar 11,4 persen, yang jauh lebih tinggi dari tingkat yang direncanakan dari 7,0 persen. Selain itu terdapat peningkatan besar dalam ekspor mencatat pertumbuhan rata-rata tahunan 39,5 persen.

Pada pertengahan 1980-an ekonomi Korea memasuki fase baru dengan timbulnya apa yang disebut 'tiga terendah' - harga minyak rendah, dolar AS lebih rendah dan suku bunga rendah. Untuk pertama

kalinya dalam sejarah ekonomi Korea, tabungan domestik mulai konsisten melebihi investasi, dengan tingkat tabungan meningkat menjadi lebih dari 30 persen dari PDB dan neraca pembayaran internasional berbalik dari defisit kronis menjadi surplus. Akibatnya Korea mampu dengan cepat untuk mengurangi utang luar negeri, yang telah mencapai puncaknya pada \$ 46,7 milyar pada tahun 1985. Korea tidak perlu lagi khawatir tentang utang luar negeri dan tidak perlu mengandalkan bantuan ekonomi dari negara-negara maju, dan pada tahun 1980-an mereka mencanangkan kemandirian ekonomi. Sebuah frase yang menggambarkan situasi ini adalah 'Keajaiban di Sungai Han' yang singkatnya merepresentasi lompatan capaian pembangunan ekonomi yang luar biasa. Dalam satu generasi bangsa yang tadinya miskin ini, yang terutama terdiri dari petani dan subсистemnya di tahun 1950 dan awal 1960-an, telah menjelma menjadi produsen terbesar di dunia bagi peralatan rumah, produsen terbesar kedua semikonduktor, pembuat kapal terbesar kedua, pembuat mobil terbesar kelima, ekonomi ketigabelas besar dan kedua belas negara perdagangan terbesar. Pertumbuhan ekonomi yang cepat dan tingkat pengangguran yang rendah, didorong oleh tabungan yang tinggi dan pertumbuhan investasi dan ekspor, telah menjadi norma baru bagi negara Korea.

Singkat kata, selama periode 1962-1989, kondisi ekonomi Korea ditandai oleh pertumbuhan yang tinggi, serta perdagangan yang cepat dan berkelanjutan, Produk Domestik Bruto (PDB) berkembang dari \$ 2,3 milyar menjadi \$ 220,7 milyar, dan nilai ekspor meningkat dari \$ 55 juta menjadi \$ 61,4 juta (Harvie and Lee 2003: 9).

Pada era 1990an, kemajuan Korea memasuki fase yang lain. Setelah era pertumbuhan ekonomi yang tinggi, Korea juga berusaha melakukan proses redistribusi kekayaan yang mengesankan melalui berbagai macam kebijakan kesejahteraan sosial (*social welfare*). Melalui kebijakan tersebut, sementara pada tahun 1996 pendapatan per kapita sudah melebihi \$ 10.000 dan relatif merata, kualitas dan standar hidup orang Korea biasa juga meningkat secara dramatis. Pencapaian Korea



masuk dalam keanggotaan OECD pada Desember 1996 mencerminkan 35 tahun pertumbuhan yang luar biasa dan menandai ekonomi datang usia. Bagi banyak negara berkembang, model pembangunan ekonomi Korea - kapitalisme yang dikendalikan negara- muncul sebagai kerangka yang layak dicontoh untuk program pembangunan mereka sendiri.

Dalam krisis keuangan Asia tahun 1997, perekonomian Korea Selatan mengalami krisis likuiditas dan mengandalkan bailout oleh IMF yang merestrukturisasi dan memodernisasi ekonomi Korea Selatan dengan kebijakan "D'nomics" oleh Presiden Kim Dae Jung, termasuk perubahan strategi pembangunan nasional tentang industri ICT. Meskipun potensi pertumbuhan perekonomian yang tinggi dan stabilitas struktural jelas, Korea Selatan selalu mengalami kerusakan abadi untuk peringkat kredit di pasar saham, karena ancaman agresi Utara Korea di saat krisis militer yang mendalam, yang memiliki efek buruk pada pasar keuangan perekonomian Korea Selatan. Namun, organisasi keuangan ternama, seperti Dana Moneter Internasional, memberikan pujian terhadap ketahanan ekonomi Korea Selatan dalam menghadapi berbagai krisis ekonomi, mempertahankan utang negara yang rendah, dan cadangan fiskal tinggi yang dapat dengan cepat dimobilisasi untuk mengatasi setiap keadaan darurat keuangan yang tidak diharapkan. Organisasi keuangan lain seperti Bank Dunia menggambarkan Korea sebagai salah satu negara besar yang tumbuh paling cepat dari generasi berikutnya bersama dengan BRIC (Brasil Rusia, India, dan China) dan Indonesia. Korea Selatan adalah salah satu negara maju dari beberapa yang mampu menghindari resesi selama krisis keuangan global, dan mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi yang diatas 6,1% pada sepuluh tahun terakhir. Perekonomian Korea Selatan bahkan pulih dengan rekor surplus US \$ 70.700.000.000 pada transaksi berjalan pada akhir 2013, naik dengan pertumbuhan 47 % dari tahun 2012, di tengah ketidakpastian dari gejolak ekonomi global, dengan output ekonomi utama adalah ekspor produk teknologi.

## 2.2.2 Latihan

1. Apa sajaakah yang menjadi titik berat penekanan Korea Selatan dalam tahap-tahap rencana pembangunan lima tahunannya?
2. Jelaskan dua aspek perencanaan ekonomi Korea Selatan dalam Rencana Pembangunan Ekonomi Lima Tahun Pertama!
3. Jelaskan upaya-upaya yang dilakukan Korea Selatan dalam pelaksanaan rencana pembangunan ekonomi!
4. Sebutkan produk undang-undang yang dikeluarkan pada Rencana Pembangunan Lima Tahun Kedua sebagai bentuk dukungan terhadap kemajuan sektor industri!
5. Indonesia dan Korea Selatan sama-sama terbebas dari penjajahan Jepang pada tahun 1945, akan tetapi Korea Selatan mampu mencapai kemadiriian ekonomi pada tahun 1980-an. Bagaimanakah dengan Indonesia?

## 2.3. PENUTUP

### 2.3.1. Tes Formatif

Pilihlah salah satu jawaban yang benar, dengan memberikan tanda silang!

1. Salah satu aspek perencanaan ekonomi dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun Pertama Korea Selatan adalah:
  - A. Pembentukan target pertumbuhan terhadap kinerja ekonomi makro, investasi, struktur industri dan neraca perdagangan.
  - B. Kesiediaan pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dengan otoritar kekuasaan negara.
  - C. Perluasan lapangan pekerjaan bagi industri kreatif yang menopang perekonomian dalam negeri.
  - D. Realisasi perencanaan rasional yang dilakukan oleh negara.
2. Titik awal industrialisasi Korea Selatan adalah:
  - A. Penguatan ekonomi makro.
  - B. Iklim investasi yang kondusif.



- C. Peningkatan neraca perdagangan.
- D. Kegiatan berorientasi ekspor.

3. Penekanan dari Rencana Lima Tahun Kedua adalah:

- A. Penambahan jumlah tenaga kerja terampil.
- B. Promosi ekspor lebih lanjut dan pengembangan industri berat dan kimia.
- C. Pengaturan regulasi pengembangan industri.
- D. Pengembangan sektor industri pertambangan.

4. Pada pertengahan 1980-an ekonomi Korea Selatan memasuki fase "Tiga Terendah", yaitu:

- A. Pengangguran rendah, suku bunga rendah, dollar AS lebih rendah.
- B. Suku bunga rendah, permintaan rendah, harga minyak rendah.
- C. Harga minyak rendah, dollar AS lebih rendah, suku bunga rendah.
- D. Dollar AS lebih rendah, penawaran barang lebih rendah, pengangguran rendah.

5. Kebijakan "Djnomics" oleh Presiden Kom Dae Jung bermaksud untuk:

- A. Mengubah strategi pembangunan nasional tentang industri ICT.
- B. Mengembangkan perekonomian Korea Selatan ke luar negeri.
- C. Merestrukturisasi kebijakan perekonomian Korea Selatan.
- D. Memodernisasi pengembangan teknologi ICT.

## 2.3.2 Umpan Balik

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar ini.

Tingkat penguasaan =  $\frac{\text{Jumlah jawaban yang benar}}{\text{Jumlah soal}} \times 100\%$

5

Arti tingkat penguasaan:

90 - 100%	: baik sekali
80 - 89%	: baik
70 - 79%	: cukup
< 70%	: kurang

## 2.3.3 Tindak lanjut

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar selanjutnya. Bagus! Jika masih dibawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar ini, terutama bagian yang belum dikuasai.

## 2.3.4 Rangkuman

Sejarah kontemporer Korea Selatan meliputi periode yang tidak jauh berbeda dengan sejarah Indonesia, mulai dari kemerdekaan negara tersebut dari penjajahan Jepang pada tahun 1945 sampai dengan sekarang. Selama periode agak pendek tersebut, akan tetapi, Korea Selatan telah mencapai proses modernisasi yang jauh lebih mengesankan dibanding dengan negara lain. Mereka telah dapat meletakkan landasan penting -seperti industrialisasi yang pesat dan konsolidasi demokrasi yang cukup maju.

Selama periode 1962-1989, kondisi ekonomi Korea ditandai oleh pertumbuhan yang tinggi, serta perdagangan yang cepat dan berkelanjutan. Korea Selatan adalah salah satu negara maju dari beberapa yang mampu menghindari resesi selama krisis keuangan global, dan mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi yang diatas 6,1% pada sepuluh tahun terakhir. Perekonomian Korea Selatan bahkan pulih dengan rekor surplus naik dengan pertumbuhan 47 %



dari tahun 2012, di tengah ketidakpastian dari gejolak ekonomi global, dengan output ekonomi utama adalah ekspor produk teknologi.

### 2.3.5 Kunci Jawaban tes formatif

Nomor 1 jawaban A, Pembentukan target pertumbuhan terhadap kinerja ekonomi makro, investasi, struktur industri dan neraca perdagangan.

Nomor 2 jawaban D, Kegiatan berorientasi ekspor.

Nomor 3 jawaban B, Promosi ekspor lebih lanjut dan pengembangan industri berat dan kimia.

Nomor 4 jawaban C, Harga minyak rendah, dollar AS lebih rendah, suku bunga rendah.

Nomor 5 jawaban A, Mengubah strategi pembangunan nasional tentang industri ICT.

### DAFTAR PUSTAKA

- Anderson C.J. and Y.V. Tverdova. 'Corruption and Political Allegiances, and Attitudes Towards Government in Contemporary Democracies', *American Journal of Political Science*, 47 (1), 91-109. (2003)
- Berendsen, B., Ton Dietz, Henk Schulte Nordholt and Roel van der Veen (eds). *Asian Tigers, African Lions: Comparing the Development Performance of Southeast Asia and Africa*. Leiden: Brill, (2013)
- Harvie C. And Hyun-Hoon Lee. 'Export-led industrialisation and growth: Korea's economic miracle, 1962-1989' *Australian Economic History Review* 43 (3), 256-286. (2003)
- Hope, K.R. Sr., and B. Chikulo (eds.) *Corruption and development in Africa*, London: Palgrave. (2000)
- Jain, A.K. 'Corruption: A Review' *Journal of Economic Surveys*, 15 (1), pp. 71-121. (2001)

- Jip, Choi Jang. *Structure Change of Contemporary South Korean Politics*, Seoul: Ggachi (1989)
- Jip, Choi Jang, *Theory of South Korean Democracy*, Seoul: Hangil. (1993)
- Joo, Sungsoo, Seonmi Lee, Youngjae, Jo. *The Explosion of CSOs and Citizen Participation: An Assessment of Civil Society in South Korea*, Seoul: Hanyang University. (2006)
- Linz, J. J. and A. Stepan. *Problems of Democratic Transition and Consolidation: Southern Europe, South America, and Post-Communist Europe*. Baltimore: Johns Hopkins University Press. (1996)
- Moran, J. Patterns of corruption and development in East Asia, *Third World Quarterly*, 20 (3), 569-87. (1999)
- Moran, J. Democratic transitions and forms of corruption, *Crime, Law and Social Change*, 36 (4), 379-93. (2001)
- Setyono, B., Adnan, M. Dan Astrika, L. Laporan Penelitian Perbandingan Gerakan Anti-Korupsi Korea Selatan dan Indonesia (2015)

### SENARAI

- BRIC : istilah yang dipakai untuk menunjuk negara industri baru, singkatan dari Brazil, Rusia, India, dan China
- Djnomics : strategi kebijakan pembangunan ekonomi yang disusun oleh Presiden Kim Dae Jung



## **BAB IV**

### **POKOK BAHASAN**

# **EVOLUSI PROBLEMATIKA KORUPSI DI KOREA SELATAN DAN FAKTOR PENYEBABNYA**

## **1. SUB POKOK BAHASAN:** **Korupsi di Korea Sebelum, dan Setelah Demokratisasi**

### **1.1. PENDAHULUAN**

#### **1.1.1. Deskripsi Singkat**

Sub Pokok Bahasan ini mengantarkan mahasiswa menjelaskan bahwa sistem pemerintahan demokratis dan efisien yang diterapkan Korea Selatan tidak serta merta membebaskan Korea Selatan dari jerat persolan korupsi. Keberhasilan Korea Selatan membangun kemandirian ekonominya memang dibarengi berbagai macam masalah, termasuk korupsi yang semakin tinggi seiring tingginya kemampuan ekonomi negara tersebut. Lebih lanjut akan dibahas faktor-faktor penyebab korupsi yang terjadi di Korea Selatan dari tahun ke tahun pada masa pemerintahan yang berbeda.

#### **1.1.2. Relevansi**

Mahasiswa Ilmu Pemerintahan perlu menjelaskan evolusi problematika korupsi di Korea Selatan ini karena beberapa sebab: 1) sebagai pengetahuan tentang kasus-kasus korupsi yang terjadi di Korea Selatan; 2) bisa menjelaskan korelasi antara tingginya kasus korupsi dengan tingginya kemampuan ekonomi suatu negara; 3) bisa menemukan faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi di negara yang notabene memiliki kemampuan ekonomi yang kuat.

### **1.1.3 Kompetensi**

#### **a. Standar Kompetensi**

Setelah mengikuti pokok bahasan ini selama satu pertemuan maka diharapkan mahasiswa akan dapat menjelaskan evolusi problematika korupsi yang terjadi di Korea Selatan beserta penyebabnya.

#### **b. Kompetensi Dasar**

1. Kemampuan menjelaskan evolusi korupsi yang terjadi di Korea Selatan.
2. Kemampuan menjelaskan faktor-faktor penyebab korupsi di Korea Selatan.
3. Kemampuan menjelaskan hubungan antara korupsi dengan kemajuan ekonomi suatu negara.

### **1.2. PENYAJIAN**

#### **1.2.1. Uraian dan contoh**

Terlepas dari perubahan lanskap politik, korupsi adalah masalah serius yang menghantui Kore Selatan dari waktu ke waktu. Beberapa orang yang mempelajari perkembangan Korea mengira bahwa pemerintahan Park Chung-Hee (1961-1979) sebagai prototipe dari perkembangan Negara modern yang berhasil membangun kebangkitan ekonomi secara efektif, sedangkan rezim sebelumnya, yakni Rhee Syngman yang berkuasa tahun 1948-1960 hanya dianggap sebagai rezim predator yang eksploitasi rakyat demi kepentingan kekuasaan belaka. Amsden (1989: 42) menyebutkan bahwa era Rhee sebagai masa yang penuh dengan tindak korupsi, kelumpuhan dan ketidaktercapaian standar ekonomi, serta kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah. Evans (1995: 51-52) mengemukakan bahwa di bawah Syngman Rhee ketergantungan terhadap sumbangan sektor swasta untuk membiayai kegiatan politik membuat pemerintah



bergantung pada hubungan klientelistik dan menyebabkan aktivitas *rent-seeking* merajalela.

Akan tetapi, beberapa ahli lain berpendapat bahwa sebenarnya perkembangan Korea pada masa pemerintahan otoriter juga tidak kalah korup. Jong-Sung (2005), misalnya, menyebutkan bahwa pemerintahan Korea Selatan pada masa otoriter militer dapat dikategorikan sebagai *crony capitalism* yang diwarnai korupsi, seperti halnya Philipina dan Taiwan. Korupsi (kronisme) inilah yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi Korea mulai melemah sejak tahun 1980-an (Moon 1994; Evans 1995). Ahli yang lain berpendapat bahwa korupsi sebenarnya merajalela di Korea Selatan sepanjang waktu setelah negara itu merdeka, terlepas dari model rezim pemerintahannya. Pada masa Park Chung-Hee, pemerintah berusaha mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan --dalam beberapa hal-- memberikan toleransi terhadap korupsi. Menurut Wedeman (1997) korupsi Korea Selatan memang meluas pada masa diktator militer, akan tetapi, hal tersebut bersifat fungsional untuk menopang pengembangan ekonomi negara, sehingga tidak termasuk kategori korupsi yang jahat. Dia berpendapat bahwa dalam hal tertentu, korupsi bisa berperan secara substansial untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Wideman menjelaskan bahwa ada tiga bentuk korupsi, yakni 1) *looting* (perampasan), yang berarti perampasan atau pencurian sistematis terhadap dana dan properti publik, serta praktik penerimaan suap oleh pejabat publik; 2) *rent-scrapping* (potongan biaya sewa), yang berarti manipulasi parameter makroekonomi untuk menghasilkan potongan biaya sewa bagi pejabat publik; dan 3) pungutan *deviden* (*deviden-collection*), yang berarti pemindahan sejumlah keuntungan yang diperoleh perusahaan swasta kepada pejabat pemerintah. Tiap negara mempraktekkan jenis korupsi yang berlainan. Korea Selatan menurutnya bisa digolongkan dalam tipe *deviden-collection*, sedangkan Filipina mempraktekkan *rent-scrapping* dan Zaire melakukan jenis *looting*. Menimbang akibat negatif dari tiga

jenis korupsi tersebut, *looting* adalah jenis yang dinilai paling buruk karena mengganggu kestabilan pertumbuhan ekonomi, sedangkan dalam kasus Korea Selatan kala itu, *deviden-collection* justru berfungsi untuk mempercepat kapitalisasi industri baru (*capital-intensive infant industries*) yang menyokong pembangunan ekonomi (Wedeman, 2007: 467-9).

Yang menjadi pertanyaan kemudian adalah bagaimana tren korupsi di Korea Selatan dari waktu ke waktu? Apakah tingkat korupsi lebih tinggi di tahun 1950-an di bawah kepemimpinan Rhee Syng-Man, daripada di tahun 1960-an dan 1970-an di bawah kepemimpinan Park Chung-Hee? Apakah tingkat korupsi menurun atau justru meningkat di saat Negara melakukan industrialisasi dan percepatan ekonomi besar-besaran di tahun 1970-1980-an?

Sebagaimana telah disinggung diatas, Park Chung-Hee mendapatkan posisi jabatan presiden melalui kudeta militer pada tahun 1961. Sama seperti Suharto, jenderal militer ini dianggap sebagai peletak dasar pembangunan ekonomi negara. Rezim Rhee Syng-Man (1948-1960) yang berkuasa sebelumnya dianggap sebagai rezim yang sangat korup, sehingga mendorong angkatan bersenjata dibawah Park melakukan kudeta. Gelar Park sebagai bapak pembangunan Korea dikarenakan asumsi (dan juga fakta) bahwa pada masa Park pembangunan ekonomi Korea Selatan berkembang sangat pesat, berbeda dengan pemerintahan Rhee di mana perekonomian negara terpuruk secara menyeluruh. Akan tetapi, dalam masalah korupsi, sesungguhnya kedua rezim sama-sama melakukan praktik korupsi. Beberapa pendapat ahli seperti Lie (1998), Wedeman (1999), dan Kang (2002) menilai bahwa persoalan korupsi pada masa rezim Park memiliki posisi yang sama dengan rezim Rhee.

Beberapa penulis Korea sendiri juga mengakui bahwa rezim Rhee dan Park tidak dapat dibedakan dari segi tingkat penyelewengan rente dan korupsi (Kim dan Im, 2001), bedanya terletak pada kebijakan perekonomian di bawah rezim Park yang dikelola secara lebih terpusat



sehingga menyebabkan rente dan korupsi lebih terkendali pada lingkaran elite (Lee 1995). Sedangkan pemerintahan Rhee, walaupun sering dicirikan sebagai pemerintahan korup, Presiden pertama Korea Selatan tersebut cenderung tidak menyalahgunakan wewenanganya untuk keuntungan pribadi melainkan menggunakan sistem yang berjejaring luas untuk mempertahankan cengkraman kekuasaan. Dengan demikian, pelaku dan penerima manfaat korupsi lebih tersebar dan cenderung tidak terkendali. Setelah Perang Korea, ia menerapkan kebijakan strategi industrialisasi substitusi import (ISI), menasionalisasi bank, dan menyita properti milik orang Jepang. Kebijakan tersebut menciptakan peluang korupsi dimana aset dan kebijakan tersebut yang dijual Rhee kepada jaringan politiknya untuk kepentingan politik sebagai imbalan atas dukungan politik dan finansial. Rhee melakukan hal tersebut untuk membiayai Partai Liberal yang berkuasa. Setelah Rhee tumbang, sejarah justru mencatat bahwa penguasaan otoritas yang besar pada pemerintah di bawah Park cenderung menyebabkan terjadinya korupsi dalam skala yang lebih besar dan dalam spektrum yang luas daripada yang terjadi pada rezim Rhee (Hahn 1975, dalam Lie 1998: 96). Selain itu, terdapat juga berbagai laporan jurnalistik juga menyebutkan bahwa selama pemerintahan Park, dengan bukti kuantitatif dan kualitatif, tingkat korupsi justru lebih besar dan lebih masif dibandingkan di bawah pemerintahan Rhee (Lee dan Kim, 1964; Park, 1967).

Ironisnya, motivasi utama bagi angkatan bersenjata dibawah Park Chung-Hee untuk melakukan kudeta pada tahun 1961 terhadap presiden Rhee Syngman adalah karena masalah korupsi, sama halnya kudeta militer oleh Chun Doo-Hwan di tahun 1980 terhadap pemerintahan Park juga didasarkan pada alasan yang sama. Karena tekanan politik internasional dan domestik, Park harus mengakhiri kekuasaan militernya dalam dua tahun dan menyelenggarakan pemilihan presiden pada tahun 1963. Untuk melanggengkan kekuasaan, dia mendirikan *Democratic Republican Party* (DRP) dan

membutuhkan banyak dana untuk melakukan kampanye. Untuk memenuhi anggaran untuk kebutuhan dana tersebut, Park diperkirakan menghabiskan dana sekitar 60 miliar won (sekitar \$200 juta). Sementara jumlah total pelaporan resmi yang tercatat hanya 30 juta won (sekitar \$100,000) (Woo, 1991: 10; Oh and Sim 1995:275-76). Dengan demikian, besar kemungkinan sebagian besar dana politik dikumpulkan dengan cara ilegal. Suatu rahasia umum bahwa dana bagi partainya disiapkan dengan cara melakukan manipulasi ilegal di bursa saham (Oh and Sim 1995: 248).

Park juga diketahui menerima dana suap dari perusahaan Amerika dan Jepang. Sumber terpenting bagi tercupupnya dana politik selama Park berkuasa memang berasal dari investasi asing dan alokasi pinjaman luar negeri dengan bunga rendah, dimana penerima pinjaman bisa membayar komisi sebesar 10-15 persen kepada pejabat pemerintah. Sumber kontribusi politik yang lain berasal dari selisih bunga (yang dianggap sebagai jasa / *quos quid pro*) untuk pemberian pinjaman bunga rendah dan untuk pembangunan proyek-proyek pemerintah (Woo, 1991: 108; Kim and Park 1968).

Apa yang dilakukan oleh rezim kediktatoran militer ini membuktikan teori bahwa kekuasaan absolut pasti melakukan korupsi secara absolut (*absolute power corrupts absolutely*) (You, 2003). Drama yang dilakukan Chun juga berlangsung mengharu-biru dengan alur cerita yang hampir sama: begitu melakukan kudeta pada 16 Mei 1961, petugas militer melakukan penangkapan secara dramatis terhadap beberapa *chaebol*<sup>1</sup> atas tuduhan melakukan akumulasi kekayaan secara terlarang. Rakyat dan kalangan OMS pada awalnya menyambut antusias tindakan tersebut. Ironisnya, penangkapan tersebut diakhiri dengan negosiasi politis ekonomis antara pemerintah dengan

<sup>1</sup> *Chaebol* adalah konglomerat-konglomerat raksasa, dikuasai oleh sistem keluarga yang sangat sentralistik yang mendominasi perekonomian. Mereka memiliki koneksi dengan pusat-pusat kekuasaan, dan merekalah yang menjadi cikal-bakal sejumlah konglomerat besar yang menjadi tulang punggung perekonomian Korea Selatan. Contohnya adalah, Hyundai, Samsung, Lucky Goldstar (LG), Daewoo, Sunkyong, dang Ssangyong.



konglomerasi bisnis tersebut. Di akhir cerita, rezim Chun justru mengkomodasi kepentingan para *chaebol* dengan mengurangi denda, dan bahkan memberikan subsidi keuangan bagi industrialis yang berjanji melaksanakan proyek-proyek industri tertentu dan bersedia menyediakan dana politik bagi pemerintah (Kim and Im 2001).

Walaupun perkara korupsi adalah persoalan yang terjadi sepanjang sejarah Korea, akan tetapi ada cara untuk membandingkan corak korupsi antara kepemimpinan Rhee, Park, Chun, dan Roh. Salah satu cara untuk melakukan hal tersebut adalah dengan melihat jumlah dana politik sah yang muncul selama masa kepemimpinan mereka. Tentu saja, jumlah total dana politik sah yang dikumpulkan meningkat dari waktu ke waktu sejak masa Rhee Syngman (1948-1960), Park Chung-Hee (1961-1979), Chun Doo-Hwan (1981-1987), Roh Tae-Woo (1988-1992), dan Kim Young-Sam (1993-1997). Kontribusi individu juga ikut meningkat dari waktu ke waktu. Lima konglomerasi bisnis ditemukan telah menyumbang dana lebih dari 60 juta won (sekitar 1,5 miliar won atau Rp. 150 milyar pada nilai konstan masa sekarang) untuk Partai Liberal milik Rhee (Kim 1964). Sedangkan kontribusi tahunan dari para pengusaha untuk Park diketahui mencapai 500-600 juta won (sekitar 1,3 - 1,5 miliar won atau Rp. 150 milyar pada nilai konstan sekarang) sebelum Yushin (pada tahun 1972) dan 200-300 juta won (sekitar 1 - 1,5 miliar won pada nilai konstan 1990) pada awal periode Yushin (Oh dan Sim 1995: 253). Perusahaan Samsung, Hyundai, Tonga, dan Daewoo ditemukan telah menyumbang dana politik ilegal sebesar 15 dan 22 miliar won untuk Presiden Chun Doo-Hwan. Sementara itu Samsung, Hyundai, Daewoo, dan LG memberikan kontribusi ilegal sebesar 21 dan 25 miliar won untuk Presiden Roh Tae-Woo (You 2009: 32).

Kemudian, Samsung juga ditemukan telah menyumbangkan dananya secara ilegal setidaknya 10 miliar won dan 34 miliar won (8 dan 22 miliar won pada nilai konstan 1990) untuk Lee Hoi-Chang dalam pemilihan presiden masing-masing pada tahun 1997 dan 2002,

yang kemudian kalah dari Kim Dae-Jung pada 1997 dan Roh Moo-Hyun pada 2002 (PSPD 2005). Chung Ju-Young, pendiri Hyundai Group pernah menyatakan bahwa ia mendonasikan dana sebesar 2-3 miliar won dua kali dalam setahun kepada Roh Tae-Woo, dan bahkan senilai 10 miliar won di tahun 1992 di akhir kepemimpinannya Roh. Chung Tae-Soo, pendiri Hanbo Group yang bangkrut pada tahun 1997 dan dihukum karena korupsi, ditemukan telah menyumbang sebesar 60 miliar won untuk Kim Young-Sam sebelum pemilihan presiden tahun 1992 (Oh dan Sim 1995: 274).

Dengan demikian, sumbangan politik dari konglomerasi bisnis mengalami peningkatan dari waktu ke waktu, dari awal tahun 1950-an hingga awal tahun 1990-an. Berdasarkan pada fakta tersebut, sulit mengatakan bahwa rezim Park tidak lebih korup dari rezim Rhee. Mengingat semua bukti yang diajukan sejauh ini, sangat mungkin bahwa rezim Park tidak jauh berbeda dari rezim Rhee, Chun, dan Roh terkait adanya praktik korupsi secara keseluruhan, kecuali dalam hal pengumpulan kekayaan untuk kepentingan pribadi yang dilakukan oleh Chun dan Roh dalam masa kepemimpinannya.

Bila ditarik garis besarnya, masa transisi dari rezim predator pada pemerintahan Syngman Rhee menuju rezim pembangunan ekonomi pada masa pemerintahan Park Chung-Hee memiliki kecenderungan yang sama dalam praktik-praktik korupsi, yang membedakan antara keduanya adalah mengenai kompetensi daripada tentang korupsi itu sendiri. Faktanya, kecenderungan korupsi meningkat hingga awal 1990-an dan sedikit menurun sejak akhir 1990-an.

### **Korupsi di Korea Selatan pasca Rezim Militer**

Pada bahasan sebelumnya telah dijabarkan mengenai tindakan pidana korupsi yang terjadi selama pemerintahan Rhee Syng-man (1948-1960) hingga pemerintahan Roh Tae-Woo (1998-1993), selanjutnya akan dibahas kasus-kasus korupsi yang diberitakan media



asosiasi persepakbolaan disana terjangkau penyakit suap-menyuap untuk mengatur pertandingan. Pada pertengahan tahun 2011, misalnya, dua orang didakwa membeli dua tiket pertandingan dan membayar dua pemain untuk mengatur hasil pertandingan. Menurut jaksa di Kota Changwon, mereka diduga memberikan suap sebesar 100 juta won (US\$ 91,72) kepada seorang kiper dan 120 juta won kepada pemain gelandang. Satu tahun sebelumnya, pada tahun 2010, salah seorang dari dua terdakwa juga dicurigai terlibat dalam judi pertandingan K-League. Ia dilaporkan mendapat US\$185 ribu dari hasil pengaturan pertandingan. Sejumlah laporan surat kabar menyebutkan klub-klub sepak bola yang mengetahui terjadinya skandal itu, diam-diam memecat pemain yang terlibat.<sup>4</sup>

Sama dengan situasi di Indonesia, tindakan korupsi juga dilakukan oleh para anggota keluarga pejabat pusat maupun daerah. Sebagai contoh, pada tanggal 1 November 2002, hakim pengadilan distrik Seoul menjatuhkan hukuman putra ke dua Presiden Kim Dae-Jung (1998-2003), Kim Hong-Up, dengan hukuman penjara selama 3,5 tahun dan membayar denda lebih dari US\$ 850.000. Dia dinyatakan bersalah setelah terbukti menerima suap dari enam pengusaha sebesar US\$ 2,1 juta dan melakukan penggelapan pajak senilai US\$ 1,8 juta. Sementara itu Kim Hong-Gul, putra ke tiga Presiden Kim Dae-Jung juga dihukum atas tuduhan korupsi pada bulan yang sama. Kim Hong-Gul dijatuhi hukuman 2,5 tahun penjara akibat terbukti menerima suap dari perusahaan Tiger Pool International sebesar US\$ 2,9 juta sebagai imbalan untuk menghindari pajak.<sup>5</sup>

Fakta lain menimpa Lee Sang-Deuk, kakak mantan presiden Lee Myung-Bak (2008-2013), yang menerima uang senilai 600 juta won

<sup>4</sup> Lihat The Korea Times (online), 'Match fixing scandal rocks K-League', 26 Mei 2011, ([http://koreatimes.co.kr/www/news/sports/2011/05/136\\_87728.html](http://koreatimes.co.kr/www/news/sports/2011/05/136_87728.html)), diakses 2 Juli 2015.

<sup>5</sup> Lihat BBC News World Edition (online), 'South Korean president's son jailed', 1 November 2002, (<http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/2384707.stm>), diakses 2 Juli 2015.

(sekitar Rp5 miliar) dari dua direktur bank yang bermasalah, Solomon Savings Bank dan Mirae Savings Bank, antara tahun 2007 dan 2011, agar dua bank ini tidak diaudit dan tidak dijatuhi sanksi dari otoritas jasa keuangan Korea Selatan. Kritikus menyebut Lee Sang-Deuk berusaha memanfaatkan pengaruh terhadap urusan negara begitu adiknya berkuasa.<sup>6</sup>

Yang terbaru pada 22 Januari 2014, Won Sei-Hoon yang menjabat sebagai direktur Badan Intelijen Nasional (NIS) di masa pemerintahan Lee Myung-Bak dihukum bersalah dalam kasus korupsi yang melibatkan dirinya. Won didakwa menerima suap sebesar 160 juta won (US\$ 150.000) antara tahun 2009 dan 2010 dari mantan kepala perusahaan konstruksi Hwangbo, Hwang Bo-Yeon yang sekarang bangkrut. Menurut pengadilan, Hwang dituding meminta bantuan Won untuk mendapatkan kontrak dari lembaga negara dan perusahaan besar. Won divonis hukuman penjara selama dua tahun dan berkewajiban membayar denda sebesar 160 juta won.<sup>7</sup>

## 1.2.2 Latihan

1. Bagaimanakah tren korupsi yang terjadi di Korea Selatan dari waktu ke waktu?
2. Apakah kesamaan Presiden Park Chung-hee di Korea Selatan dengan Presiden Soeharto di Indonesia?
3. Bagaimanakah peran *chaebol* bagi sistem politik Korea Selatan?
4. Jelaskan makna "*absolute power corrupts absolutely*"! Berikan contoh yang terjadi di Korea Selatan!

<sup>6</sup> Lihat BBC Indonesia (online), 'Kakak presiden Korea Selatan ditangkap', 11 Juli 2012, sumber: [http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2012/07/120711\\_korupsi\\_korsel.shtml](http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2012/07/120711_korupsi_korsel.shtml), diakses 2 Juli 2015.

<sup>7</sup> Lihat Yonhap News Agency (online), '(LEAD) Former spy master gets 2-year jail term for graft', 22 Januari 2014, Sumber: <http://english.yonhapnews.co.kr/national/201422/54/0302000000AEN20140122005851315F.html>, diakses 2 Juli 2015.



5. Bagaimanakah perbedaan signifikan sikap pemerintahan Rhee Syngman dan Park Chung-Hee dalam kebijakan anti korupsi?

### 1.3.PENUTUP

#### 1.3.2. Tes Formatif

Pilihlah salah satu jawaban yang benar, dengan memberikan tanda silang!

1. Tiga bentuk korupsi menurut Wedeman (1997) adalah:

- A. Looting, rent-scrapping, deviden-collection.
- B. Deviden-collection, rent-seeking, looting.
- C. Rent-seeking, looting, deviden-collection.
- D. Capital-intensive, rent-scrapping, looting.

2. Alasan Park Chung-hee diuluki sebagai Bapak Pembangunan Korea Selatan adalah:

- A. Tampuk kepemimpinannya yang diperoleh melalui kudeta militer.
- B. Menjabat preseiden selama dua periode kepemimpinan.
- C. Sebagai peletak dasar pembangunan ekonomi negara.
- D. Kedekatannya dengan rakyat Korea Selatan.

3. Kebijakan Presiden Rhee Syngman setelah Perang Korea antara lain:

- A. Menasionalisasi perusahaan tambang.
- B. Strategi industrialisasi substitusi impor.
- C. Menyita property milik orang Korea Utara.
- D. Menetapkan batas wilayah demilitarisasi.

4. Pendiri Hyundai Group yang pernah menyatakan bahwa ia mendonasikan dana sebesar 2-3 miliar won dua kali dalam setahun kepada Roh Tae-Woo, adalah:

- A. Chung Ju-Young
- B. Park Young Hee

- C. Kim Ill Sung
- D. Samsung

5. Presiden Korea yang putra keduanya dihukum dalam kasus korupsi adalah:

- A. Syngman Rhee
- B. Kim Dae-Jung
- C. Chun Doo-Hwan
- D. Park Geun-hye

#### 1.3.2 Umpan Balik

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah jawaban yang benar}}{5} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan:

90 – 100%	: baik sekali
80 - 89%	: baik
70 – 79%	: cukup
< 70%	: kurang

#### 1.3.3 Tindak lanjut

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar selanjutnya. Bagus! Jika masih dibawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar ini, terutama bagian yang belum dikuasai.



### 1.3.4 Rangkuman

Korea Selatan menerapkan sistem pemerintahan yang demokratis dan efisien. Namun, efisiensi pemerintah tidak berarti bahwa korupsi di Korea Selatan dapat dihindarkan. Bangsa mulai terganggu dengan permasalahan baru, seperti hubungan kolusi antara politisi dengan pebisnis besar dan praktik-praktik transaksional politik yang menyebabkan korupsi semakin merajalela.

Masa transisi dari rezim predator pada pemerintahan Syngman Rhee menuju rezim pembangunan ekonomi pada masa pemerintahan Park Chung-Hee memiliki kecenderungan yang sama dalam praktik-praktik korupsi, yang membedakan antara keduanya adalah mengenai jenis dan kompetensi daripada tentang korupsi itu sendiri. Faktanya, kecenderungan korupsi meningkat hingga awal 1990-an dan sedikit menurun sejak akhir 1990-an.

### 1.3.5 Kunci Jawaban tes formatif

Nomor 1 jawaban A, looting, rent-scrapping, deviden-collection.

Nomor 2 jawaban C, Sebagai peletak dasar pembangunan ekonomi negara.

Nomor 3 jawaban B, Strategi industrialisasi substitusi impor.

Nomor 4 jawaban A, Chung Ju-Young

Nomor 5 jawaban B, Kim Dae-Jung

### DAFTAR PUSTAKA

- Harvie C. And Hyun-Hoon Lee. 'Export-led industrialisation and growth: Korea's economic miracle, 1962-1989' *Australian Economic History Review* 43 (3), 256-286. (2003)
- Jip, Choi Jang. *Structure Change of Contemporary South Korean Politics*, Seoul: Ggachi (1989)
- Jip, Choi Jang *Theory of South Korean Democracy*, Seoul: Hangil. (1993)

- Moran, J. Patterns of corruption and development in East Asia, *Third World Quarterly*, 20 (3), 569-87. (1999)
- Oh, Dae-young and Sim, Sang-min. Hankukui Chihwa Kyongje (Underground Economy of Korea). Seoul: Miraesa (1995)
- Setiyono, B., Adnan, M. Dan Asutika, L. Laporan Penelitian Perbandingan Gerakan Anti-Korupsi Korea Selatan dan Indonesia (2015)
- Wedemen, A. 'Looters, Rent-Scrapers, and Dividend-Collectors: Corruption and Growth in Zaire, South Korea, and the Philippines', *The Journal of Developing Areas*, Vol. 31, No. 4 (Summer, 1997), pp. 457-478. (1997)
- Woo, Jung-en. *Race to the Swift: State and Finance in Korean Industrialization*. New York: Columbia University Press. (1991)

### SENARAI

- crony capitalism* : kapitalisme yang mengistimewakan kelompok tertentu (yang biasanya dekat dengan penguasa)
- kudeta : perebutan kekuasaan secara tidak sah (biasanya dilakukan dengan kekuatan bersenjata)
- otoritas : hak untuk memerintah atau mengatur



## 2. SUB POKOK BAHASAN:

### Faktor Penyebab Korupsi di Korea Selatan

## 1.2. PENDAHULUAN

### 2.1.1 Deskripsi Singkat

Sub bahasan pokok ini mengantarkan mahasiswa untuk menjelaskan beberapa faktor yang mempengaruhi korupsi di Korea Selatan, diantaranya adalah karena kebijakan konsentrasi penguasaan aset ekonomi oleh kelompok kecil pengusaha, pengaruh budaya dan konteks sosial, perubahan orientasi dalam pembangunan, terjadinya ketidakadilan dan kesenjangan sosial, ketidaksempurnaan sistem dan tradisi demokrasi, serta dominannya peran institusi negara. Kelima hal tersebut menjadi medium untuk menyokong faktor utama terjadinya tindak korupsi di Korea Selatan, yaitu adanya ambisi dan kepentingan pembangunan ekonomi yang ingin dicapai oleh pemerintah. Berikut adalah penjelasan lebih rinci terhadap faktor penyebab tingginya tingkat korupsi di Korea:

### 2.1.2 Relevansi

Mahasiswa Ilmu Pemerintahan perlu menjelaskan faktor penyebab korupsi di Korea Selatan karena beberapa sebab: 1) sebagai pengetahuan awal untuk bisa memahami alasan terjadinya korupsi di suatu negara; 2) bisa mengambil pelajaran tentang faktor-faktor penyebab korupsi di negara lain agar mampu melakukan pencegahan korupsi di Indonesia.

### 2.1.3 Kompetensi

#### a. Standar Kompetensi

Setelah mengikuti pokok bahasan ini selama satu pertemuan, maka diharapkan mahasiswa dapat menjelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi di Korea Selatan.

#### b. Kompetensi Dasar

1. Kemampuan menjelaskan faktor-faktor pencetus terjadinya korupsi di Korea Selatan.
2. Kemampuan menjelaskan keterkaitan demokrasi dan korupsi.
3. Kemampuan menganalisis perbandingan keterkaitan demokrasi dan korupsi antara Korea dan Indonesia.

## 1.3. PENYAJIAN

### 1.3.1. Uraian dan contoh

Walaupun penyebab korupsi berkaitan dengan spektrum variable yang luas, pemerintah memainkan peran yang sangat penting dalam menjelaskan hal yang berkaitan dengan persoalan korupsi, seperti penyebab, konsekuensi, ruang lingkup, dan pengendaliannya. Sejak awal abad ke-20, peran pemerintah di beberapa negara telah lebih luas dan lebih kuat karena pemerintah diyakini berfungsi sebagai korektor kegagalan pasar terkait dengan asimetri informasi, pasar non-kompetitif, masalah kelemahan dalam hubungan principal-agent, eksternalitas, atau efisiensi penggunaan barang publik.

Di negara berkembang, peran pemerintah menjadi jauh lebih penting di bandingkan dengan negara maju. Negara harus mengatasi kemiskinan absolut dan keterbelakangan infrastruktur, yang mendorong keterlibatan pemerintah dalam pembangunan ekonomi melalui industrialisasi sehingga dengan demikian peran pemerintah yang luas dianggap sebagai hal tak terelakkan. Pada tahap awal pembangunan ekonomi, untuk memecahkan lingkaran setan kemiskinan, pemerintah secara ketat melakukan campur tangan terhadap sektor swasta bahkan terlibat dalam berbagai proyek-proyek industri besar dengan memperluas pengeluaran anggaran publik. Hal ini menyebabkan terbukanya peluang bagi para pejabat pemerintah untuk menyalahgunakan wewenang dan mencuri anggaran negara.



Tentu saja, tingkat prevalensi korupsi di suatu negara tetap dipengaruhi berbagai faktor lain.

Tingginya tingkat korupsi di Korea Selatan terjadi karena beberapa faktor yang mempengaruhi, diantaranya adalah karena kebijakan konsentrasi penguasaan aset ekonomi oleh kelompok kecil pengusaha, pengaruh budaya dan konteks sosial, perubahan orientasi dalam pembangunan, terjadinya ketidakadilan dan kesenjangan sosial, ketidaksempurnaan sistem dan tradisi demokrasi, serta dominannya peran institusi negara. Kelima hal tersebut menjadi medium untuk menyokong faktor utama terjadinya tindak korupsi di Korea Selatan, yaitu adanya ambisi dan kepentingan pembangunan ekonomi yang ingin dicapai oleh pemerintah. Berikut adalah penjelasan lebih rinci dari beberapa ahli terhadap faktor penyebab tingginya tingkat korupsi di Korea (Cohen 2013; Kang 2002; Jong-Sung 2005):

#### a. Pemusatan penguasaan aset ekonomi

Sebagaimana telah disinggung diatas, pembangunan ekonomi Korea Selatan bertumpu pada akselerasi pertumbuhan dengan lokomotif dari konglomerat (*chaebol*) yang ditunjuk pemerintah. Kebijakan pemerintah sehubungan dengan *chaebol* ini berpusat di sekitar konsep 'ekonomi kapitalis terpinpin' (*crony capitalism*), dimana segelintir pengusaha, atas nama efisiensi, diberikan berbagai macam hak monopolistik (Kang 2002: 96-7; Buzo 2007: 127-130). Mereka juga mendapatkan proteksi dari pemerintah untuk menjalankan bisnis. Sebagaimana dijelaskan oleh Kang (2002: 96-100), para *chaebol* diberikan ruang yang sangat luas dan independen untuk menjalankan bisnis dengan paling tidak empat isu pokok, yakni: (1) konsentrasi kepemilikan, artinya mereka diberikan hak mendirikan perusahaan dengan kepemilikan terbatas dan diberikan penguasaan/pengelolaan tanah, usaha pertambang, perdagangan, jasa dan sebagainya secara monopolistik; (2) diversifikasi usaha, artinya mereka berhak untuk melakukan ekspansi usaha ke berbagai macam sektor; (3) internal

trading dan inter-afiliasi perusahaan pendukung, yakni mereka diperkenankan melakukan merger, akuisisi, dan membuat kartel; dan (4) pengaruh kendali keluarga pada manajemen perusahaan, yakni perusahaan tidak diwajibkan untuk melakukan *go-public*. Singkat kata, para *Chaebol* menikmati berbagai macam keistimewaan bisnis yang luar biasa tanpa harus khawatir terhadap tuntutan persaingan usaha yang fair.

Walaupun *Chaebol* memang berjasa mendorong ekonomi Korea, akan tetapi kebijakan ini dinilai telah menimbulkan banyak ketidakadilan bagi masyarakat kecil. Disamping menyebabkan ketimpangan antara rakyat biasa dan para keluarga *Chaebol* beserta perusahaan-perusahaan kroninya, kebijakan pemusatan kekuatan ekonomi juga menimbulkan matinya demokrasi. Para *Chaebol* dapat dengan mudah mempengaruhi kebijakan pemerintah yang merugikan rakyat banyak, serta mengabaikan aspirasi dari bawah. Mereka, misalnya, sering mendapatkan keringanan pajak, membeli dan menguasai tanah rakyat tanpa batas luasan secara murah, dan menentukan upah buruh secara sepihak.

#### b. Pembelokan Budaya Konfusianisme

Sebagaimana telah disinggung di Bab I, para ahli tentang korupsi pada umumnya sepakat bahwa budaya memainkan peran yang sentral dalam mempengaruhi preferensi korupsi di suatu negara. Secara geografis dan geo-kultural, Korea Selatan atau Korea pada umumnya, adalah suatu negara atau wilayah yang berdekatan dengan --dan karenanya banyak dipengaruhi oleh-- kebudayaan Cina. Sedangkan kebudayaan Cina secara umum dijiwai oleh ajaran Konfusius yang menekankan harmoni sosial. Ajaran ini menyebar sampai ke Jepang dan juga Asia Timur di sepanjang Semenanjung Korea. Tidak mengherankan kiranya, konfusianisme memiliki posisi yang berpengaruh dalam tradisi bangsa Korea Selatan.



Konfusianisme sendiri sesungguhnya tidak memiliki ajaran yang mendorong dilakukannya korupsi, karena titik tekan filosofi ini justru ajaran tentang perlunya kebaikan bagi sesama. Ajaran Konfusius berisi ajaran inti berupa perikemanusiaan (*Jen*), kelayakan (*Yi*), sopan santun (*Li*), kebijaksanaan (*Chi*), pendidikan, pembetulan nama (*Cheng Ming*), bakti kepada keluarga, dan harmoni sosial (Lee 2013). Berdasar pada serangkaian prinsip, masyarakat Korea menciptakan ritual dan tradisi yang turun temurun. Kemudian pada akhirnya, ajaran Konfusius telah menjadi tuntunan tingkah laku dalam setiap lapisan kehidupan di Korea Selatan, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam pengaplikasian konfusianisme pada area hubungan sosial, kekuasaan, dan kegiatan ekonomi, masyarakat Korea Selatan menerapkan lima nilai konfusian yang dominan, antara lain kehidupan keluarga yang menekankan kepatuhan seorang anak terhadap keluarga, pemahaman bahwa negara adalah agen moral yang aktif dalam pembangunan, menghormati senioritas dalam setiap hirarki masyarakat yang ada, menekankan pengembangan diri sendiri dan pendidikan, serta perhatian terhadap harmoni sosial (Young-Whan, tt: 4).

Akan tetapi, sebagaimana halnya dengan masyarakat berbudaya konfusianisme dan timur pada umumnya, yang memiliki karakter *high context* dan *gift-giving*,<sup>8</sup> masyarakat Korea memiliki cara pandang tentang kekuasaan, dan implikasinya terhadap persepsi mereka terhadap korupsi yang permisif. Cara pandang yang keliru merupakan faktor paling dasar yang menyebabkan mengapa persoalan korupsi bertahan lama dan dikatakan tinggi tingkat prevlensinya. Masyarakat Korea pada umumnya menganut prinsip budaya nenek moyang

<sup>8</sup> *High context culture* adalah suatu kebudayaan yang cenderung bersifat komunal, dimana masyarakat lebih dipentingkan dari individu. Masyarakat seperti itu cenderung mengedepankan harmoni sosial dibandingkan menyelesaikan masalah yang mengandung resiko terjadinya disintegrasi. Contoh dari praktek budaya ini adalah adanya kebiasaan memberi sesuatu (*gift-giving*) kepada orang lain, walaupun bisa jadi melanggar hukum (Hackman & Johnson, 2000: 300).

konfusianisme yang memandang bahwa "memberi", "menolong", dan "melindungi" menjadi kata kunci dalam pergaulan sosial. Hal tersebut menyebabkan perbuatan yang berimplikasi korupsi berkembang menjadi suatu kebiasaan mengakar yang dianggap wajar. Pemahaman ini kemudian diaplikasikan ke dalam nilai budaya Korea Selatan dalam bentuk patronase dan nepotisme, bahkan dianggap sebagai bagian dari budaya sehari-hari sehingga tanpa disadari Korea Selatan telah menerapkan budaya yang mentolerir korupsi sejak lama.

Kondisi tersebut berpengaruh terhadap doktrin politik yang mengaplikasikan prinsip konfusianisme. Dalam kaitan ini implementasi konfusianisme dilaksanakan dalam tiga tingkatan yaitu (1) *kyongse* yang mengacu pada cara untuk mengatur dunia, (2) *chemin*, tentang bagaimana cara menyelamatkan rakyat, dan (3) *chi'guk* yang merupakan pengajaran suatu cara mengenai bagaimana memerintah negara (Slezia 2013). Dalam sistem politik, Konfusian mengedepankan harmonisasi tatakelola dan hubungan antar aktor politik sehingga kekuasaan pemerintah dapat dijalankan secara beribawa berdasarakan pada prinsip-prinsip etika yang ada (Young-Whan, tt: 14). Dengan demikian, terdapat transformasi prinsip Konfusianisme yang semula hanya merupakan serangkaian prinsip dan ritual yang ditujukan untuk menyelaraskan hubungan antarmanusia, pada masa kontemporer lebih menjadi sebagai tuntunan tingkah laku social-politik. Konfusianisme telah memberikan pengaruh yang signifikan dalam proses modernisasi sosio-ekonomi dan politik yang begitu besar dengan melihat latar belakang historis masa lalu Korea Selatan yang suram dan pembangunan negara yang dialaminya.

Sebagaimana dijelaskan dalam bab terdahulu, Korea Selatan mengalami kebangkitan ekonomi pada masa pemerintahan Presiden Park Chung Hee. Presiden Park, dengan kekuasaan despotik yang kuat seringkali disebut sebagai Presiden yang memiliki andil besar dalam membangun industri dan perekonomian di Korea Selatan. Pada era Park, hubungan antara pemerintah dan pengusaha terbangun sangat dekat



dan secara resiprokal bergantung satu sama lain. Kenyataan bahwa pengusaha-pengusaha di Korea Selatan sangat percaya dan tunduk / loyal terhadap pemerintah, merefleksikan ajaran konfusianisme yang menyorotkan kepercayaan dan harmonisasi kepada pemimpin. Hal ini didiskripsikan dengan menarik oleh Jongwoo Han dan L. H. M. Ling (1998) sebagai 'kapitalisme feminim', berbeda dengan praktek kapitalisme negara-negara Barat yang lebih kepada 'kapitalisme maskulin'. Kapitalisme feminim ini cenderung mengedepankan harmonisasi negara sebagai 'suatu keluarga' yang memiliki struktur hierarki berjenjang dengan tingkatan kekuasaan bertingkat, tidak seperti kapitalisme barat yang individualistik dan lebih egaliter.

Dengan demikian, berbeda dengan negara-negara barat, Korea Selatan mengedepankan peran pemerintah --mulai dari presiden sampai pegawai negeri di lapangan-- untuk membimbing, mengontrol, mengarahkan, dan melindungi rakyat dalam segala hal. Sebaliknya, rakyat dituntut untuk tunduk, patuh, dan mendukung secara total kepada pemerintah. Sejalan dengan hal tersebut, maka pemerintah memiliki peran yang determinan dalam menentukan arah pembangunan ekonomi, dan melakukan kontrol terhadap para *chaebol*. Berkat tata nilai seperti ini, efektivitas pemerintah dalam melaksanakan pembangunan ekonomi menjadi mudah dicapai. Karena prinsip konfusianisme, rakyat percaya bahwa pemimpin akan melakukan yang terbaik bagi masyarakatnya tanpa perlu diberikan kontrol atau kritik yang berlebihan untuk menjaga harmoni. Meskipun memang sangat disayangkan, bahwa pola semacam ini pada akhirnya menyebabkan korupsi menjadi dibenarkan.

Tidak mengherankan kiranya apabila problem korupsi di Korea Selatan pada umumnya banyak berbentuk kolusi dan nepotisme. Kedekatan para presiden dengan para konglomerat Korea Selatan menyebabkan para *chaebol* tersebut juga memiliki pengaruh dalam perpolitikan. Pemerintahan Park Chung Hee, secara lebih khusus, meletakkan dasar kebijakan yang mendorong supaya konsentrasi

perekonomian di Korea Selatan terpusat pada para *chaebol* tersebut (Kang 2002: 191). Dapat dikatakan bahwa kekuatan pemerintah berkelindan secara resiprokal dengan para *chaebol*. Mirip dengan situasi di Indonesia, partai-partai politik di Korea Selatan mengandalkan dana dari para *chaebol*. Begitu juga sebaliknya, pemerintah membalas secara timbal balik bagi "kebaikan" perusahaan besar yang telah berperan dan berjasa dalam berkontribusi membantu pendanaan partai. Hal tersebut menjadikan posisi *chaebol* di Korea Selatan sangat berpengaruh kuat dalam lanskap politik di negara itu.

Beberapa ahli menyebut hubungan mutualisme antara pemerintah dan pengusaha di Korea Selatan ini sebagai *mutual hostage atau hubungan yang saling menguntungkan* (Kang 2002: 96). Dalam pola hubungan ini, kedua belah pihak, yaitu pengusaha dan pemerintah dapat sama-sama saling membantu kepentingan masing-masing untuk mengambil keuntungan. Dalam prakteknya, pola hubungan tersebut mengakibatkan adanya kecederungan yang menyimpang bagi keduanya untuk melakukan korupsi: pemerintah membuat kebijakan-kebijakan yang *favorable* bagi pengusaha, dan sebaliknya pengusaha memberikan suap bagi para pejabat dan partai politik. Walaupun demikian, ada batasan bagi pemerintah dan pengusaha dalam mengambil keuntungan sehingga dampaknya tidak sampai mengarah pada ketidakstabilan ekonomi masyarakat Korea Selatan. Para pengusaha kakap Korea Selatan juga berperan besar dalam menyumbang pembangunan infrastruktur dan penyediaan barang-barang baik publik sedemikian rupa sehingga ada kompensasi bagi rakyat yang pada akhirnya menciptakan stabilitas politik dan seperti benar-benar membuai rakyat, menutupi kenyataan bahwa Korea Selatan merupakan negara yang tingkat korupsinya termasuk tinggi.

Dengan demikian, salah satu alasan bahwa Korea Selatan bisa berhasil untuk beberapa waktu dengan model pembangunan negara yang dipimpin pemerintah adalah karena kemampuannya untuk mengontrol dan menjaga agar korupsi yang merajalela dalam



pemerintahan, tidak mengganggu stabilitas politik. Dapat dimengerti kiranya, bahwa walaupun Korea Selatan memiliki tingkat prevalensi korupsi yang massif, suatu faktor yang telah menjadi kejatuhan pemerintah di banyak negara berkembang, akan tetapi Korea Selatan mampu mengelola korupsi ini dengan memungkinkannya untuk meningkatkan sinergi antara negara dan bisnis, serta politik, dan menciptakan kekayaan bagi rakyat banyak.

Dapat disimpulkan bahwa dibalik kesuksesan perekonomian Korea Selatan, terdapat dinamika tersendiri yang berbeda dengan negara berkembang lain. Konfusianisme yang kental menyebabkan tingginya loyalitas masyarakat, diikuti oleh keberhasilan pemerintah dalam membangun perekonomian di Korea Selatan yang sempat terpuruk di awal kemerdekaan. Lingkungan budaya yang demikian menyebabkan terjadinya politik uang yang tinggi dan pada akhirnya menyebabkan angka korupsi juga tinggi. Adanya hubungan timbal balik antara pemerintah dan pengusaha menyebabkan terjadinya banyak kolusi. Kondisi tersebut masih dapat dinetralisir oleh adanya batasan-batasan dalam frame *mutual hostage* yang kemudian membuat hubungan tersebut menjadi tidak terasa merugikan masyarakat.

### c. Pengaruh Metode dan Prioritas Pembangunan

Tidak dapat dipungkiri bahwa kapitalisme dan pragmatisme telah berkontribusi besar terhadap tumbuhnya korupsi di Korea. Tuntutan untuk melaksanakan pembangunan secara efektif dan cepat, menyebabkan Korea memilih metode *crony capitalism* (Kang 2002), yakni kapitalisme terpimpin yang bertumpu pada segelintir orang dalam pengelolaan ekonomi negara.

Perubahan orientasi dan prioritas pemerintah terjadi dari waktu ke waktu di Korea Selatan. Pada masa pemerintahan Syngman Rhee, orientasi dan konsentrasi pemerintah ditekankan kepada persatuan nasional dan penanganan perang dingin dengan Korea Utara. Kebijakan ini berubah pada masa pemerintahan Park Chung-Hee yang

lebih pragmatis dan kapitalistik yang cenderung *economic-centric*, dengan tujuan utama peningkatan pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini bisa dikatakan telah meningkatkan interaksi dan frekuensi praktik politik uang antara pemerintah dan elit bisnis. Sejak masa Park, Korsel tumbuh sebagai negara dengan penopang utama bisnis konglomerat *chaebol* yang menggerakkan industrialisasi modern. *Chaebol* menyediakan banyak lapangan kerja, membayar pajak terbesar, pemberi cadangan devisa negara terbesar, dan penyumbang dana politik, sehingga tidaklah mengherankan bila pengaruh luar biasa kuat dan mengintervensi kebijakan pemerintah agar menguntungkan atau setidaknya tidak merugikan mereka, sebagai kompensasi terhadap jasa-jasa mereka terhadap negara. Bersama jenderal militer, para *Chaebol* kemudian mempraktekkan *crony capitalism* tersebut dalam bentuk korupsi kartel sebagai benteng agar dapat mengatasi persaingan dan perubahan politik (Kang 2002).

Dengan berbagai cara, terutama melalui proses kerjasama tertutup dan berbagi hasil keuntungan dan manfaat korupsi, kelompok elit politik dan bisnis kemudian membangun sistem sosial-politik, mafia, dan aliansi yang dapat memperkuat pengaruh dan mencegah munculnya oposisi. Dengan dalih usaha peningkatan perekonomian negara, pola ini menghasilkan praktek korupsi yang mengurita. Karena korupsi yang ada membantu meningkatkan perekonomian negara, maka dengan kata lain korupsi (kartel elit) dapat menjadi sarana 'penujangan' bagi negara untuk meningkatkan perekonomiannya.

Tingginya pertumbuhan ekonomi, kemajuan dan kemakmuran negara di satu sisi, yang berjalan seiring dengan tingginya tingkat korupsi di sisi yang lain, merupakan bukti bahwa korupsi kartel elit tidak terlihat merugikan negara secara material. Di sini, korupsi menjelma sebagai alat pragmatis, di mana baik pemerintah maupun elit sama-sama memiliki kepentingan yang sama untuk memenuhi kepentingan kesatuan institusi (*institutional reasons*), yaitu kemajuan ekonomi negara bagi pemerintah dan akses terhadap pembuatan



kebijaksanaan bagi elit. Ini merupakan hasil pembenaran pemikiran bahwa korupsi adalah hal positif yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

#### d. Ketidakadilan Sosial dan Distribusi Kekayaan

Mengerncutnya kekuasaan politik dan penguasaan aset ekonomi menyebabkan timbulnya kesenjangan sosial yang tinggi di Korea Selatan. Konsentrasi ekonomi mengerucut kepada beberapa gelintir orang yang mengendalikan proses-proses politik untuk kepentingan kelompok terbatas. Permasalahan ini terlihat menonjol, diantaranya, dalam masalah penguasaan tanah –yang kemudian menjadi pemicu munculnya gerakan dari Citizen Coalition for Economic Justice (CCEJ). Dalam konteks tanah ini, para birokrat/politisi berkolaborasi dengan pengusaha menjadi elit kartel untuk membuat perencanaan tata guna tanah/wilayah secara rahasia yang menyebabkan terjadinya banyak spekulasi tanah yang merugikan publik.

Sebagaimana ditulis oleh Michael Johnston (2005), kartel elit adalah salah satu dari empat sindrom korupsi yang menjelaskan adanya kombinasi partisipasi politik dan ekonomi serta keterlibatan lembaga-lembaga terkait dengan terjadinya korupsi. Tiga penyakit lainnya adalah pengaruh pasar, oligarki dan klan/kelompok, serta distorsi fungsi institusi resmi. Kartel elit menekankan bahwa korupsi lebih dipengaruhi oleh *factor influence* daripada faktor kontrol, di mana para politisi papan atas, pengusaha, birokrat, militer, dan para pemimpin etnis saling berbagi keuntungan dan manfaat korupsi satu sama lain sehingga mereka membangun jaringan dan aliansi yang memperkuat kekuasaan dan mencegah oposisi. Korupsi semacam ini selain dapat menguntungkan, juga merupakan strategi untuk mencegah perubahan politik. Sebagaimana dikemukakan oleh Johnston (2005: 103): “*Elite cartel is all about how to buy friends and govern people. The*

*core function of elite cartel is to protect, as well as to enrich, networks of higher level elites*”.

Hubungan dalam kartel elit tidak hanya terjalin antara *public officials* dan *private interests*, atau antara petinggi politik dan pengikutnya saja, tetapi juga antara hegemonik politik, birokrasi, dan pengusaha. Poin utamanya bukanlah untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan khusus, tetapi untuk menghalangi atau mengkooptasi para pesaing, mengumpulkan pengaruh yang cukup untuk memerintah, dan melindungi keuntungan ekonomi dan kebijakan dari tekanan pemilu dan sosial. Berbicara tentang kartel elit di Korea Selatan, perhatian banyak orang akan tertuju kepada *chaebol*, konglomerat Korea Selatan yang mengontrol kelompok-kelompok korporat yang biasanya merupakan perusahaan multinasional global.<sup>9</sup> Melalui dukungan pemerintah, beberapa perusahaan milik *chaebol* telah dikenal luas di level internasional, seperti Samsung, LG, dan Hyundai. Pemerintah memberikan dukungan yang agresif terhadap kelompok-kelompok korporat milik *chaebol* dikarenakan mereka memberikan pemasukan yang besar bagi keuangan negara. Dengan kata lain, *chaebol* merupakan level elit (ekonomi) tertinggi di Korea Selatan yang memberikan andil sangat besar dalam perkembangan ekonomi negara.

Sebenarnya Korea Selatan pada awalnya cukup berhasil mempertahankan distribusi pendapatan yang relatif merata. Pada awal 1990-an, jumlah kelas menengah Korea Selatan meningkat secara signifikan, sehingga sebanyak 70 persen dari populasi mengidentifikasi diri mereka sebagai milik kelas menengah.<sup>9</sup> Akan tetapi hal ini mulai berubah pada pertengahan 1990-an. Titik balik utama adalah krisis keuangan Asia yang tiba di Korea Selatan pada tahun 1997. Krisis ini membawa konsekuensi yang menghancurkan bagi perekonomian dan untuk mata pencaharian penduduk yang bekerja. Sejumlah besar orang menderita PHK, pensiun dini dan kegagalan bisnis, dan banyak orang-

<sup>9</sup> Lihat East Asia Forum online, *Inequality in South Korea*, diakses 8 Agustus 2015, alamat: <http://www.eastasiaforum.org/2014/07/01/inequality-in-south-korea/>



orang kelas menengah mengalami mobilitas ke bawah. Tapi konsekuensi dari krisis keuangan ini tidak merata. Sementara sebagian besar orang yang bekerja sangat menderita, mereka yang memiliki sumber daya keuangan mengambil keuntungan dari kondisi pasar kredit-langka dan keluar dari krisis lebih kaya dari sebelumnya. Jadi, kesenjangan ekonomi meningkat terasa selama dan setelah krisis. Rata-rata angka koefisien Gini - ukuran ketidaksetaraan - untuk 1990-1995 adalah 0,258, tetapi dengan meningkatnya ketidaksetaraan, koefisien meningkat menjadi 0,298 pada tahun 1999, dua tahun setelah terjadinya krisis keuangan. Angka ini terus meningkat, mencapai 0,315 pada tahun 2010.<sup>10</sup> Akibat dari keadaan ini menyebabkan ketidakseimbangan kekuatan ekonomi dan politik di kalangan masyarakat Korsel. Mereka yang berada pada lingkaran menguasai konsentrasi kekuatan ekonomi dan politik yang besar, sedangkan masyarakat kebanyakan berada pada ketidakberdayaan. Akibat selanjutnya tentu adalah munculnya kesewenang-wenangan dan penyalahgunaan, termasuk korupsi, yang dilakukan oleh mereka yang berkekuatan besar.

#### e. Kelemahan Lembaga Anti Korupsi

Pengawasan memiliki fungsi yang vital dalam mengendalikan korupsi. Cyrille Fijnaut dan Leo Huberts (2002) dalam buku mereka yang berjudul *Corruption, Integrity and Law Enforcement* memberikan gambaran tentang pentingnya lembaga independen, *free standing agencies*, yang memiliki peran penting dalam peran melawan korupsi. Terdapat sejumlah indikator yang harus dapat dipenuhi oleh badan independen tersebut. Kebijakan-kebijakan antikorupsi dari sebuah institusi bisa dinilai sebagai efektif bila badan pelaksanaannya telah memenuhi "standar kinerja" yang terdiri dari lima ketentuan berkaitan

dengan efektifitas<sup>11</sup>. Bila salah satu dari lima ketentuan tersebut tidak terpenuhi, maka institusi tersebut dapat dikatakan tidak efektif dalam menjalankan tugasnya.

Dalam beberapa aspek, sebagaimana nanti akan dijelaskan dalam bab-bab berikutnya, melalui pendirian KICAC (Korea Independent Commission Against Corruption), Korea telah berusaha untuk membentuk institusi semacam itu pada tahun 2002. Dengan segala kondisi yang ada, KICAC pernah menjadi lembaga anti korupsi yang independen dan disegani. Akan tetapi, atas tekanan *chaebol* dan politisi, peran dan eksistensi KICAC telah dilemahkan, dikebiri dan bahkan pada akhirnya dibubarkan (digabung dengan ACRC) pada tahun 2008. Walaupun ACRC juga telah berusaha menerapkan beberapa strategi seperti mengkoordinasi kebijakan-kebijakan antikorupsi negara, memonitor dan mendeteksi praktik korupsi, melindungi dan memberi penghargaan kepada *whistle blowers* (pengadu), melaksanakan *voluntary partnerships*, serta mempromosikan gerakan melawan korupsi secara aktif sehingga cecara garis besar, pada dasarnya ACRC dapat dikatakan telah memenuhi "standar kinerja" seperti yang disebutkan di atas, akan tetapi dalam hal transparansi di mana ACRC tidak memberikan penjelasan detail mengenai kasus-kasus yang terjadi. Baik dalam laporan tahunan maupun dalam tab 'News & Publication' yang dicantumkan di laman resminya, ACRC lebih menekankan pada laporan statistik dan menitikberatkan pada kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam upaya pemberantasan korupsi.

Menurut konsep ini, transparansi pada dasarnya turut memberikan pengaruh kepada efektivitas institusi antikorupsi.

<sup>10</sup> Lihat East Asia Forum online, ibid

<sup>11</sup> Kelima ketentuan itu adalah: (1) institusi tersebut harus independen; (2) aksi dan tindakan dari institusi tersebut harus transparan dan dapat diakses oleh warga negara; (3) tindakan institusi didasarkan pada tujuan dan insiatif jangka panjang; (4) kebijakan institusi haruslah koheren, dalam arti mengikuti desain keseluruhan dan didasarkan pada pemahaman yang baik tentang asal-usul masalah; dan (5) institusi harus berjuang untuk kredibilitas atau penerimanan oleh publik dan menghindari politisasi.



Ketiadaan transparansi di ACRC menyebabkan proses penanganan kasus-kasus yang ada menjadi “kabur”, dan bukannya tidak mungkin proses penyelidikan yang ada berat sebelah. Selain itu, ACRC juga memiliki kelemahan lain yaitu tidak adanya wewenang untuk melakukan penyelidikan langsung, sehingga gerak-geriknya terbatas dan bergantung pada lembaga penyelidikan lain, seperti kepolisian, yang kemudian berujung pada lambatnya proses penanganan kasus. Kedua kekurangan ini secara tidak langsung dapat dikatakan menurunkan tingkat efektivitas ACRC.

## 2.2.2 Latihan

1. Jelaskan beberapa faktor yang mempengaruhi tingginya tingkat korupsi di Korea Selatan!
2. Jelaskan keistimewaan yang diterima oleh Chaebol dari pemerintah Korea Selatan!
3. Bagaimanakah ajaran Konfusius mempengaruhi tradisi bangsa Korea Selatan?
4. Bagaimanakah pengaruh kartel elit terhadap tingkat korupsi di Korea Selatan?
5. Jelaskan kendala lembaga anti korupsi Korea Selatan dalam upaya pemberantasan korupsi!

## 2.4. PENUTUP

### 2.4.1. Tes Formatif

Pilihlah salah satu jawaban yang benar, dengan memberikan tanda silang!

1. Beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat korupsi di Korea Selatan, antara lain:
  - A. Pengaruh akulturasi budaya dan globalisasi.
  - B. Perubahan orientasi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.
  - C. Kebijakan konsentrasi penguasaan asset ekonomi oleh kelompok kecil pengusaha.

- D. Institusi negara bertindak kurang dominan dalam urusan ekonomi.

2. Empat isu utama keistimewaan yang diberikan pemerintah terhadap para chaebol kecuali:

- A. Pengaruh kendali keluarga dalam manajemen perusahaan.
- B. Interafiliasi perusahaan pendukung.
- C. Konsentrasi kepemilikan.
- D. Monopoli usaha.

3. Ajaran inti konfusius berisi tentang:

- A. Kekuasaan ekonomi, penghormatan hierarki, dan bakti kepada keluarga.
- B. Perikemanusiaan, kelayakan, sopan santun, kebijaksanaan, dan harmoni sosial.
- C. Pembetulan nama, tuntunan penyelenggaraan pemerintah, dan pengembangan diri.
- D. Perhatian terhadap harmoni sosial, kesetaraan, dan kelayakan generasi.

4. Faktor-faktor penyebab korupsi di Korea Selatan secara lebih rinci sebagai berikut, kecuali:

- A. Keadilan sosial dan distribusi kekayaan.
- B. Pemusatan penguasaan asset ekonomi.
- C. Pengaruh budaya.
- D. Pengaruh pergeseran orientasi pemerintah.

5. Lima ketentuan efektivitas standar kinerja kebijakan anti korupsi antara lain:

- A. Institusi tersebut harus bisa diakses oleh warga negara.
- B. Aksi dan tindakan institusi harus transparan.
- C. Kebijakan institusi berdifat inkoheren.
- D. Tindakan institusi berdasarkan goal-oriented.



## 2.3.2 Umpan Balik

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar ini.

Tingkat penguasaan =  $\frac{\text{Jumlah jawaban yang benar}}{\text{Jumlah soal}} \times 100\%$

5

Arti tingkat penguasaan:

90 – 100%	: baik sekali
80 – 89%	: baik
70 – 79%	: cukup
< 70%	: kurang

## 2.3.3 Tindak lanjut

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar selanjutnya. Bagus! Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar ini, terutama bagian yang belum dikuasai.

## 2.3.4. Rangkuman

Walaupun penyebab korupsi berkaitan dengan spektrum variable yang luas, pemerintah memainkan peran yang sangat penting dalam menjelaskan hal yang berkaitan dengan persoalan korupsi, seperti penyebab, konsekuensi, ruang lingkup, dan pengendaliannya. Sejak awal abad ke-20, peran pemerintah di beberapa negara telah lebih luas dan lebih kuat karena pemerintah diyakini berfungsi sebagai korektor kegagalan pasar terkait dengan asimetri informasi, pasar non-kompetitif, masalah kelemahan dalam hubungan principal-agent, eksternalitas, atau efisiensi penggunaan barang publik.

Tingginya tingkat korupsi di Korea Selatan terjadi karena beberapa faktor yang mempengaruhi, diantaranya adalah karena kebijakan konsentrasi penguasaan aset ekonomi oleh kelompok kecil pengusaha, pengaruh budaya dan konteks sosial, perubahan orientasi dalam pembangunan, terjadinya ketidakadilan dan kesenjangan sosial, ketidaksempurnaan sistem dan tradisi demokrasi, serta dominannya peran institusi negara. Kelima hal tersebut menjadi medium untuk menyokong faktor utama terjadinya tindak korupsi di Korea Selatan, yaitu adanya ambisi dan kepentingan pembangunan ekonomi yang ingin dicapai oleh pemerintah.

## 2.3.5 Kunci Jawaban tes formatif

Nomor 1 jawaban C, Kebijakan konsentrasi penguasaan aset ekonomi oleh kelompok kecil pengusaha.

Nomor 2 jawaban D, Monopoli usaha.

Nomor 3 jawaban B, Perikemamusiaan, kelayakan, sopan santun, kebijaksanaan, dan harmoni sosial.

Nomor 4 jawaban A, Keadilan sosial dan distribusi kekayaan.

Nomor 5 jawaban B, Aksi dan tindakan institusi harus transparan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Buzo, A. *The Making of Modern Korea*. New York: Routledge (2007).
- Cohen, M. S, 'Anti-Corruption Enforcement In Korea: Is an Old Law Coming of Age?', *Compliance*, November 4 (2013).
- Jong-Sung, 'Embedded Autonomy or Crony Capitalism? Explaining Corruption in South Korea, Relative to Taiwan and the Philippines, Focusing on the Role of Land Reform and Industrial Policy', Paper prepared for delivery at the Annual Meeting of the American Political Science Association, Washington, DC, September 1-4, (2005)



Kang, D.C. *Crony Capitalism: Corruption and Development in South Korea and The Philippines*, Cambridge: Cambridge University Press (2002).

Setiyono, B., Adnan, M. dan Astrika, L. Laporan Penelitian Perbandingan Gerakan Anti Korupsi di Korea Selatan dan Indonesia (2015)

Slezialk, T. *The Role of Confucianism in Contemporary South Korean Society. Orientalis*, Vol. LXVI, Z. 1, pp. 27-46. (2013).

## SENARAI

asimetri	: dua hal (benda, entitas, masalah) yang tidak sama persis
<i>free standing agencies</i>	: lembaga yang mandiri dari intervensi dan pengaruh pihak lain
<i>gift-giving</i>	: budaya suatu masyarakat yang menyukai tradisi saling memberi
<i>go-public</i>	: proses pelepasan saham perusahaan dari kepemilikan pribadi ke kepemilikan masyarakat umum
kapitalisme feminim	: istilah untuk menggambarkan praktek kapitalisme yang menekankan pada kompromi antar pengusaha dan menghindari persaingan bebas
kapitalisme maskulin	: istilah untuk menggambarkan praktek kapitalisme yang menekankan pada persaingan bebas
otoritas	: hak untuk memerintah atau mengatur

## BAB V POKOK BAHASAN

### PERANG TERHADAP KORUPSI DI KOREA

#### 1. SUB POKOK BAHASAN:

Perkembangan dan Peran Badan Anti Korupsi Korea Selatan dalam memberantas Korupsi.

#### 1.1. PENDAHULUAN

##### 1.1.2. Deskripsi Singkat

Sub Pokok Bahasan ini mengantarkan mahasiswa untuk mengetahui bagaimana peran aktor negara, khususnya Badan Anti Korupsi, dalam memerangi korupsi. Akan dibahas di bab ini, bagaimana aktor kunci tersebut dalam berperang dan bagaimana mereka berevolusi dalam peran tersebut.

#### 1.2.2. Relevansi

Mahasiswa Ilmu Pemerintahan perlu mampu menjelaskan dinamika perang melawan korupsi yang dilakukan aktor negara di Korea Selatan sebagai bahan perbandingan dengan apa yang dilakukan di Indonesia.

#### 1.2.3 Kompetensi

##### a. Standar Kompetensi

Setelah mengikuti pokok bahasan ini selama satu pertemuan maka diharapkan mahasiswa akan dapat menjelaskan:

1. Latarbelakang sejarah lahirnya Badan Anti Korupsi di Korea Selatan,
2. Jenis peranan yang dilakukan,
3. Keberhasilan yang diraih, dan



4. Berbagai hambatan yang mengurangi efektifitas dalam pemberantasan korupsi

b. Kompetensi Dasar

1. Kemampuan menjelaskan inisiasi pembentukan badan anti korupsi yang terjadi di Korea Selatan.
2. Kemampuan menerangkan perkembangan organisasi dan peran Badan Anti Korupsi di Korea Selatan.
3. Kemampuan membandingkan badan serupa di Indonesia.

## 1.2. PENYAJIAN

### 1.2.1. Uraian dan contoh

Sebagaimana telah disebutkan diatas, perang melawan korupsi yang dilakukan oleh Korea Selatan sebenarnya sudah dimulai sejak awal dekade '90 an, yaitu saat lahirnya Presidential Emergency Order yang mengatur transparansi transaksi keuangan. Sejak itu lahir lah berbagai aturan dan UU yang dibuat untuk memperkuat basis pemberantasan korupsi. Namun demikian, usaha serius baru tampak pada awal abad ke 21 dengan diberlakukannya UU no 6494 tentang Anti Korupsi yang disahkan pada tanggal 24 Juli 2001. Dengan dasar UU ini kemudian pada bulan Januari 2002 lahir lah sebuah komisi independen yang bernama Korean Independent Commission Against Corruption (KICAC).

Komisi independen ini lebih berorientasi pada pencegahan tindak pidana korupsi sehingga kewenangan yang dimiliki hanya sampai tahap investigasi. Menariknya, komisi ini pada tahun 2008 dibubarkan dan kemudian dilebur dengan Ombudsman Nasional Korea dan Komisi Banding Administratif menjadi sebuah komisi yang sampai saat ini dikenal yaitu Anti Corruption and Civil Rights Commission (ACRC). Peleburan ini terkait dengan pandangan Presiden Korsel saat itu Lee Myung Bak yang menganggap bahwa keberadaan

KICAC mengganggu hubungan antara pemerintah dan pengusaha. Peleburan ini juga dimaksudkan untuk menghindari konflik kepentingan dan persaingan antar lembaga.

Peran komisi independen hasil integrasi tiga lembaga ini (ACRC) tampaknya berbanding terbalik dengan UU baru Anti Korupsi yang baru saja disahkan dan akan mulai berlaku pada Oktober tahun 2016. Dengan UU baru ini, penuntut tidak memerlukan lagi alat bukti antara swap dan imbal balik yang diterima penyuaap. Memang tanpa ketentuan semacam ini banyak kasus di masa lalu yang gagal didakwakan karena ketiadaan alat bukti.<sup>12</sup> Walaupun komisi ini tidak memiliki kewenangan yang signifikan seperti halnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia. Akan tetapi secara pelan tapi pasti, penindakan terhadap kejahatan korupsi terus berlanjut dan konflik kepentingan berupa perebutan lahan penindakan diantara penegak hukum dapat dihindari. Apakah kondisi ini dapat diterapkan di Indonesia? Berikut akan kami jelaskan bagaimanakah kiprah "KPK" nya Korea Selatan dalam memberantas korupsi di negeri ginseng tersebut.

### Komisi Independen Anti Korupsi Korea (KICAC)

Korea Independent Commission Against Corruption (KICAC) didirikan pada 25 Januari 2002 sesuai dengan amanat Undang-undang Anti-Korupsi, yang disahkan pada Juli 2001. Lembaga ini adalah produk dari pemerintahan demokratis pasca jatuhnya rezim militer.

Organisasi KICAC terdiri dari sembilan komisaris termasuk ketua, sedangkan anggota terdiri dari masing-masing tiga orang yang direkomendasikan oleh Majelis Nasional (DPR), tiga oleh Ketua Mahkamah Agung dan tiga oleh Presiden. Masing-masing bertugas dalam jangka waktu tiga tahun dan dapat diangkat kembali untuk jangka waktu tambahan. Sekretariat KICAC, yang bertugas

<sup>12</sup> The Wall Street Journal, Thursday, June 25, 2015



melaksanakan administrasi organisasi, terdiri dari Kantor Perencanaan Kebijakan, Humas & Biro Kejasama, Laporan Biro Pemeriksaan dan 15 Divisi. Pada saat itu, ada sekitar 139 karyawan yang bekerja di KICAC.

KICAC adalah badan independen dan netral yang diberi tugas untuk pencegahan korupsi dan bertanggung jawab untuk menangani laporan korupsi, mengembangkan perbaikan kelembagaan, merumuskan dan menilai kebijakan anti-korupsi, serta melakukan kegiatan pendidikan dan promosi.

Pada masa awal berdirinya, setiap orang dapat melaporkan perilaku korupsi pejabat publik ke KICAC dengan menggunakan beragam saluran nyaman melalui pusat laporan korupsi 24 jam: melalui telepon, fax, pos atau melalui website KICAC (<http://www.kicac.go.kr/>). KICAC melindungi keselamatan informan dan kerahasiaan informasi yang mereka berikan, mengambil tindakan disiplin terhadap retaliators dan memberikan imbalan keuangan untuk pelapor.

Prioritas reformasi yang ditetapkan oleh KICAC untuk tahun-tahun pertama operasinya berfokus pada penguatan peran, mengintegrasikan dan mengkoordinasikan inisiatif anti-korupsi di tingkat nasional. Untuk itu, lembaga ini menyusun rencana khusus untuk membangun mekanisme investigasi terhadap kantor-kantor pejabat tinggi, mengikuti instruksi dari Presiden. KICAC juga menetapkan penilaian dampak anti-korupsi, yang diluncurkan pada tahun 2005, yang bertujuan untuk menguji apakah ada kemungkinan dampak perubahan dari kebijakan-kebijakan anti korupsi yang dijalankan.

Pada tahun 2005 tersebut, KICAC meluncurkan program "Clean City Project" dari program *outreach* ke tingkat lokal, dimana KICAC menandatangani pakta bilateral dengan 10 pemerintah daerah, di mana pemerintah daerah akan mengambil langkah-langkah reformasi otonom, sampai akhir 2005, untuk menangkal korupsi. Secara horisontal, program KICAC juga menjangkau ke sektor swasta, dengan membuat upaya bersama dengan perusahaan publik untuk

mempromosikan etika bisnis, yang meliputi membuat persiapan untuk penciptaan kantor Etika Bisnis Pusat, yang akan memberikan informasi, melakukan penelitian dan mengoperasikan program pendidikan pada etika bisnis.

KICAC juga menjadi pemain aktif dalam perjuangan internasional melawan korupsi. Pada bulan November 2002, KICAC menjadi tuan rumah Forum pertama Badan Anti-Korupsi (ACA) untuk berbagi pengalaman dan praktek dalam memerangi korupsi dengan lembaga anti-korupsi di Australia, Hong Kong, Malaysia dan Singapura. Selain itu, KICAC juga mendorong dan memperkenalkan isu korupsi supaya menjadi agenda APEC. Mereka mengusulkan pembentukan Rapat Kelompok Ahli Anti-Korupsi pada tahun 2005, ketika APEC 2005 diadakan di Korea. Forum APEC kemudian berkenan membahas cara-cara untuk mewujudkan Deklarasi 2003, dimana para pemimpin APEC berjanji untuk meningkatkan transparansi dan memerangi korupsi.

Berikutnya setelah menandatangani Konvensi PBB Melawan Korupsi di Mrida, Meksiko Desember 2005, KICAC juga membuat persiapan yang diperlukan untuk meratifikasi dan pelaksanaan Konvensi bersama-sama dengan departemen pemerintah terkait. Dengan upaya terkoordinasi dengan instansi pemantauan lainnya, KICAC kemudian terlibat dalam memproduksi kebijakan, mendampingi kegiatan preventif seperti peningkatan kapasitas kelembagaan dan program pendidikan, bekerja untuk mendeteksi korupsi dengan proses investigasi dan menerima keluhan dari masyarakat, dan juga mengevaluasi kegiatan anti-korupsi pada level nasional.

Dalam sejarahnya, KICAC mampu meraih beberapa capaian yang cukup mengesankan, diantaranya adalah:

- Melakukan *asessment* (penilaian) dampak korupsi (April 2006): hasil dari penilaian ini menggeser paradigma penanganan korupsi dari metode anti-korupsi berbasis penalti / hukuman ke arah analisis faktor-faktor yang menyebabkan korupsi supaya bisa dicegah. Setelah melalui penilaian yang sistematis



ini, KICAC mengidentifikasi 358 faktor korupsi yang menjadi dasar pembuatan 113 proposal program anti korupsi pemerintah pada Desember 2006.

- KICAC bersama aliansi dengan instansi lain anti-korupsi di seluruh dunia, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Indonesia dan UNDP, KICAC melakukan program dua tahun untuk memberikan dukungan teknis kepada empat negara Asia-Pasifik dalam pertempuran melawan korupsi di negara masing-masing. Salah satu hasil dari program ini adalah menjadikan lembaga anti-korupsi sebagai loudspeaker bagi warga untuk berbicara menentang pejabat pemerintah yang diduga korup. Di Korea sendiri, KCAC mendorong lahirnya The Citizen Recall Act (Mei 2006), yang memungkinkan pemilih untuk menggulingkan gubernur, walikota atau anggota dewan lokal yang terlibat dalam praktek-praktek korupsi, kelalaian tugas, atau penyalahgunaan kekuasaan.

- Mendorong lahirnya *Blind Trust System* (November 2005), dimana rekening keuangan pejabat senior yang dimasukkan ke dalam rekening trust bank, yang membantu mereka melaksanakan tugas publik secara transparan dengan mencegah insentif keuangan yang mungkin kompromi layanan etika publik mereka.

- Mendorong perluasan Pakta Korea pada Anti-Korupsi dan Transparansi atau *Korean Pact on Anti-Corruption and Transparency* (K-PACT) untuk mendapatkan dukungan dari 10 instansi pemerintah pusat, 18 perusahaan publik, dan 11 pemerintah daerah pada Desember 2006.

Sungguhpun menorehkan berbagai prestasi yang gemilang, akan tetapi KICAC seringkali terlibat dalam persaingan dengan berbagai lembaga penegak hukum lain, yang menyebabkan kekhawatiran di kalangan pemerintah dan anggota Majelis Nasional. Oleh karena itu, KICAC akhirnya diintegrasikan ke dalam lembaga yang lebih besar

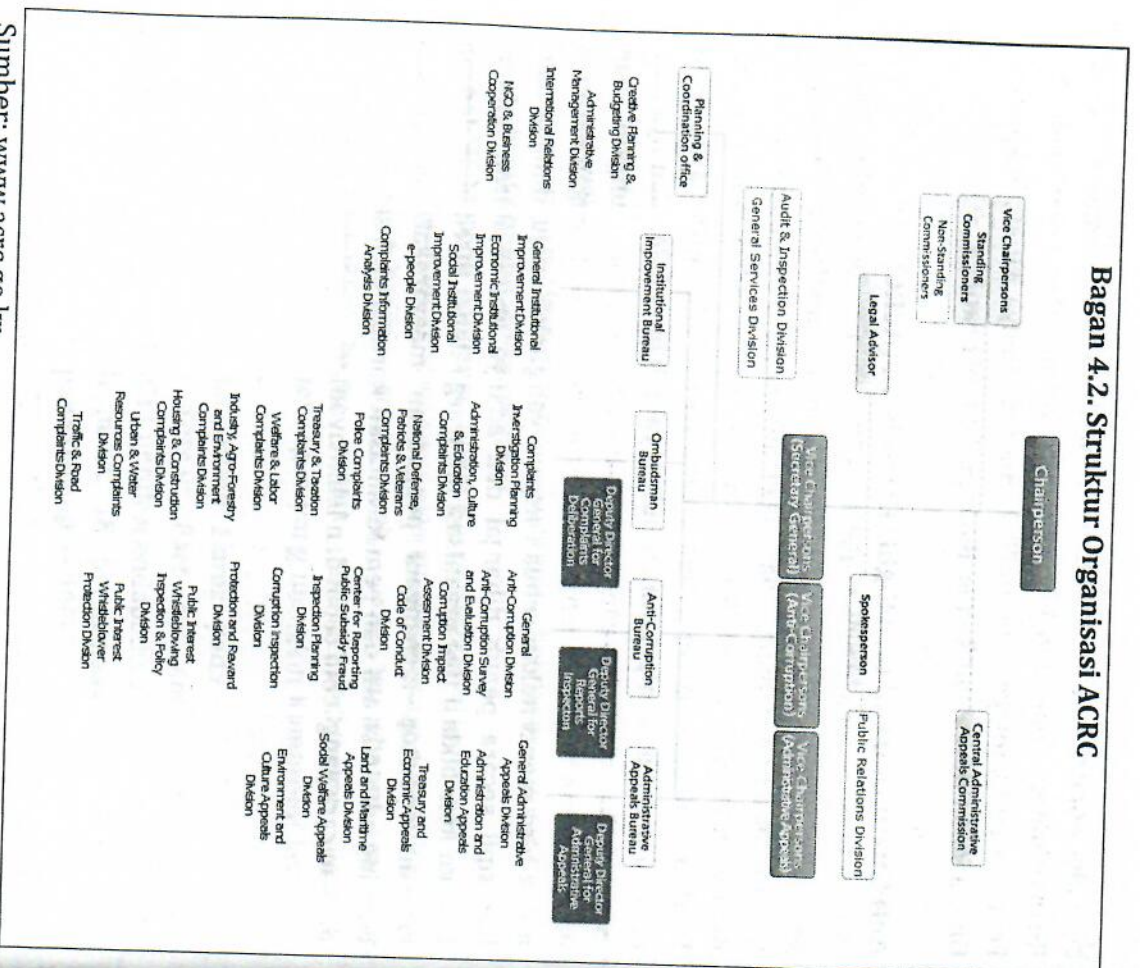
bernama Komisi Anti-Korupsi dan Hak Sipil (Anti-Corruption and Civil Rights Commission--ACRC), yang secara resmi diluncurkan pada 29 Februari 2008. Integrasi ini melibatkan tidak hanya KICAC, tetapi juga Ombudsman Korea dan Komisi Banding Administratif.

### **Anti Corruption and Civil Rights Commission (ACRC)**

Sebagaimana disebut diatas, ACRC secara resmi diluncurkan pada tanggal 29 Februari 2008. Komisi ini merupakan lembaga anti korupsi hasil penggabungan dari tiga lembaga yaitu Ombudsman Korea, Komisi Independen Anti Korupsi, dan Komisi Banding Administrasi. Dengan menggabungkan ketiga organisasi ini, diharapkan akan lebih mampu memberikan pelayanan publik yang lebih efisien dan nyaman, menyelesaikan keluhan/aduan masyarakat sesegera mungkin, dan menyebarkan budaya integritas keseluruhan masyarakat dengan harapan untuk bisa menciptakan sebuah negara yang lebih maju, dimana hak-hak sipil secara penuh dihargai dan adanya aturan-aturan hukum. Dengan konsolidasi tiga organisasi ini, warga dapat disediakan dengan layanan one-stop menangani pengaduan masyarakat, mengajukan banding administratif dan pemberantasan korupsi oleh satu organisasi dengan cara yang lebih cepat dan lebih nyaman.



**Bagan 4.2. Struktur Organisasi ACRC**



Sumber: [www.acrc.go.kr](http://www.acrc.go.kr)

Atas perintah undang-undang, ACRC menetapkan tiga arah kebijakan dalam menjalankan tugasnya:

- Mengembangkan sistem yang efisien dan terpadu yang dirancang untuk memperkuat hak-hak sipil,
  - Meningkatkan hukum dan peraturan yang ditujukan untuk melindungi hak dan kepentingan penduduk,
  - Menumbuhkan rasa integritas di masyarakat.
- Tiap tahun ACRC memiliki fokus kerja yang berbeda-beda, akan tetapi pada dasarnya ACRC memiliki 4 fungsi utama, untuk memastikan terwujudnya masyarakat Korea yang bebas korupsi, yaitu:

### 1. Mengatasi Keluhan / Pengaduan Warga

ACRC menerima dan menangani "pengaduan masyarakat," yang merujuk pada keluhan umum seperti opini, saran, dan usulan dari masyarakat kepada pemerintah, terutama kasus-kasus di mana ada ketidaknyamanan, keluhan, atau pelanggaran hak rakyat terjadi karena praktek-praktek ilegal, tidak adil, atau pasif (termasuk *factum* dan *nonfeasance*) dari organisasi publik. Ketika penyelidikan kasus menyimpulkan bahwa ada alasan yang mungkin untuk mengenali bahwa praktek-praktek organisasi publik diteliti adalah ilegal atau tidak adil, rekomendasi perbaikan dibuat untuk organisasi administrasi terkait.

Pelayanan ini pada intinya memberikan kepastian bahwa setiap warga negara harus dapat dilayani sebaik mungkin oleh penyelenggara dan aparaturnya. ACRC bertugas untuk memastikan bahwa warga negara akan mendapatkan pelayanan yang terbaik, tercepat, terramah, dan termurah dalam setiap urusan yang mereka dapatkan. Oleh karena itu, ACRC mendetailkan pelayanan ini dalam beberapa segmen, termasuk diantaranya adalah:

### Investigasi dan Penanganan Keluhan

Anggota masyarakat dapat secara pribadi mengajukan atau menunjuk perwakilan, melalui kunjungan pribadi, mengirim surat, melalui internet maupun fax. Masalah yang dikeluhkan misalnya,



pelanggaran hak, keluhan tiadanya system dan kebijakan yang tepat. Penyelidik ACRC dapat meminta kepada badan-badan administratif Negara untuk memberikan penjelasan tentang masalah yang dikeluhkan oleh masyarakat dan memberika dokumen dan bahan-bahan yang relevan.

Setelah selesaianya investigasi, komisi membahas pandangan/opini dan bukti yang diajukan masyarakat. Berdasarkan hasil musyawarah, rekomendasi diberikan untuk langkah-langkah perbaikan atau membuat pernyataan resmi atas keluhan atau memberikan pandangan hukum yang relevan, kelembagaan dan kebijakan-kebijakan.

ACRC harus segera memberitahukan kepada pihak terkait tentang keputusannya berkaitan dengan keluhan tersebut dan memastikan adanya respon yang sungguh-sungguh terhadapnya. Dan badan-badan pemerintah yang terkait harus melaporkan bagaimana mereka menindaklanjuti rekomendasi ACRC tidak lebih dari 30 hari sejak diterimanya pemberitahuan dari ACRC. Apabila dipandang ada alasan yang dapat digunakan untuk menolak keputusan ACRC, maka badan pemerintah tersebut dapat mengajukan pertimbangan ulang.

### ***Pengaduan elektronik (e-People)***

Proses administrasi pada hari-hari belakangan ini menjadi semakin kompleks dan beragam. Untuk alasan itulah, warga negara yang ingin mengajukan keluhan, menghadapi kesulitan menemukan badan-daban pemerintah yang bisa dikontak, maka *e-people* melalui website ([www.epeople.go.id](http://www.epeople.go.id)) adalah sebuah system untuk mengatasi keluhan warga secara online di tingkat pemerintah pusat dan daerah, untuk memberikan kemudahan akses pada pelayanan publik.

*E-people* yang merupakan portal pemerintah ini, menghubungkan seluruh organisasi pemerintahan, seluruh badan otonomi lokal, seluruh kantor pendidikan, lembaga tinggi negara, misi diplomatik di luar negeri, dan administrasi pengadilan Nasional.

Dengan menggunakan *e-people* penduduk maupun orang asing yang hidup di Korea dapat mengirimkan keluhan, proposal, pelaporan korupsi dan banding administrasi yang berkaitan dengan pelayanan pemerintah.

Keluhan-keluhan yang diterima diteruskan kepada badan-badan yang sesuai yang secara efektif dapat mengatasi keluhan tersebut. Dalam hal dibutuhkan investigasi lebih lanjut, ACRC secara langsung menangani dan memproses keluhan tersebut.

Melalui system online ini masyarakat juga dapat ikut berpartisipasi memberikan saran dan dalam pengambilan keputusan untuk menjamin pemerintahan yang kreatif. Pada awalnya di tahun 2008, layanan hanya menggunakan tiga bahasa (English, Chinese, Japanese). Sekarang ini, di tahun 2016, *e-people* ini sudah bisa diakses dalam 12 bahasa asing sehingga memudahkan bagi warga negara asing yang sedang berada di Korea untuk mengakses dan memanfaatkan pelayanannya.

### ***Call Center Pemerintahan Terpadu (#110)***

Mereka yang ingin menerima informasi tentang pelayanan warga yang diberikan oleh badan pemerintahan tertentu, dapat menghubungi nomor telepon 110, yang merupakan *call center* pemerintahan terpadu. Dengan pelayanan ini selama berada di Korea, ACRC menjamin kenyamanan maksimum bagi masyarakat yang menggunakan pelayanan publik dan terbuka bagi halaman baru dalam memberikan pelayanan yang berorientasi pada pelanggan. Call center ini juga terhubung dengan badan-badan penting baik di tingkat pusat maupun daerah.

Salah satu kekuatan call center ini adalah "bimbingan" bukan hanya system jawaban otomatis atau *automatic response system* (ARS) yang dapat memberikan respon kepada penelepon. Isu-isu yang sederhana diproses oleh konselor, sedangkan untuk masalah yang lebih rumit, misalnya menyangkut urusan pajak, pekerja dan kesejahteraan,



diserahkan kepada para ahli di call center atau langsung ditangani oleh badan yang berwenang.

Ketika pengadu terhubung dengan badan yang berwenang, detail keluhan ditransfer secara elektronik, sehingga mengurangi pengulangan keluhan. Sebagai tambahan system telepon balik atau "*call back system*" juga diperkenalkan untuk memberikan jawaban tunda kepada pengadu karena masalah yang diadukan mungkin tidak mendesak atau membutuhkan jawab segera.

## 2. Menangani Korupsi

ACRC merupakan lembaga sentral dalam melakukan usaha pemberantasan korupsi. Ia bertanggung jawab untuk merancang, menginisiasi, mengkoordinasi, dan mengevaluasi program pemberantasan korupsi yang harus dilakukan oleh semua instansi pemerintah di Korea Selatan. Beberapa tugas pokok yang dikerjakan ACRC meliputi antara lain:

### *Koordinasi Nasional Kebijakan Anti Korupsi*

ACRC merumuskan kebijakan nasional anti korupsi untuk dilaksanakan di semua tingkatan pemerintahan. Lembaga tersebut juga mendiskusikan, mengkoordinasikan rancangan langkah-langkah pemerintah secara luas untuk mencegah korupsi dalam jangka panjang. Setiap tahun ACRC membuat Pedoman Kebijakan Anti Korupsi dan mengadakan briefing dengan jawatan inspektorat di organisasi publik termasuk lembaga pemerintah pusat pemerintah daerah dan lembaga-lembaga pelayanan publik lainnya.

ACRC memberikan penilaian tingkatan integritas organisasi sektor publik setiap tahun dengan melakukan survey kepada penduduk yang memiliki pengalaman pertama berhubungan dengan pelayanan publik. Komisi ini juga mengevaluasi inisiatif anti korupsi yang dilakukan oleh organisasi pemerintah. Tujuan utama penilaian ini adalah untuk mendorong organisasi publik agar secara sukarela ikut

berusaha mengatasi korupsi. Penilaian terhadap instansi dilakukan dengan tiga indikator: (1) kemauan dan upaya untuk mencegah korupsi; (2) prestasi aktual dalam pencegahan korupsi; dan (3) kerjasama dalam mempromosikan anti-korupsi.

### *Mendorong Kemitraan Sukarela*

ACRC melaksanakan berbagai program kesadaran publik untuk mendorong kerjasama dan partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan integritas nasional. Untuk menambah kesadaran risiko korupsi dan system yang berkesinambungan integritas nasional, ACRC fokus pada pendidikan anti korupsi bagi pelayan publik dan siswa. ACRC bekerjasama dengan LSM, universitas, dan sekolah untuk memobilisasi rakyat dalam berpartisipasi memberantas korupsi.

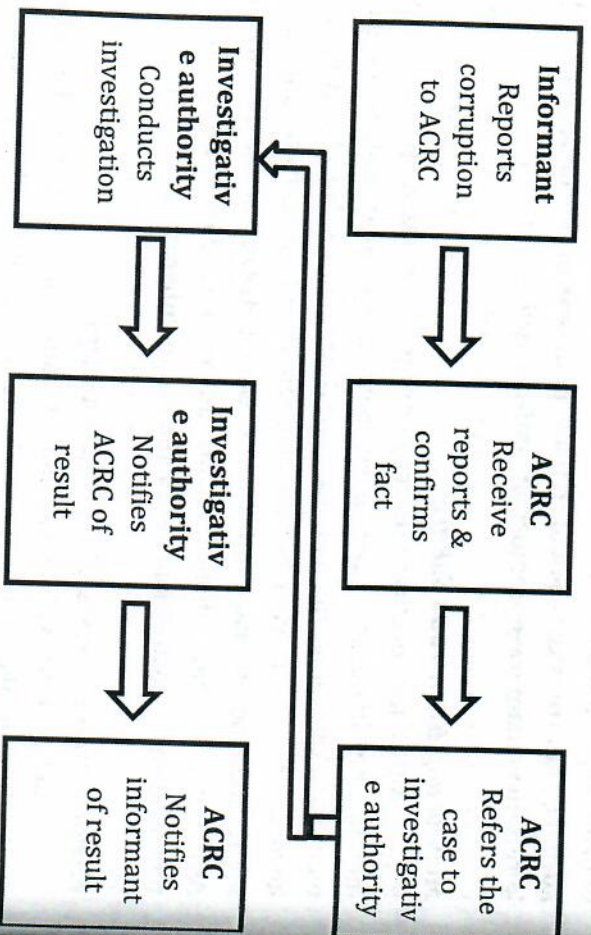
### *Mengawasi dan Mendeteksi Praktik Korupsi*

Sebagai upaya pencegahan, setiap orang dapat melaporkan terjadinya tindakan korupsi kepada ACRC. Hal yang dilaporkan disini tidak hanya kasus korupsi yang sudah terjadi, akan tetapi bahkan meliputi paksaan atau bujukan untuk melakukan korupsi, mengusulkan atau menyarankan seseorang untuk melakukannya, atau memaksa untuk menyembunyikan tindakan korupsi.

ACRC membuat *standard operation procedure* (SOP) untuk menciptakan mekanisme pelaporan yang efisien. Berikut bagan yang menjelaskan bagaimana laporan korupsi diproses oleh ACRC:



**Bagan. 4.1. Alur penanganan Laporan Masyarakat ke ACRC**



Sumber: [www.acrc.go.kr](http://www.acrc.go.kr)

### ***Perlindungan kepentingan publik Whistleblower (peniup peluit)***

ACRC berusaha menciptakan ketenangan hidup masyarakat dan iklim sosial dan etik yang terbuka dengan melindungi dan mendukung orang yang melaporkan terjadinya pelanggaran terhadap kepentingan publik.

Yang dimaksud dengan pelanggaran kepentingan publik disini adalah tindakan melanggar terhadap kesehatan dan keamanan publik, lingkungan, kepentingan konsumen, persaingan jujur, dan lain-lain. Terkait dengan hal tersebut, UU tentang Perlindungan terhadap kepentingan publik mengatur agar siapapun dilarang untuk membuka atau menyebarkan informasi apapun kepada pihak ketiga tentang

kepentingan *Whistleblower* (WB) atau fakta lain yang dapat menggambarkan identitas WB.

ACRC dapat meminta kepolisian untuk mengambil langkah-langkah perlindungan kepada WB dan juga keluarganya apabila dia menghadapi atau tampaknya akan menghadapi ancaman serius bagi keselamatan hidupnya. WB juga bisa meminta ACRC mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memperbaiki status, mengembalikan posisinya yang hilang atau diberhentikan jabatannya atau kerugian apapun yang diakibatkan dari tindakannya membocorkan suatu perkara.

ACRC bahkan akan memberikan hadiah kepada WB sampai senilai \$ 1 juta, jika akibat dari tindakannya dapat meningkatkan pendapatan negara baik lokal maupun nasional. Demikian pula ACRC akan memberikan dana bantuan apabila terjadi kerusakan, beban biaya akibat perawatan medis, relokasi tempat tinggal, litigasi, hilangnya penghasilan atau alasan yang lain kepada WB.

### **3. Penanganan Gugatan Banding Administrasi**

Sistem banding administrasi adalah sebuah mekanisme yang memungkinkan seseorang yang hak-hak hukumnya dilanggar atau mengalami bentuk ketidakadilan oleh badan-badan administrasi pemerintah, mengajukan gugatan terhadap badan-badan tersebut.

Dibandingkan dengan pengadilan ke pengadilan, maka skema pelayanan ini lebih cepat, sederhana dan gratis. Pengugat dapat menyerahkan banding kepada badan pemerintah yang dimaksud atau kepada ACRC melalui surat elektronik/email, internet ([www.simpang.go.kr](http://www.simpang.go.kr)) atau langsung mendatangi kantor tersebut.

Dalam tempo 10 hari jawaban terhadap materi banding sudah harus diberikan kepada pengugat. Selanjutnya ACRC akan sepenuhnya menguji pernyataan kedua pihak dan mengatur waktu untuk berunding. Setelah perundingan, apakah kasus yang dibandingkan itu tidak sah atau tidak adil, maka dibuatlah catatan hasil kepada baik



badan pemerintah yang dimaksud maupun pengugat. Contoh-contoh banding administratif, diantaranya seperti:

1. pencabutan surat izin mengemudi
2. penolakan terhadap nominasi kesejahteraan sebagai patriot dan veteran
3. menolak untuk membuka informasi administrasi

ACRC membuat rekomendasi untuk membantu badan-badan pemerintah mengubah aturan dan lembaga yang ambigu dan rawan korupsi, dan mengawasi rekomendasi yang diberikan oleh ACRC tersebut.

Penilaian dampak korupsi adalah mekanisme analitis dirancang untuk mengidentifikasi dan menghilangkan korupsi. Dengan system ini, setiap usulan yang diberlakukan dan amandeman begitu pula dengan aturan-aturan yang ada, diuji faktor apa saja yang dapat memberikan andil bagi terjadinya korupsi.

Untuk meningkatkan etika di lingkungan pelayanan publik, ACRC mengesahkan kode etik untuk pejabat publik pada bulan februari 2013 sebagai petunjuk etika bagi pejabat publik. Berdasarkan model kode etik ini, badan-badan penyelenggara pemerintah dapat membuat kode etika nya sendiri. ACRC mengawasi pemenuhan dengan dan menyelidiki pelanggaran kode etik ini oleh pekerja pemerintah.

ACRC melaksanakan berbagai program kesadaran publik untuk mendorong kerjasama masyarakat dan partisipasi dalam meningkatkan integritas nasional. Untuk meningkatkan kesadaran tentang resiko korupsi dan membentuk system integritas nasional yang berkelanjutan. ACRC fokus pada pendidikan anti korupsi bagi pegawai negeri dan siswa.

ACRC berkomunikasi dan bekerjasama melalui pembentukan jaringan dengan organisasi publik dan organisasi swasta untuk memajukan kerjasama *public-private* melawan korupsi. Lembaga ini memberikan dukungan keuangan bagi kelompok-kelompok sipil untuk menyebarluaskan budaya integritas. ACRC juga menyelenggarakan

berbagai program pendidikan bagi pemenuhan pegawai dan mengirimkan kecederungan terkini dan praktik terbaik pada manajemen etik di Korea maupun di luar untuk mendorong korupsi manajemen etika.

### **Perbandingan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)**

Dibandingkan dengan KPK, ACRC memang tidak memiliki kewenangan kecuali pada upaya pencegahan korupsi, mengkoordinir, serta mensupervisi lembaga penegak hukum yang lain. Sedangkan KPK, kewenangan yang dimilikinya mulai dari hilir sampai hulu dalam pemberantasan masalah korupsi.

KPK dibentuk pada tahun 2003 berdasarkan amanat UU No 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Fungsi utama komisi ini adalah untuk mengatasi, menanggulangi dan memberantas korupsi di Indonesia. Dengan fungsi ini maka tugas utama yang harus dilakukan oleh KPK antara lain, koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan korupsi. Supervisi instansi yang berwenang melakukan pemberantasan korupsi. Melakukan tindakan pencegahan tindak pidana korupsi dan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Negara.

### **Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPK**

Hampir mirip dengan ACRC, KPK memiliki beberapa tugas pokok dalam upaya memerangi korupsi. Diantara tugas tersebut adalah:

1. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi,
2. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi,
3. Melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi,



4. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi, dan
5. Melakukan monitor terhadap penyelenggara pemerintahan Negara (Pasal 6 ayat UU No 30 tahun 2002)

### **Kewenangan KPK**

Dibandingkan ACRC, kewenangan KPK sebenarnya jauh lebih luas dan kuat, yakni:

1. Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi
2. Menetapkan system pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi
3. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait
4. Melaksanakan dengan pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan
5. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi (pasal 7 UU No 30 tahun 2002)

Secara lebih tegas, KPK bahkan memiliki kewenangan lebih lanjut dalam rangka melaksanakan tugas supervisi yaitu berwenang melakukan pengawasan, penelitian atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik. Termasuk dalam kewenangan ini adalah mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan. Kepolisian atau kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan dalam waktu 14 hari kerja sejak tanggal diterimanya permintaan KPK.

Pengambilalihan penyidikan ini dapat dilakukan oleh KPK dengan alasan:

1. Laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti;
2. Proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan
3. Penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya
4. Penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi
5. Hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif, dan legislatif atau
6. Keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu KPK juga memiliki kewenangan untuk:

1. Melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan
2. Memerintahkan instansi terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri
3. Meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa

Dan beberapa kewenangan lainnya yang sangat signifikan. Sehingga jika dibandingkan dengan mitranya di Korsel, KPK sesungguhnya lebih powerful. Kewenangan KPK hampir berbanding lurus dengan KICAC yang telah dihapuskan di Korea.

Walaupun demikian, ACRC juga memiliki beberapa poin keunggulan tersendiri dibandingkan KPK. Beberapa diantara keunggulan tersebut adalah:

1. ACRC memiliki ranah pelayanan yang lebih luas dan komprehensif. Sebagai badan yang merupakan gabungan dari



Ombudsman Korea, Komisi Independen Anti Korupsi, dan Komisi Banding Administrasi, ACRC memiliki kedudukan sentral untuk mengupayakan praktek pemerintahan yang bersih dari korupsi, pelayanan publik yang baik, dan penyelenggaraan administrasi yang pro-kepada kepentingan publik. Bagaimanapun, upaya pemberantasan korupsi bukanlah semata-mata untuk kepentingan penghilangan kasus korupsi semata, atau menghukum para pelakunya, lebih dari itu, perang melawan korupsi sesungguhnya adalah upaya perwujudan praktek pemerintahan yang pro kepada kepentingan masyarakat, dan pemberian pelayanan yang terbaik kepada publik. Dengan demikian, upaya untuk mencapai hal tersebut harus dilakukan secara terkoordinir dan komprehensif, untuk menghindari adanya gap, tumpang tindih, dan persaingan tidak sehat antar lembaga yang diberikan mandat oleh negara.

2. Posisi ACRC sebagai lembaga koordinator yang tidak melaksanakan tindakan langsung, memungkinkan mereka bekerja dengan fokus pada tataran strategis dengan membuat kebijakan, desain program, supervisi dan koordinasi dengan lembaga pemerintah lain, khususnya lembaga penegak hukum. Hal ini meminimalkan potensi yang menyebabkan mereka dapat terjerumus dalam permainan politik praktis, atau menjadi alat kekuasaan/kelompok tertentu dalam melumpuhkan kelompok lawan.

3. Selain itu, ACRC juga dapat menghindarkan diri dari persaingan yang diametris dengan lembaga penegak hukum lain seperti kepolisian dan kejaksaan. Sebagaimana kita ketahui, persaingan dengan lembaga penegak hukum lain seringkali menyebabkan energi, waktu, dan perhatian lembaga anti korupsi semacam KPK di Indonesia menjadi tersita secara signifikan. Akibatnya strategi pemberantasan korupsi secara keseluruhan menjadi terganggu.

## 1.2.2 Latihan

1. Jelaskan latarbelakang lahirnya Korean Independent Commission Against Corruption (KICAC)!
2. Mengapa KICAC dilebur dengan dua lembaga lain dan berevolusi menjadi ACRC?
3. Apa sajakah tugas dan fungsi ACRC dalam pemberantasan korupsi di Korea?
4. Terangkan proses pengaduan masyarakat ke ACRC!
5. Coba anda terangkan perbandingan pokok tentang kewenangan yang dimiliki ACRC dengan KPK RI!

## 1.3. PENUTUP

### 1.3.1. Tes Formatif

Pilihlah salah satu jawaban yang benar, dengan memberikan tanda silang!

1. Organisasi KICAC terdiri dari sembilan komisaris yang terdiri dari masing-masing tiga orang yang direkomendasikan oleh lembaga berikut, kecuali:
  - A. Panglima Angkatan Bersenjata
  - B. Majelis Nasional (DPR)
  - C. Ketua Mahkamah Agung
  - D. Presiden
2. KICAC dilebur menjadi ACRC pada tahun:
  - A. 2001
  - B. 2008
  - C. 2005
  - D. 2010
3. Kewenangan KICAC meliputi beberapa tindakan, kecuali:
  - A. Investigasi.
  - B. Koordinasi dengan lembaga lain.



- C. Melakukan penuntutan.
- D. Membuat guideline pemberantasan korupsi.

4. ACRC adalah lembaga yang menggantikan KICAC dalam memberantas korupsi. Lembaga tersebut adalah gabungan dari beberapa lembaga, kecuali:

- A. Ombudsman Korea
- B. KICAC
- C. Komisi Banding Administrasi
- D. Kejaksaan

5. Terkait perlindungan *Whistleblower* (WB), UU tentang Perlindungan terhadap kepentingan publik Korea mengatur agar:

- A. siapapun dilarang untuk membuka atau menyebarkan informasi apapun kepada pihak ketiga
- B. ACRC dapat memberikan reward kepada WB yang membantu pengembalian kekayaan negara
- C. ACRC dapat memerintahkan polisi untuk memberikan perlindungan kepada WB
- D. a, b, dan c benar semua

### 2.3.2 Umpan Balik

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar ini.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah jawaban yang benar}}{\text{Jumlah soal}} \times 100\%$$

5

Arti tingkat penguasaan:

90 - 100%	: baik sekali
80 - 89%	: baik
70 - 79%	: cukup
< 70%	: kurang

### 2.3.3 Tindak lanjut

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar selanjutnya. Bagus! Jika masih dibawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar ini, terutama bagian yang belum dikuasai.

### 2.3.4. Rangkuman

Usaha pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh Korea Selatan dilakukan secara evolutif sejak tahun 90an. Usaha tersebut menjadi semakin serius sejak UU no 6494 tentang Anti Korupsi yang disahkan pada tanggal 24 Juli 2001, yang melahirkan sebuah komisi independen yang bernama Korean Independent Commission Against Corruption (KICAC).

Lembaga ini lebih berorientasi pada pencegahan tindak pidana korupsi sehingga kewenangan yang dimiliki hanya sampai tahap investigasi, sehingga dibubarkan dan kemudian dilebur dengan Ombudsman Nasional Korea dan Komisi Banding Administratif menjadi menjadi sebuah komisi yang sampai saat ini dikenal yaitu Anti Corruption and Civil Rights Commission (ACRC). Peleburan ini dimaksudkan untuk menghindari konflik kepentingan dan persaingan antar lembaga.

Dibandingkan dengan KPK, ACRC memiliki kewenangan yang lebih sempit, yakni pada upaya pencegahan korupsi, mengkoordinir, serta mensupervisi lembaga penegak hukum yang lain. Sedangkan KPK, memiliki kewenangan yang mulai dari hulu dan hilir dalam pemberantasan masalah korupsi.



## 2.3.6 Kunci jawaban tes formatif

- Nomor 1 jawaban A, Panglima Angkatan Bersenjata, Komisioner ACRC terdiri dari anggota yang direkomendasi oleh Majelis Nasional (DPR), Ketua Mahkamah Agung, dan Presiden.
- Nomor 2 jawaban B, 2008.
- Nomor 3 jawaban C, Penuntutan. KICAC memiliki mandat di bidang pencegahan, tidak sampai represi/penuntutan.
- Nomor 4 jawaban D, Kejaksaan. ACRC adalah gabungan dari Ombudsman Korea, KICAC, dan Komisi Banding Administrasi.
- Nomor 5 jawaban D, Semua jawaban benar.

### DAFTAR PUSTAKA

- ACRC Korea, *Annual Report*, (2014; 2015)
- Berendsen, B., Ton Dietz, Henk Schulte Nordholt and Roel van der Veen (eds) 2013. *Asian Tigers, African Lions: Comparing the Development Performance of Southeast Asia and Africa*. Leiden: Brill,
- Eigen, P. 2004 'Chasing Corruption Around the World: How Civil Society Strengthen Global Governance', Lecture transcript for Arthur and Frank Payne Distinguished Lecture Stanford Institute for International Studies, 4 October 2004 [Online, accessed 21 February 2008, at [www.iis-db.stanford.edu/evnts/3922/Eigen10'04.pdf](http://www.iis-db.stanford.edu/evnts/3922/Eigen10'04.pdf)]
- Gill, G. 2000. *The Dynamics of Democratization: Elites, Civil Society and the Transition Process*, London: MacMillan Press.
- Harvie- C. And Hyun-Hoon Lee. 2003. 'Export-led industrialisation and growth: Korea's economic miracle, 1962-1989' *Australian Economic History Review* 43 (3), 256-286.

- Jip, Choi Jang. 1989. *Structure Change of Contemporary South Korean Politics*, Seoul: Ggachi
- Jip, Choi Jang 1993. *Theory of South Korean Democracy*, Seoul: Hangil.
- Johnston, M. (ed.) 2005. *Civil Society and Corruption: Mobilizing for Reform*, Lanham, MD: University Press of America.
- Joo, Sungsoo, Seonmi Lee, Youngjae, Jo. 2006. *The Explosion of CSOs and Citizen Participation: An Assessment of Civil Society in South Korea*, Seoul: Hanyang University.
- World Bank. 2000. *Anti-corruption in Transition: A Contribution to the Policy Debate*, Washington DC: World Bank.

### SENARAI

- komisi : lembaga negara yang diberikan tugas untuk melaksanakan mandat tertentu
- outreach : lingkup jangkauan suatu kegiatan atau kewenangan
- website : alamat yang ada di internet untuk memuat informasi tertentu



## 2. SUB POKOK BAHASAN:

### Peran OMS Korea dalam Melawan Korupsi

#### 2.1. PENDAHULUAN

##### 2.1.1. Deskripsi Singkat

Sub Pokok Bahasan ini mengantarkan mahasiswa untuk mengetahui bagaimana peran aktor non-negara, dalam hal ini organisasi masyarakat sipil (OMS). Akan dibahas di bab ini, bagaimana aktor kunci tersebut dalam berpartisipasi melawan korupsi dan bagaimana mereka berevolusi dalam peran tersebut.

##### 2.1.2. Relevansi

Mahasiswa Ilmu Pemerintahan perlu mampu menjelaskan dinamika perang melawan korupsi yang dilakukan aktor non-negara di Korea Selatan sebagai bahan perbandingan dengan apa yang dilakukan di Indonesia.

#### 2.2.3. Kompetensi

##### a. Standar Kompetensi

Setelah mengikuti pokok bahasan ini selama satu pertemuan maka diharapkan mahasiswa akan dapat menjelaskan:

1. Latarbelakang sejarah munculnya perlawanan masyarakat sipil terhadap korupsi,
2. Jenis peranan yang dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil,
3. Capaian yang diraih, dan
4. Berbagai hambatan yang mengurangi efektivitas dalam pemberantasan korupsi.

##### b. Kompetensi Dasar

1. Kemampuan menjelaskan munculnya gerakan masyarakat sipil dalam melawan korupsi.

2. Kemampuan menerangkan perkembangan organisasi dan peran OMS di Korea Selatan.
3. Kemampuan membandingkan dan menganalisis gerakan serupa di Indonesia.

#### 2.2. PENYAJIAN

##### 2.2.1. Uraian dan contoh

Korea Selatan mengakhiri periode panjang kepemimpinan diktatornya dan kembali menegakkan demokrasi dengan menyelenggarakan pemilihan presiden secara langsung dan bebas pada tahun 1987. Salah satu tantangan yang harus dihadapi setelah kembali pada sistem demokrasi adalah tentang bagaimana pemerintah memberantas korupsi yang terlanjur mengakar dan menyebar secara luas dalam sistem pemerintahannya. Alasan utama dari kedua kudeta militer yang dilakukan pada tahun 1961 dan 1980 adalah untuk memberantas korupsi. Namun sesungguhnya, aksi tersebut hanya terbukti menjadi contoh dari teorema bahwa kekuasaan yang mutlak menghasilkan korupsi yang mutlak pula.

Meskipun Korea Selatan dipuji sebagai "Keajaiban di Sungai Han" sampai krisis ekonomi tahun 1997 dan dampak buruk korupsi pada pembangunan ekonomi di Korea Selatan diabaikan oleh sebagian besar pengamat Barat, sebagian besar warga Korea Selatan sangat menyadari keseriusan masalah korupsi yang melanda negaranya. Itu sebabnya setiap calon presiden yang maju dalam bursa pencalonan berjanji untuk melakukan perlawanan terhadap korupsi, baik ia dipilih secara demokratis melalui pemilu maupun merebut kekuasaan dengan kudeta militer.

Presiden Park Chung-Hee (1961-1979) yang merupakan pemimpin kudeta militer pada tahun 1961 menegaskan bahwa kediktatoran atau gaya demokrasi Korea Selatan, diperlukan untuk mengejar kemajuan ekonomi yang pesat. Namun, ketiadaan pemilihan



umum secara bebas dan ketiadaan sistem *checks and balances* antara kekuatan administratif, legislatif, dan yudikatif mengakibatkan makin maraknya aksi korupsi yang terjadi. Selain itu, kontrol Negara terhadap pasar menyebabkan kolusi antara kekuatan politik dengan elit ekonomi dan menjadi sumber korupsi. Presiden Chun Doo-Hwan (1981-1987) dan Roh Tae-Woo (1988-1992), keduanya adalah pemimpin kudeta militer pada tahun 1980, menggunakan kepemimpinan mereka sebagai sarana mengumpulkan kekayaan pribadi dengan mengambil sebagian besar swap dan kontribusi informal lainnya.

Ketika pelajar dan mahasiswa secara masif memimpin pergerakan demokrasi pada tahun 1970-an dan tahun 1980-an, kelompok masyarakat secara mendasar memimpin gerakan anti korupsi pada tahun 1990-an. Mengapa pergerakan kelompok masyarakat ini memainkan peran yang sangat penting dalam pemberantasan korupsi di tahun 1990-an? Pertama, pemerintah dan partai-partai politik tidak memiliki baik kemauan politik maupun strategi dan program anti korupsi yang efektif. Dan hampir semua politisi belum bebas dari praktik-praktik lama pembiayaan dana politik yang korup. Jadi, tekanan masyarakat sipil, proposal reformasi hukum dan kebijakan, serta monitoring dari pemerintah telah sangat diperlukan. Kedua, sementara untuk melawan kediktatoran diperlukan keberanian dihukum penjara, untuk melakukan gerakan anti korupsi diperlukan kemampuan analisis kebijakan dan monitoring. Langkah yang harus ditempuh untuk mencapai reformasi di bawah pemerintahan yang demokratis tentu saja sangat berbeda dari menggulingkan pemerintahan yang diktator.

Walaupun secara umum proses munculnya organisasi dan gerakan *civil society* di Korea memiliki beberapa kesamaan dengan Indonesia, akan tetapi ada beberapa aspek penting yang menjadi pembeda diantara kedua negara. OMS di Korea secara umum memiliki pola keanggotaan (*membership*) yang kuat. Mereka pada umumnya berhasil membentuk organisasi yang independen karena kemandirian

dalam hal pendanaan yang dihasilkan dari iuran anggota. Mereka umumnya dapat membentuk gerakan yang efektif karena mereka tidak memiliki ketergantungan terhadap pihak ketiga, dan mencukupi kebutuhan pendanaan dari biaya keanggotaan. People's Solidarity for Participatory Democracy (PSPD), misalnya, pada saat ini memiliki 13,154 anggota aktif yang membayar iuran setiap bulan, sehingga bisa mengumpulkan miliran pendapatan setiap tahunnya, yang memberikan kontribusi signifikan terhadap total pendapatan organisasi. Serupa dengan PSPD, anggota Citizen's Coalition for Economic Justice (CCEJ) mencapai sekitar 25.000 orang aktif yang membayar iuran tetap setiap bulan.

Kekuatan CSO Korea juga terletak pada kemampuan mereka untuk merumuskan gerakan yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota mereka. PSPD misalnya, berfokus pada kegiatan demokratisasi ekonomi terhadap praktek kapitalisme kroni dan meminta pengaturan ekonomi yang lebih adil. Sementara CCEJ berfokus pada isu kegiatan kepemilikan tanah yang adil, sehingga tidak ada kecurangan dan mafia praktik dalam pengadaan tanah untuk proyek pembangunan dan perumahan.

OMS di Indonesia, walaupun mereka memiliki peran-peran yang signifikan, akan tetapi, kemandirian mereka dalam pertanyaan yang serius. Mereka pada umumnya tidak memiliki sistem keanggotaan yang kuat dan hanya mengandalkan pendanaan dari donor (utamanya donor luar negeri). Hal ini menyebabkan OMS Indonesia cenderung bergerak mirip sebagai pelaksana proyek donor daripada bergerak sebagai organisasi yang murni memperjuangkan kepentingan anggota (masyarakat).

Dimensi lain dari kekuatan gerakan OMS Korea berkaitan dengan penerapan strategi damai dan anti kekerasan. OMS seperti Koalisi Masyarakat untuk Keadilan Ekonomi (CCEJ) dan Solidaritas Masyarakat untuk Demokrasi Partisipatif (PSPD) terbentuk berbeda dari kelompok gerakan anti kediktatoran sebelumnya, meskipun



banyak dari pemimpin-pemimpin yang terlibat dalam gerakan demokratisasi di masa lalu. Mereka mengadopsi pergerakan yang legal dan damai. Demonstrasi dan aksi mereka selalu berjalan damai dan tidak melanggar hukum. Selain itu, mereka selalu mengusulkan rekomendasi kebijakan alternatif ketika mengkritik kebijakan pemerintah.

Kekuatan OMS Korea juga terletak pada kemampuan mereka membentuk jaringan solidaritas gerakan yang solid. Kelompok masyarakat memperluas jaringan dengan cepat dan pengaruh politik mereka tumbuh dengan cepat pula di tahun 1990-an. Implikasinya, istilah "gerakan masyarakat" menjadi sangat populer di kalangan masyarakat. Kelompok lingkungan, kelompok perempuan, kelompok konsumen dan banyak kelompok-kelompok sipil lainnya di bidang reformasi politik, hak asasi manusia, reunifikasi dan anti korupsi tumbuh secara eksponen. Mereka sering membuat kelompok koalisi setiap kali ada masalah nasional yang penting, dan kelompok anti korupsi dapat meminta dukungan dan solidaritas dari kelompok-kelompok sipil di daerah lain. Pada tahun 1999, misalnya, beberapa OMS mendirikan Pusat Kongres Watch (CCW—*Congress Center Watch*) untuk memantau kegiatan kongres. Setelah mengaudit anggota parlemen, anggota CCW menerbitkan laporan berkala, di mana mereka mengumumkan anggota kongres terburuk. Para anggota Kongres marah akan aktifitas itu dan berupaya untuk melarang LSM menghadiri rapat publik di ruang kongres. Aktivis yang tetap berusaha untuk menghadiri sesi di ruang, diseret keluar. Banyak LSM perlawanan di bawah panggung politik menyadari bahwa hampir siasia untuk mengawasi kongres setelah banyak anggota kongres yang korup dan membawa telah terpilih. Mereka sepakat untuk terlibat dalam upaya sebagian besar bersama yang secara langsung menantang kandidat politik dalam pemilihan umum mendatang 2000. Aktivis LSM sebagian mendukung gagasan kampanye hitam terhadap politisi korup, di mana

mereka akan menargetkan calon tertentu yang secara eksplisit korup, dan menginformasikan publik supaya tidak memilih mereka.

Pada 13 April 2000, Korea Selatan mengadakan pemilihan umum ke-16, dengan prospek demokrasi yang tidak cerah bagi banyak orang. Banyak yang meramalkan bahwa pemilihan baru tidak akan menyimpang jauh dari adegan pemilu terakhir pada tahun 1996, yang sebagian besar bermasalah. Meskipun transformasi demokratis sejak tahun 1987, beberapa pemain lama dan figur otoritas militer masih bercokol pada kekuasaan mereka melalui cara-cara yang tidak demokratis. Korupsi adalah praktek yang biasa ditemui dalam pemilu. Selain itu beberapa issue juga dimainkan dalam dan mendorong sentimen kedaerahan yang ada yang sebagian besar telah dibentuk oleh kediktatoran militer masa lalu. Terdapat juga fenomena umum dimana terdapat banyak calon anggota parlemen yang memiliki hubungan dengan rezim diktator militer masa lalu dan / atau kekuasaan diperoleh melalui penganiayaan terhadap aktifs gerakan demokrasi untuk mempertahankan kekuasaan mereka.

Organisasi non-pemerintah (LSM) dari Korea Selatan bertindak aktif dalam peran mereka untuk mendelegitimasi dan mengecaman tokoh anti-demokrasi seperti sebelumnya, tetapi gerakan mereka tidak menimbulkan ancaman yang kuat untuk politisi tersebut. Pada tahun 1996, sejumlah LSM memprakarsai Pemilu Adil. Kampanye, dipusatkan untuk mencari nama-nama politisi korup dan memberitahu Jaksa Agung tentang keberadaan politisi tersebut dan mendesak Jaksa Agung untuk bertindak. Akan tetapi, justru para politisi yang terlibat dalam tindak pidana korupsi tetap memenangkan pemilihan.

Pada 12 Januari 2000, sejumlah OMS di Korea Selatan membentuk gerakan Solidaritas Pemilihan Umum (GES—General Election Solidarity), yang terdiri dari 412 LSM, yang dibentuk di bawah kepemimpinan empat organisasi utama, yakni People Solidarity for Participative Democracy (PSPD), Korean Federation of Environmental Movement (KFEM), Korea Women Movement United (KWMU), dan



Green Korea United (GKU). GES dibentuk berdasarkan perjanjian dimana LSM akan mengangkat diri dan bekerja sama untuk membuat daftar hitam politisi yang busuk dan mengadakan serangkaian kampanye publik untuk melawan mereka di seluruh wilayah Korea sampai pemilihan umum.

Tantangan pertama yang dihadapi GES adalah Hukum Pemilu, UU no. 87/1999, yang melarang "intervensi aktor ketiga" dalam kampanye pemilu. OMS tidak diperbolehkan untuk "campur tangan" dalam kampanye, karena menurut logika UU, mereka akan merugikan prinsip netralitas pemilu. Menjawab tantangan ini, GES menyatakan bahwa UU 87 tidak konstitusional karena menganggap keterlibatan sipil sebagai yang melanggar hukum. GES juga membentuk dua kelompok kepemimpinan cadangan apabila kepemimpinan yang ada ditangkap. Setelah perencanaan yang matang dan menyeluruh, GES memperkenalkan keadaan publik tentang prinsip pembangkangan sipil dan secara terbuka menyatakan bahwa mereka akan bertindak di bawah prinsip itu.

Kebanyakan anggota Kongres mengancam GES sebagai penjahat, mengganggu aturan hukum dan mengeksploitasi populisme untuk menguntungkan mereka. Tapi Presiden Korea Kim Dae Jung mendukung upaya GES dan mengatur dukungan kelembagaan untuk itu. Hasilnya adalah hukum direformasi sebelum pemilihan umum, dan juga tidak aktivis GES ditangkap karena melanggar Undang-Undang 87.

GES membagi Kampanye daftar hitam menjadi dua fase yang terpisah: satu menargetkan proses nominasi kandidat di partai politik (Kampanye Nakchon), dan yang lainnya menargetkan pada mempengaruhi pemilihan untuk tidak memilih calon yang ada dalam daftar hitam (Kampanye Nakson). Dalam Kampanye Nakchon, GES mendapatkan 102 calon anggota parlemen yang ditentukan nominasinya. Dalam proses penyusunan daftar hitam, ada tujuh kriteria yang diterapkan. Di antara mereka, tiga kriteria yang paling penting

adalah: keterlibatan dalam korupsi, pelanggaran hukum pemilu, terlibat dalam kegiatan anti-HAM dan kegiatan anti-konstitusional. Blacklist dirilis dalam dua konferensi, pada tanggal 24 Januari dan 2 Februari 2000. Setelah daftar hitam (*black-list*) dirilis, GES mendapatkan penentangan lebih keras dari tokoh masyarakat yang kuat. Jong Pil Kim, salah satu politisi paling terkenal dari daftar tersebut mengklaim bahwa GES memiliki hubungan dengan Presiden, dan bermain untuk menguntungkanannya. Moon Yul Lee, penulis sayap kanan yang terkenal mengklaim bahwa kampanye hitam adalah versi kontemporer dari Pengawal Merah Mao Zedong. Kelompok kepentingan yang dibentuk oleh politisi juga bergegas ke markas GES di Seoul dan mengadakan demo untuk politisi mereka yang dianggap tidak bersalah.

Namun dukungan terhadap GES tumbuh di kalangan masyarakat setelah diadakan debat televisi (dengan penonton 12%) pada tanggal 27 Januari, antara anggota GES dan anggota kongres. Hasil dari perdebatan yang panas tersebut adalah jelas yakni kemenangan GES. Anggota Kongres tidak bisa memberikan bukti yang jelas mengenai apa yang mereka tuduhkan terhadap GES sebagai komunis atau sekutu politik Presiden Dae Jung Kim. Pada tanggal 30 Januari GES mulai aksi unjuk rasa besar-besaran pertama di enam kota besar di Korea Selatan. Di Seoul saja, lebih dari tiga ribu aktivis, selebriti, dan warga berkumpul di sekitar Stasiun Subway Seoul untuk mendukung kampanye. Mereka mengadakan demo besar "Kartu kuning", simbol peringatan terhadap politisi korup, dan berbaris di seluruh pusat Seoul.

Pada tanggal 19 Februari, rally besar kedua diadakan, dan menjadi fenomena nasional yang lebih progresif dibanding dengan aksi serupa yang pertama, karena dilakukan di 41 kota di seluruh negeri. Rally kedua berlangsung sangat meriah dan diwarnai dengan pertunjukan budaya dan seni yang diatur oleh seniman yang "menyumbangkan" upaya tersebut. Lagu yang paling terkenal di reli itu penyanyi selebriti Jung Hyun Lee "Perubahan", lirik yang sedikit diubah



agar sesuai dengan tema kampanye, menyatakan perubahan milenium di panggung politik.

Akibat protes tersebut, pada hari penetapan nominasi partai, yang berlangsung pada tanggal 20 Februari, 48 dari 102 calon yang ada dalam blacklist gagal dicalonkan. Tidak puas dengan hasil tersebut, GES terjun ke propaganda penarikan calon lain yang masih dinominasikan. Mereka mengajukan banding terhadap partai, pengadilan, dan KPU untuk menarik politisi daftar hitam, tapi sebagian besar gagal. Tidak seorang politisi pun yang diperintah oleh pengadilan untuk ditarik nominasinya. Akan tetapi, meskipun keputusan pengadilan mengecewakan, GES mencoba untuk berusaha terus-menerus dengan menggelar reli ketiga pada 1 Maret—yang merupakan hari libur nasional untuk merayakan protes besar nasional terhadap dominasi imperialis Jepang di tahun 1919. GES mengumumkan "Deklarasi Kemerdekaan Pilih", mengklaim bahwa mereka akan berhasil dalam semang 1 Maret untuk menyelamatkan negara dan mengadakan reformasi struktur politik. Tiga puluh tiga wakil--simbolis dari 33 pemimpin nasional yang menyatakan kemerdekaan pada tahun 1919—yang meliputi semua bagian dari masyarakat berkumpul di Taman Tapgol, Seoul, dan meminta dukungan warga terhadap kampanye anti politisi busuk. Lima hari berkemah dilakukan dengan mendirikan tenda besar bernama "Plaza Reformasi Politik" di depan Katedral Myongdong (yang terkenal pada saat gerakan demokrasi pada 1980-an) untuk menarik lebih banyak pendukung dan sumbangan.

GES juga memulai kampanye tur secara mobile menggunakan bus secara nasional pada tanggal 20 Maret untuk mendorong daerah, selain Seoul, ikut bergerak. Mereka menyadari bahwa gerakan yang terlalu terpusat di Seoul tidak akan mampu menarik perhatian secara nasional. Selain itu, mereka juga memutuskan untuk memulai "Gerakan Janji Pilih" yang mentargetkan 2.270.000 Pilih dengan mengumpulkan tanda tangan mereka untuk mewakili "janji" agar memilih dengan tanggung jawab kedaulatan dan teliti. Jumlah pilih

yang mereka datangi itu adalah merupakan tokoh simbolik, yang berjumlah 10.000 pilih di 227 desa. Tur berlangsung seminggu, dan GES pada akhirnya tidak berhasil dan hanya mendapatkan 336.226 "janji pilih".

Pada tanggal 3 April GES mulai resmi Nakson Kampanye—kampanye untuk mengalahkan calon yang dinominasikan dalam pemilihan umum. GES mengumumkan 22 kandidat dalam daftar hitam tambahan. Jumlah calon hitam berjumlah 86 orang. Selain itu, di antara 86 kandidat keseluruhan, 22 orang politisi diidentifikasi sebagai "kepala besar" yang dijadikan sebagai target utama GES ini. Salah satu strategi umum yang digunakan GES adalah "satu-satu" atau "*man-to-man strategy*". Ini ditetapkan masing-masing dari 22 target utama untuk setiap pemimpin yang paling menonjol dari GES. Setiap pemimpin dan kelompoknya akan mencapai distrik kandidat yang ditugaskan, dan reli di seluruh wilayah. Para pegiat diadakan kartu merah saat ini, secara simbolis memanggil mengakhiri pencalonan.

Berbagai lawan menghadapi kampanye GES dengan cara yang berbeda dan kadang-kadang kekerasan. Beberapa melancarkan telur dan tepung; yang lain mengirim aktifis GES dengan ancaman. Salah satu momen paling dramatis dalam konfrontasi terjadi di Bucheon. Jung Yul Moon, ibu dari calon Sah Chul Lee, dan pendukung calon mendekati kelompok aktivis. Memegang billboard yang mengatakan, "Dear Presiden Dae Jung Kim dan anggota GES, saya mohon Anda untuk berhenti membunuh anak saya," katanya sambil terisak di depan Won Soon Park, salah satu pemimpin terkemuka dari kampanye tersebut.

Strategi lain yang membuat Kampanye Nakson sebagian besar sukses adalah prinsip non-kekerasan yang secara resmi dinyatakan pada tanggal 6 April. Kampanye ini sebagian besar dilakukan tanpa kekerasan, dimana para anggota GES disuruh ketat mematuhi sepuluh prinsip tanpa kekerasan yang GES telah tentukan. Prinsip-prinsip termasuk: menurunkan nada suara di tengah-tengah keributan, mengenakan "topeng perdamaian" ketika berhadapan dengan



kekerasan, dan bernapas tiga kali sebelum berbicara di depan lawan. Prinsip-prinsip tersebut dipraktekan oleh anggota GES dan meningkatkan simpati dan sentimen publik, dimana ketika mereka tampil di TV, mereka bahkan dipukuli oleh lawan.

Kampanye terhadap politik hitam itu sebagian besar juga dilakukan secara online. GES mendirikan website [www.angkokorea.org](http://www.angkokorea.org) pada tanggal 12 Januari 2000. Ini merupakan langkah belum pernah terjadi sebelumnya untuk LSM untuk menarik partisipasi komunitas online. Komunitas online, menyambut keterlibatan langsung mereka untuk pertama kalinya, dengan aktif menulis pendapat mereka tentang kampanye dan mendukung GES. Bahkan beberapa orang yang teknis menggunakan keahlian mereka dalam ilmu komputer untuk melacak alamat IP dari para politik hitam dan menulis pernyataan ofensif di papan komputer mereka.

Kegiatan kampanye memuncak pada tanggal 8 April 2000, ketika GES melakukan kegiatan berjudul "Go, Play, Vote, Change Festival". Dalam kegiatan itu, lebih dari 50.000 warga berkumpul dan melambatkan tangan mereka yang memegang kartu merah. Kampanye ini berakhir pada hari umum pemilu tanggal 13 April. Pada saat itu, LSM yang bergabung GES berjumlah lebih dari 800. Untuk penutupan kampanye yang dramatis, peserta festival berkumpul di Myong Dong. Won Soon Park, salah satu pemimpin dari GES, memberikan pidato penutupan, berjudul "*I Have a Dream*", di mana ia menyatakan bahwa ia bernimpi suatu masyarakat yang memiliki politik yang jelas dan transparan. Pada 14 April, hasil pemilu mengungkapkan bahwa kampanye itu sebagian besar berhasil, 59 dari 86 calon politik blacklist hilang. Selain itu, 15 orang dari 22 target utama juga hilang.

Atas berbagai macam kegiatan tersebut, OMS di Korea memiliki reputasi yang sangat baik, dampak politik yang cukup kuat, dan dengan demikian memiliki potensi besar untuk mengimbangi dominasi negara. CSO Korea telah menjadi aktor yang sangat progresif dan sukses di Korea meskipun memiliki tantangan dan lingkungan hukum dan politik

yang relatif kurang baik. Skala dan lingkup kegiatan masyarakat sipil mengesankan terutama bila dibandingkan dengan negara-negara ekonomi yang lebih maju di Asia Timur seperti Taiwan dan Jepang. Namun, tingkat kecanggihan dan OMS masih di bawah tingkat Eropa dan Amerika Utara. Hal ini tercermin dalam CIVICUS Civil Society Indeks yang memberikan nilai tinggi untuk OMS Korea dibandingkan dengan negara-negara lain, terutama dalam kategori tujuan dan nilai-nilai serta untuk dampak kegiatan mereka. Mereka mencapai nilai yang tinggi meskipun kekurangan serius dalam aspek struktur dan lingkungan sosial, politik, dan hukum di tempat mereka beroperasi (Joo, Lee, and Jo 2006)

Dalam laporan CIVICUS, OMS Korea mendapat nilai tertinggi dalam aspek "value" (mendapat skor 2,3 dari 3) yang mengevaluasi tujuan dan sarana OMS dari sudut pandang normatif. CSO Korea relatif demokratis dan transparan dan mencoba untuk mencapai tujuan terpenuhi mereka sebagian besar melalui kegiatan non-kekerasan. Walaupun terdapat praktik anti-demokrasi dan korupsi di OMS, dan juga ada ada perbedaan besar antara OMS satu dengan lainnya, tapi setidaknya peringkat OMS lebih penting menguntungkan bila dibandingkan dengan kelompok masyarakat lainnya. Survei menunjukkan kepercayaan yang tinggi Korea ada di OMS dibandingkan dengan lembaga-lembaga negara dan bisnis (Joo, Lee, and Jo 2006: 7).

OMS di Korea menerima nilai tertinggi kedua di aspek "dampak" (dengan nilai skor umum 1,9 dari 3). Itu berarti CSO Korea relatif berhasil dalam pekerjaan mereka. Lebih khusus, mereka sangat sukses dalam mempengaruhi keputusan dan kebijakan politik. Dalam penelitian CIVICUS, Korea menerima skor 2,5 dari 3 di dalam sub-kategori ini. Ini adalah salah satu nilai tertinggi dalam setiap sub-kategori dan luar biasa dalam perbandingan internasional. OMS Korea telah menjadi faktor penting dan menentukan dalam sistem politik sehingga pemerintah tidak bisa mengabaikan mereka. OMS berhasil berinteraksi dan berkomunikasi dengan "resmi" lembaga-lembaga



politik baik melalui kerjasama atau melalui konfrontasi yang menghasilkan perubahan-perubahan signifikan bagi kepentingan publik.

### **Jenis-jenis Peran OMS dalam Melawan Korupsi di Korea Selatan**

Banyak peran telah dilakukan oleh OMS di Korea untuk memberantas Korupsi. Sama dengan rekan mereka di Indonesia, peran tersebut meliputi dua level: strategis dan praktis. Diantara peran tersebut adalah:

#### ***Reformasi Hukum dan Kebijakan Pemberantasan Korupsi***

Selama periode panjang kediktatoran, strategi anti korupsi pemerintah manganalkan slogan, kampanye, dan penyelidikan intensif sementara, serta hukuman bagi pegawai negeri yang korup. Bahkan setelah proses demokratisasi dimulai sejak tahun 1987, pemerintah dan partai politik tidak memiliki strategi dan program yang komprehensif untuk mengekang laju permasalahan korupsi.

Kelompok gerakan masyarakat seperti CCEJ dan PSPD telah menyediakan alternatif ide-ide kebijakan dan reformasi hukum yang diperlukan untuk mengendalikan korupsi, di antaranya:

#### ***Sistem Transaksi Keuangan Menggunakan Nama Asli***

Satu masalah besar di Korea Selatan adalah dimungkinkannya secara hukum untuk melakukan transaksi keuangan tanpa mengidentifikasi diri menggunakan nama aslinya sendiri, yaitu dengan menggunakan nama palsu atau nama pinjaman. Hal tersebut memudahkan oknum-oknum korup untuk menyembunyikan suap yang diterimanya ataupun untuk menyembunyikan pajak yang harus dibayarkan dengan menggunakan akun keuangan dengan nama palsu. Sistem transaksi keuangan dengan menggunakan nama asli, serta larangan penggunaan nama palsu dan nama pinjaman dalam transaksi

keuangan sangat diperlukan untuk mencegah penggelapan pajak dan persembunyian dana yang dikumpulkan secara ilegal.

Sayangnya, Presiden Chun Doo-Hwan dan Roh Tae-Woo berulang kali membatalkan janji kampanye mereka untuk memperkenalkan sistem penggunaan nama asli dalam transaksi keuangan. Masyarakat luas memandang pesimis bahwa sistem transaksi keuangan menggunakan nama asli tidak akan pernah diperkenalkan bahkan jika presiden baru terpilih kembali. Selain itu, pejabat pemerintah dan ekonom menegaskan bahwa penggunaan nama asli dalam transaksi keuangan akan sangat berbahaya bagi perekonomian Negara. Alasannya adalah, pertama, spekulasi bisnis real estate akan melonjak karena jumlah dana yang besar akan berpindah dari lembaga keuangan untuk pasar real estate. Sejak Korea Selatan mengalami keterpurukan dalam spekulasi real estate serta lonjakan harga tanah dan perumahan pada tahun 1980-an, hal tersebut sangat gencar diperingatkan. Kedua, Korea Selatan akan mengalami *capital outflow*. Sejumlah dana besar yang disimpan dengan nama palsu atau nama pinjaman akan berpindah ke Bank Swiss atau lembaga keuangan lain di luar negeri. Ketiga, pasar saham akan runtuh karena akun keuangan dengan nama palsu akan hengkang dari pasar saham. Keempat, dan yang paling mengkhawatirkan, perusahaan kecil dan menengah akan koleps karena mereka tidak mendapatkan pinjaman dana dari bank akibat pemegang akun dengan nama-nama palsu menarik dananya dari bank.

CCEJ sejak berdirinya pada tahun 1989, sangat menuntut pelaksanaan sistem nama asli. CCEJ kemudian mengadakan seminar, unjuk rasa, dan demonstrasi. Setiap kali terdapat skandal korupsi, CCEJ menekankan bahwa selama sistem transaksi keuangan masih menggunakan nama palsu atau pinjaman, korupsi tidak akan pernah dapat dikontrol. Kemudian ekonom CCEJ membantah argumen pemerintah dan para ekonom tentang bahaya penggunaan nama asli dalam transaksi keuangan. Spekulasi real estate bisa dicegah dengan



langkah-langkah kebijakan yang diusulkan CCEJ, dan kondisi pasar real estate sudah turun dari puncaknya pada tahun 1989 dan 1990. Karena akun modal tidak diliberalisasikan di Korea, kemungkinan *capital outflow* tidak perlu dikhawatirkan secara berlebihan. Bank-bank komersial dan pasar saham akan mengalami kolaps sementara, bank sentral yang kemudian akan mampu menyediakan cadangan untuk membantu pertumbuhan usaha kecil dan menengah.

Selama pemilihan presiden di tahun 1992, CCEJ meluncurkan kampanye advokasi terhadap isu-isu terkini. Ia memberikan buku berjudul *Let Us Change Our Society: Reform Proposals for Economic Justice*, yang berisi 54 agenda reformasi termasuk tentang sistem transaksi keuangan dengan nama asli. CCEJ mendesak kandidat utama calon presiden untuk mengadopsi usulan tersebut, dan kedua calon presiden lain yaitu Kim Young-Sam dan Kim Dae-Jung juga berjanji akan mengimplementasikan sebagian besar yang diusulkan jika mereka terpilih.

Ketika Presiden Kim Young-Sam terpilih, masih belum jelas apakah ia akan memperkenalkan kebijakan sistem nama asli atau tidak. Kata-kata yang diucapkan mengenai sistem nama asli juga tidak terlalu jelas pada masa kampanye sampai masa pelantikannya. Ia memperkenalkan beberapa tindakan anti korupsi seperti pendaftaran dan pengungkapan aset, dan pertanggungjawaban penghasilan bagi pejabat publik kelas atas dalam beberapa bulan awal kepemimpinannya.

CCEJ menggalang koalisi dengan serikat pekerja serta kelompok sipil dan keagamaan untuk mendorong pemerintah menerima usulan sistem nama asli. Para aktifis mereka juga menerbitkan buku berjudul *Real Name Financial Transaction System*. Pada tanggal 13 Agustus 1993 Presiden Kim Young-Sam mengeluarkan dekret presiden terkait usulan sistem nama asli. Ini dianggap sebagai kemenangan CCEJ dan gerakan masyarakat secara keseluruhan.

### ***Mendorong pembentukan Undang-undang Kebebasan Informasi dan Reformasi Administrasi***

Undang-undang Kebebasan Informasi merupakan salah satu agenda reformasi CCEJ selama pemilihan presiden tahun 1992. Meskipun partai politik maupun politisi tidak pernah mengusulkan ini sebelumnya, CCEJ berhasil membujuk kandidat utama untuk melaksanakan hukum ini jika terpilih. Terlepas dari janji calon presiden Kim Young-Sam, nampaknya tidak mudah untuk menggoalkan peraturan ini. CCEJ memberikan buku dengan judul "Masyarakat Terbuka, Informasi Terbuka" pada tahun 1994, dan mengajukan petisi kepada Majelis Nasional untuk melaksanakan Undang-undang Kebebasan Informasi. Akhirnya hukum disahkan pada 31 Desember 1996 dan diberlakukan sejak 1 Januari 1998. Namun, undang-undang ini memiliki banyak celah seperti pengecualian terlalu luas untuk pengungkapan informasi. Selain itu, pada periode pertama penegakan undang-undang banyak departemen pemerintahan menolak untuk memberikan informasi yang diminta tanpa melalui dasar hukum yang jelas. Kemudian, CCEJ dan PSPD mengajukan tuntutan terhadap departemen-departemen pemerintah. Keberhasilan lain CCEJ dalam kampanye legislatif adalah disahkannya Undang-undang Prosedur Administrasi pada tahun 1997 untuk mengamankan prosedur administrasi yang transparan dan demokratis.

### ***Pembuatan Undang-undang Anti Korupsi***

Usulan UU Anti Korupsi yang komprehensif menjadi isu politik panas sejak Solidaritas Masyarakat untuk Demokrasi Partisipatif (PSPD) mengajukan petisi penetapan undang-undang kepada Majelis Nasional pada 1996. Termasuk di antaranya program perlindungan dan penghargaan untuk *whistle blower*, penguatan pendaftaran dan pengungkapan aset pejabat tinggi publik, dan penempatan jaksa khusus yang independen untuk penyelidikan kasus korupsi yang sensitif. Sebelumnya, pada tahun 1994 CCEJ telah mengajukan petisi



diberlakukannya Undang-undang Perlindungan Whistle Blower. CCEJ juga menuntut Majelis Nasional untuk melaksanakan Undang-undang Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang sejak tahun 1995.

Meskipun 85% anggota Majelis Nasional ke-15 mengungkapkan keberpihakannya untuk mensukseskan diberlakukannya Undang-undang Anti Korupsi pada questioner yang diajukan masyarakat sipil di tahun 1999, Majelis Nasional ke-15 (Juni 1996 - Mei 2000) gagal meloloskan undang-undang tersebut. Presiden Kim Dae-Jung berulang kali berjanji akan melaksanakan undang-undang tersebut di akhir tahun 2000, kedua partai yang berkuasa dan partai oposisi utama juga berjanji untuk melaksanakan undang-undang tersebut. Namun pada akhir masa jabatannya, Undang-undang Anti Korupsi dan Undang-undang Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang masih tertunda di parlemen.

### ***Reformasi Pembiayaan Politik***

Reformasi pembiayaan politik tampaknya menjadi salah satu tantangan sulit yang harus dihadapi OMS di Korea Selatan. Meskipun pemerintahan Kim Young-Sam (1993-1997) dan pemerintahan Kim Dae-Jung (1998-2002) menunjukkan kemauan politik yang lebih kuat dan pendekatan yang lebih sistemik untuk memberantas korupsi daripada apa yang dilakukan rezim pemerintahan sebelumnya. Partai politik masih belum bebas dari prakti-praktik pembiayaan politik gaya lama yang sebagian besar diperoleh dengan cara yang informal. Pernah ada kasus yang terungkap bahwa sebesar 119 miliar won (\$100 juta) anggaran untuk Badan Perencanaan Keamanan Nasional dialihkan untuk dana kampanye Partai Politik Korea Baru milik Presiden Kim Young-Sam pada pemilihan daerah tahun 1995 dan pemilihan umum tahun 1996.

Pemerintah Korea Selatan telah memiliki sistem pembatasan pengeluaran dana kampanye sejak lama. Batas pengeluaran danan untuk kandidat MP biasanya sekitar 100 juta won (\$80,000). Namun

umumnya diyakini bahwa pengeluaran dana kampanye yang sebenarnya rata-rata mencapai sepuluh kali lipat dari batas pengeluaran dana yang ditentukan, yakni sebesar 1 juta won (\$800,000), bahkan beberapa calon bisa mengeluarkan dana lebih dari 5 miliar won (\$4 juta).

CCEJ dan organisasi masyarakat sipil lainnya telah berjuang keras untuk mereformasi UU Pemilu dan UU Dana Politik. Beberapa usulan masyarakat sipil telah diterima. Penyimpangan terhadap surat suara kosong telah hampir dihapuskan sejak tahun 1992. Kebebasan melakukan aktivitas kampanye bagi individu (1995), serikat pekerja (1999), dan akhirnya bagi seluruh masyarakat (2000) telah tercapai. Debat kandidat calon presiden pertama kali ditayangkan di televisi diatur secara legal pada tahun 1997.

Namun beberapa langkah reformasi penting seperti pengungkapan sumber dana politik, atau nama asli dalam sistem pendanaan politik belum tercapai. Hukum pada saat ini masih memungkinkan kontribusi anonim. CCEJ dan kelompok sipil lainnya telah menuntut adanya keterbukaan informasi mengenai daftar kontributor beserta besarnya kontribusi dan berapa jumlah dana yang dikeluarkan untuk partai politik dan politisi yang diungganya. Mereka juga menuntut agar semua pengeluaran untuk kampanye pemilihan harus sesuai dengan batas pengeluaran dana kampanye yang diatur undang-undang karena yang berlaku saat ini adalah batas pengeluaran hanya berlaku untuk pengeluaran selama kampanye resmi dalam periode kurang dari 20 hari. Mereka juga menuntut revisi batas kontribusi sehingga badan hukum (korporasi) tidak diperkenankan untuk berkontribusi. Selain itu, batas kontribusi perseorangan juga harus dikurangi menjadi kurang dari 200 juta won (\$160,000) per tahun untuk partai dan 20 juta won (\$16,000) per tahun untuk politisi.



## **Monitoring dan Aktivitas Politik**

### **a. Monitoring Kampanye Penyelenggaraan Pemilu**

Organisasi masyarakat sipil membentuk Koalisi untuk Kampanye Pemilu yang Jujur (CFEC) di awal tahun 1991. Setiap kali pemilu nasional diselenggarakan, relawan CFEC aktif memantau penyimpanan yang dilakukan kandidat, seperti penyediaan uang atau makan malam gratis untuk pemilih. Mereka juga mengedukasi masyarakat untuk tidak menerima uang atau pemberian apapun dari calon kandidat.

### **b. Monitoring Anggaran Negara**

CCEJ dan PSPD telah memantau anggaran pemerintah terkait dengan pengelolaan limbah dan penyalahgunaan pajak sejak tahun 1998. CCEJ bekerja sama dengan harian *Dong-a-Daily* mendirikan "*Clean Fund*", yang mengapresiasi masyarakat yang berani memberikan informasi tentang kasus penyalahgunaan pengelolaan limbah atau pajak. PSPD memainkan peran sebagai pengawas pengeluaran anggaran nasional melalui permintaan informasi mengenai pengeluaran anggaran dari berbagai departemen pemerintah pusat dan daerah.

### **c. Monitoring Bisnis**

CCEJ melakukan evaluasi tahunan perusahaan berdasarkan Indeks Keadilan Ekonomi sejak 1992. PSPD meluncurkan gerakan reformasi pemegang saham untuk mereformasi konglomerasi bisnis sejak tahun 1998. Jaringan Anti-Korupsi Korea (ACNK) yang bertindak sebagai Transparency International di Korea Selatan melakukan penelitian pada 30 konglomerat terbesar di Korea Selatan mengenai berapa besar kode etik diterapkan dalam pelaksanaan perusahaan. Faktanya, hanya delapan perusahaan yang menetapkan kode etik tersebut, bahkan kode yang ada jauh di bawah standar kode etik yang ditetapkan secara internasional.

### **d. Panggilan terhadap Dua Mantan Presiden yang Korup**

Ketika terungkap pada tahun 1995 bahwa dua mantan presiden, Chun Doo-Hwan dan Roh Tae-Woo, telah mengumpulkan sejumlah besar dana dari suap dan kontribusi informal selama periode kepemimpinan mereka, menjadi sangat jelas mengapa sebelumnya mereka membatalkan janji kampanyenya untuk memperkenalkan sistem transaksi keuangan dengan nama asli. CCEJ dan PSPD serta banyak kelompok gerakan masyarakat lainnya membentuk koalisi untuk mendakwa keduanya. Serangkaian besar aksi demonstrasi juga dilakukan. Pada akhirnya, mereka ditangkap dan didakwa pada akhir tahun 1995, kemudian dijatuhi hukuman pada tahun 1996.

### **e. Kampanye Negatif Melawan Politisi Korup pada Pemilu tahun 2000**

Organisasi masyarakat sipil memberikan pengaruh politik yang kuat pada pemilihan umum bulan April tahun 2000. CCEJ menulis daftar calon yang tidak memenuhi syarat untuk jabatan MP dengan alasan konkret seperti keterlibatannya dalam kasus korupsi pada bulan Januari tahun 2000. PSPD dan ratusan kelompok masyarakat membentuk Aksi Sipil untuk Pemilu 2000 (CAGE). CAGE menulis daftar hitam calon kandidat lain yang sebagian besar merupakan calon incumben dengan catatan keterlibatannya dalam kasus korupsi sebelumnya. CAGE meluncurkan kampanye negatif untuk kandidat dalam daftar hitamnya, dan sekitar 70% dari mereka gagal terpilih dalam pemilu.

### **f. Menulis Index Persepsi Korupsi**

CCEJ mengembangkan Index Persepsi Korupsi (CPI) nya sendiri dan menggelar survei di 16 pemerintah metropolitan dan pemerintah provinsi pada bulan November 2000. Berdasarkan hasil survei, pemerintah metro Tae-jun menempati ranking



pertama sebagai pemerintahan yang paling bersih dari korupsi dan Provinsi Kyung-book menempati ranking ke-16 sebagai pemerintahan yang paling korup.

41% pegawai negeri menyatakan telah ditawarkan suap dari pelamar sipil, 33% masyarakat sipil mengatakan telah diminta membayar suap oleh pegawai negeri. Menurut hasil survei, diperkirakan jumlah rata-rata yang ditawarkan oleh masyarakat sipil kepada pegawai negeri dalam bentuk suap adalah sebesar 130.000 won (\$110) per bulan, sehingga jumlah total suap yang diterima seluruh pegawai negeri sekitar 650 miliar won (\$500 juta) per tahun. Survei ini merupakan survei nasional pertama CPI di Korea Selatan.

### **Kemitraan dengan Sektor Publik**

Organisasi masyarakat sipil tidak selalu berjuang berseberangan sebagai oposisi pemerintahan. Mereka juga bekerja sama dengan pemerintah demi mensukseskan kebijakan yang dikawal bersama. Pemerintahan Kim Young-Sam membentuk Komisi Pencegahan Korupsi sebagai badan penasihat untuk Auditor-Jenderal pada tahun 1993. Banyak pemimpin gerakan masyarakat sipil bergabung dalam komisi tersebut dan ikut andil dalam pemberian saran dan rekomendasi dalam memberantas korupsi. Pemerintahan Kim Dae-Jung membentuk komite presiden anti korupsi pada tahun 1999, di mana beberapa pemimpin gerakan masyarakat sipil ikut ambil bagian di dalamnya.

Salah satu peristiwa penting yang merupakan hasil kemitraan pemerintah dengan gerakan masyarakat sipil adalah program Pakta Integritas dan Citizen Ombudsman oleh pemerintah metro Seoul dengan PSPD. Program tersebut diluncurkan pada bulan Juli 2000. Ketika pemerintah metro Seoul sedang mempersiapkan pengenalan sistem Pakta Integritas yang dikembangkan oleh Transparency International di tengah tahun 1990-an, PSPD mengusulkan Pakta Integritas dengan sistem Citizen Ombudsman.

Pakta Integritas adalah pakta multilateral dalam rangka pemberantasan korupsi antara departemen-departemen pemerintahan dengan perusahaan yang mengajukan tender-tender untuk proyek-proyek tertentu. Di bawah sistem IP, Pemerintah kota Metro Seoul telah membuat kesepakatan dengan perusahaan pemenang tender untuk mengerjakan lebih dari 400 proyek publik dan menyatakan bahwa tindak penyuapan tidak akan terjadi selama kontrak tersebut berlangsung. Perusahaan pemenang tender yang melanggar kesepakatan akan digagalkan atau dihentikan kontraknya, bahkan akan didiskualifikasi dari tender lebih lanjut dalam jangka waktu dua tahun. Hasil kemitraan lainnya antara kelompok masyarakat dengan pemerintah adalah kampanye anti korupsi dan perpajakan. Kemitraan tersebut digalang oleh CCEJ bersama beberapa organisasi lain dan disponsori oleh Administrasi Pajak Nasional pada tahun 1999.

### **Prestasi yang Telah Dicapai dan Tantangan ke Depan**

Masyarakat sipil telah memberikan banyak kontribusi bagi reformasi anti korupsi, politik, dan ekonomi di Korea Selatan. Sebagian besar reformasi penting pemberantasan korupsi lebih banyak diinisiasi oleh masyarakat sipil daripada pemerintah maupun partai politik. Hal tersebut merupakan salah satu tanda bahwa pemerintah Korea Selatan sekarang ini lebih memperhatikan tekanan OMS untuk serius dalam memberantas korupsi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Pemerintah Korea menyiapkan program anti korupsi yang komprehensif yang diumumkan pada Desember 1999. Program anti korupsi termasuk pembentukan komite presiden anti korupsi, undang-undang anti korupsi yang baru, perlindungan whistle blower, peningkatan gaji pegawai negeri, penerapan prosedur sistem aplikasi sipil secara online (OPEN), dan pemotongan pajak untuk pembayaran melalui kartu kredit. Dari uraian tersebut tidak mengherankan bahwa banyak program awalnya diusulkan oleh kelompok masyarakat sipil. Tercatat bahwa prosedur sistem aplikasi sipil secara online (OPEN)



yang pertama kali diperkenalkan oleh Pemerintah Seoul diterima di seluruh dunia sebagai salah satu contoh terbaik dalam mencegah korupsi dalam lingkup administrasi.

Pemerintah Korea Selatan juga bergabung dengan organisasi-organisasi internasional yang bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pencucian uang, Paris-based Financial Action Task Force (FATF). Syarat utama untuk bergabung dalam FATF adalah UU Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang yang masih tertunda pengesahannya di parlemen. Pemerintah Korea Selatan mengusulkan pencapaian kesepakatan untuk membuat sebuah dewan dan dana khusus untuk memerangi korupsi di antara 35 negara di kawasan Asia Pasifik dalam Konferensi Seoul yang berlangsung pada 11-13 Desember 2000. Korea Selatan juga menjadi tuan rumah Global Forum III dan Konferensi Anti Korupsi ke-11 pada tahun 2003.

Meskipun banyak usulan masyarakat sipil telah diterima dan dilaksanakan oleh pemerintah dan kemitraan antara masyarakat sipil dan pemerintah telah berkembang, tampaknya Korea Selatan masih harus menapaki jalan panjang dalam memberantas korupsi di negaranya. Korea Selatan menempati peringkat ke-48 dari 90 negara dalam Indeks Persepsi Korupsi tahun (CPI) tahun 2000, dan menempati peringkat ke-43 dari 175 negara di dunia dengan skor 55 dari 100 dalam Indeks Persepsi Korupsi (CPI) pada tahun 2014.

Akhirnya, masalah yang paling sulit dipetakan adalah budaya korupsi yang melingkupi Korea Selatan. Sulit untuk membedakan hadiah dan suap ketika begitu banyak orang memberikan uang dan hadiah kepada guru sekolah dasar anak-anak mereka. Juga tidak mudah untuk membujuk pegawai negeri tidak menerima hadiah atau makan malam dari calon pegawai negeri. Dibutuhkan waktu yang cukup panjang untuk merubah pola pikir dan cara hidup masyarakat yang sudah terlanjur mendarah daging. Dalam hal ini, masyarakat sipil memiliki peran penting dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dan memberantas budaya korupsi yang mengakar.

## 2.2.2 Latihan

1. Jelaskan proses lahirnya gerakan sosial masyarakat sipil Korea dalam melawan korupsi!
2. Terangkan jenis-jenis peranan yang pernah dilakukan OMS Korea dalam melawan korupsi!
3. Sebutkan beberapa keunggulan/kekuatan OMS Korea dalam melawan korupsi, bandingkan dengan OMS di Indonesia!
4. Mengapa CCEJ memiliki fokus gerakan untuk mewujudkan kepemilikan tanah yang adil, sehingga tidak ada kecurangan dan mafia praktik dalam pengadaan tanah untuk proyek pembangunan dan perumahan?
5. Mengapa OMS Korea memandang penting transaksi keuangan dengan nama riil? Apa kaitannya dengan pemberantasan korupsi?

## 2.3. PENUTUP

### 2.3.1. Tes Formatif

Pilihlah salah satu jawaban yang benar, dengan memberikan tanda silang!

1. Salah satu kekuatan dari gerakan OMS dalam memberantas korupsi di Korsel adalah:
  - A. Berkolaborasi dengan militer
  - B. Membuat jejaring dengan *chaebol*
  - C. Memiliki membership yang kuat
  - D. Menerima uang sumbangan pemerintah
2. Buku dengan judul *Real Name Financial Transaction System* dibuat oleh para aktifs dari organisasi:
  - A. CCEJ
  - B. PSPD
  - C. GES
  - D. KICAC



3. Tujuan utama dari berdirinya People's Solidarity for Participatory Democracy (PSPD) adalah:
  - A. Mewujudkan Pemilu bersih
  - B. Menjadi relawan kelompok pendukung presiden
  - C. Mendorong demokratisasi ekonomi terhadap praktek kapitalisme kroni dan pengaturan ekonomi yang lebih adil.
  - D. Melawan rejim militer
4. Kegiatan CCEJ berfokus pada:
  - A. Pembelaan kaum buruh
  - B. Mewujudkan keadilan gender dan hak pilih perempuan
  - C. Pemberdayaan masyarakat ekonomi lemah supaya mendapatkan akses permodalan.
  - D. Mewujudkan kepemilikan tanah yang adil, sehingga tidak ada kecurangan dan mafia praktik dalam pengadaan tanah untuk proyek pembangunan dan perumahan.
5. Presiden yang mengeluarkan dekrit terkait usulan sistem transaksi keuangan dengan nama asli adalah:
  - A. Kim Young-Sam
  - B. Roh Tae Wo
  - C. Park Geun Hyi
  - D. Kim Dae Young

### 2.3.2 Umpan Balik

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar ini.

Tingkat penguasaan =  $\frac{\text{Jumlah jawaban yang benar}}{\text{Jumlah soal}} \times 100\%$

5

Arti tingkat penguasaan:

90 – 100%	: baik sekali
80 – 89%	: baik
70 – 79%	: cukup
< 70%	: kurang

### 2.3.3 Tindak lanjut

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar selanjutnya. Bagus! Jika masih dibawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar ini, terutama bagian yang belum dikuasai.

### 2.3.4 Rangkuman

Proses munculnya organisasi dan gerakan *civil society* di Korea memiliki beberapa kesamaan dengan Indonesia, akan tetapi ada beberapa aspek penting yang menjadi perbedaan diantara kedua negara.

- Pertama, OMS di Korea secara umum memiliki pola keanggotaan (*membership*) yang kuat. Mereka pada umumnya berhasil membentuk organisasi yang independen karena kemandirian dalam hal pendanaan yang dihasilkan dari iuran anggota.
- Kedua, kekuatan CSO Korea juga terletak pada kemampuan merumuskan gerakan yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota mereka.
- Ketiga, OMS Korea memiliki penerapan strategi damai dan anti kekerasan. Demonstrasi dan aksi mereka selalu berjalan damai dan tidak melanggar hukum. Selain itu, mereka selalu mengusulkan rekomendasi kebijakan alternatif ketika mengkritik kebijakan pemerintah.
- Keempat, OMS Korea juga terletak pada kemampuan mereka membentuk jaringan solidaritas gerakan yang solid. Kelompok masyarakat memperluas jaringan dengan cepat dan pengaruh



politik mereka tumbuh dengan cepat pula di tahun 1990-an. Mereka sering membuat kelompok koalisi setiap kali ada masalah nasional yang penting, dan kelompok anti korupsi dapat meminta dukungan dan solidaritas dari kelompok-kelompok sipil di daerah lain.

### 2.3.5 Kunci Jawaban tes formatif

Nomor 1 jawaban C, Memiliki membership yang kuat.

Nomor 2 jawaban A, buku tersebut ditulis oleh aktifs CCEJ.

Nomor 3 jawaban C, PSPD bertujuan untuk mendorong demokratisasi ekonomi terhadap praktek kapitalisme kroni dan pengaturan ekonomi yang lebih adil.

Nomor 4 jawaban D, CCEJ bertujuan untuk mewujudkan kepemilikan tanah yang adil, sehingga tidak ada kecurangan dan mafia praktik dalam pengadaan tanah untuk proyek pembangunan dan perumahan.

Nomor 5 jawaban A, Kim Young-Sam.

### DAFTAR PUSTAKA

ACRC Korea, *Annual Report*, (2014; 2015)

Berendsen, B., Ton Dietz, Henk Schulte Nordholt and Roel van der Veen (eds) 2013. *Asian Tigers, African Lions: Comparing the Development Performance of Southeast Asia and Africa*. Leiden: Brill.

Eigen, P. 2004 'Chasing Corruption Around the World: How Civil Society Strengthen Global Governance', Lecture transcript for Arthur and Frank Payne Distinguished Lecture Stanford Institute for International Studies, 4 October 2004 [Online, accessed 21 February 2008, at [www.iis-db.stanford.edu/evnts/3922/Eigen1004.pdf](http://www.iis-db.stanford.edu/evnts/3922/Eigen1004.pdf).]

Gill, G. 2000. *The Dynamics of Democratization: Elites, Civil Society and the Transition Process*, London: MacMillan Press.

Harvie, C. And Hyun-Hoon Lee. 2003. 'Export-led industrialisation and growth: Korea's economic miracle, 1962-1989' *Australian Economic History Review* 43 (3), 256-286.

Jip, Choi Jang. 1989. *Structure Change of Contemporary South Korean Politics*, Seoul: Ggachi

Jip, Choi Jang 1993. *Theory of South Korean Democracy*, Seoul: Hangil.

Johnston, M. (ed.) 2005. *Civil Society and Corruption: Mobilizing for Reform*, Lanham, MD: University Press of America.

Joo, Sungsoo, Seonmi Lee, Youngjae, Jo. 2006. *The Explosion of CSOs and Citizen Participation: An Assessment of Civil Society in South Korea*, Seoul: Hanyang University.

World Bank. 2000. *Anti-corruption in Transition: A Contribution to the Policy Debate*, Washington DC: World Bank.

### SENARAI

membership	:	pola pengaturan keanggotaan suatu organisasi yang biasanya disertai ketentuan tentang kaderisasi, iuran, tata aturan peran, dan sanksi
man-to-man strategy	:	strategi yang dilakukan untuk mendekati/mempengaruhi target secara individual
politisi	:	seseorang yang melakukan fungsi-fungsi politik, biasanya dalam lembaga politik seperti partai politik, legislatif, dan eksekutif



## BAB VI

### POKOK BAHASAN

#### CONTOH OMS ANTI KORUPSI DI KOREA SELATAN

##### 1. SUB POKOK BAHASAN:

PSPD dan CCEJ

##### 1.2. PENDAHULUAN

###### 1.1.2. Deskripsi Singkat

Sub Pokok Bahasan ini mengantarkan mahasiswa untuk membandingkan gerakan anti-korupsi yang dijalankan OMS Korea Selatan dengan Indonesia, dengan mengambil contoh dua lembaga, yakni: PSPD (*People Solidarity for Participatory Democracy*) dan CCEJ (*Citizen Coalition for Economic Justice*).

###### 1.2.2. Relevansi

Mahasiswa Ilmu Pemerintahan perlu mampu menjelaskan perbandingan gerakan OMS di Korea Selatan sebagai bahan perbandingan dengan apa yang dilakukan oleh OMS di Indonesia. Hal tersebut dilakukan untuk mengambil pelajaran dan membuat alternatif gerakan dan kebijakan anti korupsi yang lebih tepat di Indonesia.

###### 1.2.3 Kompetensi

###### a. Standar Kompetensi

Setelah mengikuti pokok bahasan ini selama satu pertemuan maka diharapkan mahasiswa akan dapat membandingkan gerakan OMS di Korea Selatan dengan Indonesia dalam memerangi korupsi,

###### b. Kompetensi Dasar

1. Kemampuan menjelaskan perbedaan gerakan OMS dalam memerangi korupsi di Korea Selatan dan Indonesia.
2. Kemampuan menyusun agenda yang dapat dilakukan OMS Indonesia dalam memperbaiki dan memperkuat peran mereka dalam memerangi korupsi.

##### 1.2. PENYAJIAN

###### 1.2.2. Uraian dan contoh

Pembahasan pada bab-bab sebelumnya menunjukkan bahwa demokratisasi dan pembangunan ekonomi pada suatu Negara tidak menjamin Negara tersebut dapat terbebas dari korupsi. Negara-negara demokratis baru memiliki pemerintahan yang biasanya masih didominasi oleh budaya *clientelistic* yang kuat, penegakan hukum yang lemah, intervensi negara yang tinggi dalam kegiatan pribadi, serta mekanisme akuntabilitas yang buruk sebagai implikasi dari sistem otoriter yang diterapkan sebelumnya. Negara demokratis baru tidak mampu mengkonstruksi sistem hukum, sosial dan politik yang efektif sehingga korupsi masih tetap merajalela seperti pada masa pemerintahan otoriter. Meski berbagai usaha telah mereka lakukan, tetapi banyak riset menemukan bukti bahwa korupsi justru makin merajalela di banyak negara demokrasi baru. Belum paripurnanya proses konsolidasi demokrasi, bersama dengan lemahnya fungsi politisi, birokrasi, dan sektor pasar memberikan peluang bagi Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) untuk berperan sentral menutupi kelemahan publik dalam pemberantasan korupsi. Berbagai riset menunjukkan bahwa peran aktor-aktor masyarakat sipil ini sangat penting dalam menjatuhkan rezim-rezim otoriter.

Peran OMS dalam memberantas korupsi tidak terbatas pada pengawasan kelembagaan dan penyalahgunaan kekuasaan di sektor negara, tetapi juga sebagai pendukung kelancaran pertanggungjawaban



rantai politik dalam sistem pemerintahan. Dengan kata lain, OMS tidak hanya dapat mengurangi resiko korupsi dengan melakukan monitoring eksternal dan menyeret tokoh-tokoh korup ke pengadilan, tetapi juga dapat mengurangi kemungkinan korupsi dengan memulai reformasi sistem penegakan hukum dan perubahan kebijakan. Hal inilah yang menunjukkan bahwa OMS mampu mempengaruhi proses demokratisasi menjadi terkonsolidasi.

Kelompok OMS Korea Selatan adalah aktor yang kuat dalam politik Korea Selatan. Banyak yang mengatakan bahwa Korea Selatan memiliki masyarakat sipil terkuat dan paling dinamis di Asia Timur yang mampu memelopori dan mempengaruhi berbagai macam perubahan politik yang signifikan. Sebagian besar reformasi penting pemberantasan korupsi dimisiasi oleh masyarakat sipil daripada oleh pemerintah maupun partai politik. Sektor masyarakat sipil di Korea Selatan sendiri telah tumbuh menjadi sebuah entitas independen dalam hubungannya dengan negara dan bisnis. Sektor ini mampu tumbuh sebagai realitas yang dilembagakan dan mampu mendesak birokrat, politisi, dan pengusaha untuk berubah. OMS di Korea Selatan secara internal telah melakukan diferensiasi dengan fokus perjuangan yang makin beragam dan berkontribusi pada pengembangan sektor masyarakat sipil itu sendiri, serta menciptakan pluralisme sosial dan politik. Gerakan anti korupsi di Korea Selatan tidak bisa lepas dari dua organisasi populer yang terbentuk pada masa transisi demokrasi tahun 1985-1987, yakni PSPD dan CCEJ. Kedua OMS ini memainkan peran penting dalam mengusulkan dan mendorong lahirnya kebijakan dan reformasi hukum, seperti undang-undang kebebasan informasi, undang-undang prosedur administrasi, dan hukum anti korupsi yang komprehensif. Selain itu, organisasi tersebut memainkan peran penting dalam proses musyawarah kebijakan sementara organisasi pelayanan -termasuk kesehatan dan kesejahteraan lembaga telah memainkan peran yang sangat diperlukan dalam penyediaan layanan kesejahteraan sosial dan pelayanan kesehatan.

Walaupun secara umum proses munculnya organisasi dan gerakan masyarakat sipil di Korea Selatan memiliki beberapa kesamaan dengan Indonesia, akan tetapi ada beberapa aspek penting yang menjadi pembeda diantara kedua negara. OMS di Korea secara umum memiliki pola keanggotaan (*membership*) yang kuat. Mereka pada umumnya berhasil membentuk organisasi yang independen karena kemandirian dalam hal pendanaan yang dihasilkan dari iuran anggota. OMS di Indonesia, walaupun mereka memiliki peran-peran yang signifikan, akan tetapi, kemandirian mereka menjadi pertanyaan yang serius. Mereka pada umumnya tidak memiliki sistem keanggotaan yang kuat dan hanya mengandalkan pendanaan dari donor (utamanya donor luar negeri). Hal ini menyebabkan OMS Indonesia cenderung bergerak mirip sebagai pelaksana proyek donor daripada bergerak sebagai organisasi yang murni memperjuangkan kepentingan anggota (masyarakat).

Seperti sudah dibicarakan di depan, berbicara tentang gerakan anti korupsi di Korea tidak akan bisa lepas dari dua organisasi populer dan besar yang tersedia saat transisi demokrasi di 1985-1987 terjadi, yakni PSPD dan CCEJ. Selama periode ini berbagai elemen di masyarakat sipil Korea Selatan dengan cepat dimobilisasi menjadi kekuatan pro-demokrasi militan, dan mengobarkan perjuangan intens melawan rezim otoriter. Namun, sebenarnya munculnya gerakan rakyat sudah mulai memainkan peran penting dalam pertengahan 1980-an. Kenaikan dramatis gerakan warga dan LSM selama tahun 1980 dan awal 1990-an akhir itu disebabkan karena demokratisasi yang dipelopori oleh mahasiswa pada pertengahan 1980-an. Pada tahap ini, evolusi dari masyarakat sipil Korea Selatan adalah munculnya kelompok-kelompok sipil yang semakin efektif dipimpin oleh generasi muda. Mereka menekankan fungsi advokasi progresif termasuk upaya untuk memperluas debat publik dan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik, menjaga atau memperluas domain dari hak asasi manusia, dan menjaga lingkungan dari tekanan pertumbuhan ekonomi.



Periode pasca-demokratisasi antara 1980-an dan awal 1990-an telah menambahkan dimensi penting karena kelompok pemimpin awal, seperti organisasi mahasiswa dan kelompok bawah tanah secara bertahap digantikan oleh organisasi sipil baru. Mereka berdiri dengan struktur dan pengorganisasian yang lebih baik dan profesional. Banyak pakar mengatakan bahwa dekade 1990-an di Korea Selatan adalah "era masyarakat sipil". Menurut majalah *Korea Times* (2001), dari OMS yang ada di Korea, 56,5% organisasi adalah didirikan pada tahun 1990 dan 21% pada 1980-an sementara hanya 9% diciptakan pada 1970-an. Hal ini menunjukkan tahapan evolusi yang berbeda. Sektor *civil society* di Korea Selatan telah tumbuh menjadi sebuah entitas terlihat dan independen dalam hubungannya dengan negara dan bisnis. Sektor ini mampu tumbuh sebagai realitas yang dilembagakan dan secara independen mampu mendesak birokrat, politisi, dan pengusaha. OMS di Korea Selatan secara internal telah melakukan diferensiasi dengan fokus perjuangan yang makin bermacam dan berkontribusi pada pengembangan sektor *civil society* itu sendiri, serta menciptakan pluralisme sosial dan politik.

Perhatian kaum akademik serta jurnalistik pada sektor *civil society* juga telah berkembang drastis. Kesadaran masyarakat dan dukungan mereka yang riil juga mengalami perkembangan penting. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang spektakuler, peran sektor *civil society* dan non-pemerintah di Korea Selatan telah tumbuh secara substansial selama tiga puluh tahun terakhir. Pada tahun 1997, sektor *civil society* menyumbang 2,96% dari produk domestik bruto atau 5,6% dari barang jasa domestik yang diproduksi di Korea Selatan (Dwivedi 2008: 5).

Kelompok masyarakat terutama yang memimpin gerakan anti-korupsi di tahun 1990-an, memainkan peran penting dalam mengusulkan dan mendorong lahirnya kebijakan dan reformasi hukum seperti "undang-undang kebebasan informasi", "undang-undang prosedur administrasi" dan "hukum anti korupsi" yang komprehensif.

Selain itu, organisasi tersebut memainkan peran penting dalam proses musyawarah kebijakan sementara organisasi pelayanan termasuk kesehatan dan kesejahteraan lembaga telah memainkan peran yang sangat diperlukan dalam penyediaan layanan kesejahteraan sosial dan pelayanan kesehatan.

Walaupun secara umum proses munculnya organisasi dan gerakan *civil society* di Korea memiliki beberapa kesamaan dengan Indonesia, akan tetapi ada beberapa aspek penting yang menjadi perbedaan diantara kedua negara. OMS di Korea secara umum memiliki pola keanggotaan (*membership*) yang kuat. Mereka pada umumnya berhasil membentuk organisasi yang independen karena kemandirian dalam hal pendanaan yang dihasilkan dari iuran anggota. OMS di Indonesia, walaupun mereka memiliki peran-peran yang signifikan, akan tetapi, kemandirian mereka dalam pertanyaan yang serius. Mereka pada umumnya tidak memiliki sistem keanggotaan yang kuat dan hanya mengandalkan pendanaan dari donor (utamanya donor luar negeri).

Berikut adalah ilustrasi contoh profil dua OMS di Korea sebagai pembandingan rekan mereka di Indonesia, yang bisa dipakai untuk mengetahui titik-titik persamaan dan perbedaan diantara kedua negara.

#### A. PSPD (*People's Solidarity for Participatory Democracy*)

*People's Solidarity for Participatory Democracy* (PSPD) adalah organisasi non-pemerintah Korea Selatan yang didirikan pada tanggal 10 September 1994 dengan awalnya sekitar 200 anggota individu dengan tujuan untuk menggalang solidaritas warga untuk memperjuangkan demokrasi partisipatif dan hak asasi manusia. Pada tahun 2004, PSPD memperoleh status konsultatif khusus dengan ECOSOC PBB dan mulai melakukan advokasi terhadap berbagai badan PBB termasuk dewan hak asasi manusia PBB. Pada Juli 2012, sekitar 13.000 individu menjadi anggota PSPD. Di bawah misi 'partisipasi,



solidaritas, dan pengawas alternatif', LSM ini memiliki struktur 10 departemen dan 3 unit pembantu sekretariat.

Berdirinya LSM ini dilatarbelakangi oleh proses sejarah dimana sampai tahun 1980-an, terjadi proses demokratisasi yang didorong oleh gerakan rakyat menolak kekerasan pemerintah dan penindasan. Akhirnya kediktatoran militer, yang berlangsung lebih dari tiga dekade, dihentikan oleh kekuatan rakyat. Namun demikian, sebagian besar masyarakat tidak sepenuhnya segera menyadari bahwa demokrasi menuntut berbagai prasyarat yang harus dipenuhi. Realisasi sebenarnya dari demokrasi hanya dapat dicapai oleh orang-orang yang terbiasa berpartisipasi dalam bidang sosial-ekonomi dan politik dalam proses pengambilan keputusan, dan secara ketat megawasi penyalahgunaan kekuasaan negara dan korporasi.

PSPD didirikan pada tahun 1994 oleh aktivis, pendeta, dosen dan pengacara yang terlibat dalam berbagai gerakan demokrasi selama dekade kediktatoran militer. Berharap untuk membuka era baru demokrasi partisipatif dan hak asasi manusia, PSPD bekerja pada mempromosikan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pemerintah membuat dan reformasi sosial-ekonomi.

### Misi PSPD

Persolan pokok yang ingin diatasi oleh PSPD adalah 'pemusatan kekuatan ekonomi' akibat kebijakan pemerintah, di mana istilah ini sebenarnya digunakan sebagai cara mengkritik eksistensi 'Chaebol' tanpa menyebutkan secara eksplisit. Adalah Korea Development Institute (KDI), lembaga think-tank pemerintah berpengaruh, yang pertama kali memperkenalkan istilah ini untuk debat kebijakan publik Korea pada tahun 1985 (Russell 1938, dan Galbraith 1984). Sejak itu kebijakan pemerintah Korea sehubungan dengan *Chaebol* berpusat di sekitar konsep 'ekonomi terpinpin' ini. Untuk lebih spesifik, kebijakan Chaebol memusatkan pada empat isu utama: (1) konsentrasi kepemilikan; (2) diversifikasi usaha; (3) inter-afiliasi

perusahaan pendukung; dan (4) pengaruh kendali keluarga pada manajemen perusahaan.

Kebijakan ini dinilai telah menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat Korea. Disamping menyebabkan ketimpangan antara rakyat biasa dan para keluarga Chaebol beserta perusahaan-perusahaan kroninya, kebijakan pemusatan kekuatan ekonomi juga menimbulkan matinya demokrasi. Para Chaebol dapat dengan mudah mempengaruhi kebijakan pemerintah yang merugikan rakyat banyak. Mereka, misalnya, sering mendapatkan keringanan pajak, membeli tanah rakyat secara murah, dan menentukan upah buruh secara sepihak.

Dalam kaitan tersebut, PSPD memiliki empat misi utama, yaitu: pertama: *Watch* (mengawasi). PSPD adalah organisasi pengawas yang memantau instansi pemerintah dan perusahaan swasta yang menyalahgunakan kewenangannya. Kedua: *Alternatives* (alternatif), yakni melakukan penelitian dan mengusulkan alternatif kebijakan, anggaran dan langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas hidup dan hak-hak rakyat biasa. Ketiga: *Solidarity* (solidaritas), yakni berdiri dalam solidaritas dengan gerakan masyarakat setempat (global) dan global untuk menegakkan demokrasi, dan untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia dari orang-orang yang terpinggirkan dalam masyarakat. Keempat: *Participation* (partisipasi), yaitu menempatkan anggota dan relawan sebagai aktor penting dari kegiatan organisasi. PSPD bergerak dengan biaya utama dari iuran keanggotaan lebih dari 13.000 anggota.

### Organisasi dan Finansial

Sebagai OMS, PSPD memiliki kemandirian yang cukup kuat. Hal ini bisa dilihat dari aspek kemandirian keuangan, misalnya, dimana organisasi ini dapat sepenuhnya mengandalkan iuran anggota (*individual membership fee*). Pada saat ini (tahun 2015) PSPD memiliki 13,154 anggota aktif yang membayar iuran tetap setiap bulan, sehingga mampu mengumpulkan pendapatan tahunan sebesar 2 milyar Won



(sekitar Rp. 26 Milyar kurs tahun 2015), yang berkontribusi terhadap 72,4% dari total penerimaan organisasi. Selain itu, mereka juga memperoleh pendapatan dari donasi dari non-anggota sebanyak 17%, proyek non-pemerintah sekitar 9% dan pendapatan lain-lain sebanyak 1%. Untuk menghindari ketergantungan terhadap pemerintah dan konflik kepentingan, PSPD tidak pernah mau menerima bantuan keuangan dari pemerintah (*government grants*).

Dengan dana iuran yang permanen, PSPD dapat secara independen menyusun kegiatan tahunan yang dilaksanakan secara terencana dan terjadwal secara pasti. Biasanya setiap tahun, mereka membuat rencana dua kegiatan pokok yang disusun oleh badan pekerja pada bulan Desember, dan dibahas oleh seluruh anggota pada bulan Januari. Pada saat ini (2014), PSPD memiliki 54 pekerja tetap (*full-time*) yang dibantu oleh lebih dari 300 tenaga volunteer (*sukarela*) yang siap diperbantukan pada proyek-proyek yang dikelola oleh PSPD.

### Kiprah PSPD

Seperti disebutkan diatas, aktifitas utama PSPD diarahkan untuk menentang kebijakan pemusatan ekonomi dan membendung dominasi Chaebol dalam kancah ekonomi dan politik Korea. PSPD selalu mengawasi setiap kegiatan bisnis dan proyek yang dilakukan oleh perusahaan Chaebol dan berusaha membela hak-hak raket dan buruh yang dirugikan. Pada tahun 1994, misalnya, untuk pertama kalinya PSPD mempersoalkan runtuhnya jembatan Seongsu yang menelan 32 korban jiwa dan 17 orang terluka. Jembatan tersebut ambbruk di pagi hari pada tanggal 21 Oktober 1994 pada saat lalu lintas sangat padat, sehingga mengakibatkan beberapa bus dan mobil terjebur ke dalam sungai Han. PSPD menilai adanya ketidakberesan dalam pengerjaan proyek tersebut. Hampir setiap hari, aktifitas PSPD selalu menyerang kasus tersebut di media massa dan mengadakan demonstrasi ke berbagai lembaga pemerintah yang berkaitan dengan proyek tersebut. Akibat gerakan PSPD, kontraktor pembangunan

tersebut, Dong Ah Engineering and Construction, mengumumkan bahwa akan mengembangkan pengganti untuk Negara.

Sejak runtuhnya Seongsu Bridge, PSPD menyatakan akan tegak berdiri membela rakyat dan mengajak mereka untuk bangkit. Salah satu agenda pertama mereka adalah memperbaiki undang-undang konstruksi yang meminta tanggung jawab pelaksana proyek atas buruknya hasil proyek dan korupsi, serta mencegah terulangnya kejadian yang sama dimasa yang akan datang. Namun, masalah yang sama telah berulang tetapi dalam skala yang lebih besar.

Pada tahun-tahun berikutnya, PSPD mengusung tema '*economic democratization*' untuk memperjuangkan keadilan ekonomi bagi rakyat Korea. Sebuah akrobat langsung dari perhatian PSPD adalah untuk memperjuangkan peningkatan pemegang saham publik yang menghasilkan 'New Chaebol policy' yang diumumkan oleh pemerintah pada bulan Mei 1996. Kebijakan ini menggeser fokus kebijakan Chaebol dari mengurangi dampak dari konsentrasi kekuatan ekonomi (seperti kepemilikan terkonsentrasi dari keluarga pendiri) untuk mereformasi tata kelola perusahaan dan memberdayakan pemegang saham minoritas. Dalam kebijakan baru, pemerintah bermaksud untuk memperkuat pengungkapan, audit dan hak pemegang saham minoritas. Akibatnya, pada bulan Januari 1997, Securities Act diubah untuk menurunkan persyaratan minimum untuk hak-hak pemegang saham minoritas. Ini adalah pertama kalinya sejak ditetapkan pada tahun 1962 bahwa pemerintah telah melonggarkan persyaratan ini.

### B. CCEJ (Citizen Coalition for Economic Justice)

Citizen Coalition for Economic Justice (CCEJ) adalah gerakan warga di Korea Selatan, yang didirikan pada tahun 1989. Pendiri organisasi ini ada 500 orang yang terdiri dari dosen, lawyer, pengusaha, mahasiswa, dan masyarakat iasa. Gerakan ini bekerja untuk memberantas korupsi, memperjuangkan keadilan ekonomi, perlindungan lingkungan, untuk reunifikasi Korea, serta untuk



pengembangan demokrasi dan sosial. CCEJ mengalami perkembangan yang cukup progresif, sehingga meskipun belum berusia dua puluh lima tahun, organisasi ini memiliki 35.000 anggota dan 35 cabang.

Dalam menyuarkan kepentingan warga, CCEJ telah mencapai berbagai hasil perbaikan dalam pendidikan, mengembangkan alternatif kebijakan, dan melobi pemerintah untuk reformasi hukum. Mereka banyak melaksanakan diskusi publik dan dengar pendapat dan menginformasikan pers tentang keprihatinan warga. Kegiatan mereka telah memperluas tujuannya keadilan ekonomi ke tingkat global.

Pada tahun 2003, CCEJ menerima penghargaan "Right Livelihood Award" untuk upaya dalam menciptakan "program reformasi, berdasarkan keadilan sosial".

### Fokus Perjuangan dan Misi CCEJ

CCEJ didirikan karena nuansa keprihatinan akan adanya ancaman terhadap warga negara, khususnya berkaitan dengan meningkatnya harga perumahan dikarenakan spekulasi dan keserakahan perusahaan real estate. Tingginya harga perumahan menunjukkan adanya ketidakadilan sosial, dan ketidakadilan tersebut bisaanya merupakan akibat dari adanya korupsi dan kolusi antara pemerintah dan pengusaha. Oleh karena itu, CCEJ memiliki fokus perjuangan yang berkaitan dengan upaya mengatasi masalah ini.

Dalam dokumen deklarasi mereka tanggal 8 Juli tahun 1989, CCEJ menyatakan bahwa kemiskinan yang terdapat di daerah kumuh kota dan desa-desa pertanian dipandang telah menghilangkan kemungkinan tercapainya kehidupan dasar yang layak bagi rakyat. Penyebabnya adalah karena sejumlah kecil orang yang memonopoli kekuasaan ekonomi telah melakukan keputusan dan menggunakan pengaruh mereka untuk mengeksploitasi semua lapisan masyarakat bagi pendapatan kelompok mereka sendiri. Kenyataan ini menyebabkan pemborosan dan mengurangi keinginan berkompetisi dan meniadakan ketekunan berusaha, serta mendorong spekulasi yang

menyebabkan semangat investasi industri menurun, serta memperlemah dasar pembangunan ekonomi. Akibat dari kondisi ini adalah terciptanya kondisi dimana "orang kaya menjadi kaya dan yang miskin menjadi lebih miskin" sehingga kesenjangan yang lebih buruk terjadi, dan dasar stabilitas sosial terganggu.

CCEJ merasa terpanggil melaksanakan tugas sejarah untuk melaksanakan keadilan ekonomi dan memberantas ketidakadilan ekonomi yang berlaku dalam masyarakat seperti spekulasi real estat, hubungan dekat antara masyarakat politik dan bisnis, sistem nama palsu keuangan yang menyetujui pendapatan diterima di muka dan penggelapan pajak, variasi ekstrim pendapatan, manajemen tidak adil dan hubungan kerja, pemiskinan desa pertanian dan industri kecil dan menengah, serta distribusi yang tidak adil yang dihasilkan dari integrasi ekonomi menjadi konglomerat. Tanpa adanya keadilan ekonomi, maka tidak lebih dari mimpi untuk membangun sebuah masyarakat demokratis yang sejahtera, kedamaian industri, dan pertumbuhan ekonomi yang stabil.<sup>13</sup>

Sejalan dengan hal tersebut, CCEJ menetapkan tugas mereka adalah mewujudkan 6 (enam) poin utama, yakni:

1. *Everyone has the right to live a decent life free from poverty* (Setiap orang berhak untuk hidup layak bebas dari kemiskinan).
2. *Unearned income should be eliminated* (percaloan dan spekulasi harus dihapuskan).
3. *Economically equal opportunity should be given to everybody to freely choose their life* (kesempatan ekonomi yang sama harus diberikan kepada semua orang untuk bebas memilih hidup mereka).
4. *The government has a duty to correct the market's failure* (Pemerintah memiliki kewajiban untuk memperbaiki kegagalan pasar).

<sup>13</sup> Inagural Declaration of CCEJ 8 Juli 1989



5. *Plutocracy and a close relationship between political and business community which distorts democracy should be eradicated* (Plutokrasi dan hubungan yang terlalu erat antara masyarakat politik dan bisnis yang mendistorsi demokrasi harus diberantas).
6. *Land must be used for production and living only, not for real estate speculation* (tanah harus digunakan untuk produksi dan hidup saja, bukan untuk spekulasi real estate).

Dalam rangka mencapai tujuan ini, CCEJ memiliki 5 (lima) prinsip dasar, yakni:

1. *Led by ordinary citizen* (dipimpin oleh rakyat biasa). Prinsip ini mengandung maksud bahwa CCEJ adalah merupakan organisasi yang merepresentasikan kekuatan riil rakyat yang bergerak dari bawah, bukan alat politik dari kaum elite. Sepanjang sejarah CCEJ, pengurus teras mereka bukanlah pejabat dan politisi, melainkan kaum profesional dan mahasiswa.
2. *Use legal and non-violent methods* (menggunakan cara yang legal dan tanpa kekerasan). Dalam setiap kesempatan CCEJ selalu memastikan bahwa kegiatannya tidak boleh melanggar hukum, serta tidak mengizinkan anggotanya terlibat kekerasan. Walaupun beberapa kali aktifitas CCEJ mendapatkan serangan fisik dari pihak yang tidak berkenan dengan aktifitas mereka, akan tetapi CCEJ tidak mengizinkan adanya mobilisasi massa yang mengarah kepada kegiatan destruktif.
3. *Seek workable alternatives* (mencari jalan keluar alternatif).
4. *Speak for the interest of people from all strata* (berbicara untuk mewakili kepentingan semua tingkatan kelompok masyarakat)
5. *Work to overcome greed and egoism to build a sharing society* (bekerja untuk mengatasi keserakahan dan egoisme kelompok untuk membangun masyarakat bersama).

### Organisasi dan Finansial

Organisasi CCEJ ditopang oleh tiga pilar utama, yakni:

- Anggota, yakni pemilik organisasi yang membayar iuran anggota. Pada saat ini anggota CCEJ mencapai sekitar 25.000 orang yang membayar iuran tetap anggota antara \$ 5 sampai \$ 50 setiap bulan. Sehingga OMS ini mampu untuk mengumpulkan pendapatan internal sebanyak kurang lebih \$ 2.000.000 (\$ 2,5 juta setara dengan Rp. 36 Milyar per tahun).
- Profesional, yakni para pakar yang bekerja paruh waktu untuk membantu CCEJ dalam merancang dan melaksanakan kegiatan.
- Aktifs, yakni orang yang secara sukarela (volunteer) melaksanakan kegiatan-kegiatan CCEJ tanpa dibayar. Jumlah mereka berfluktuatif seiring dengan kebutuhan kegiatan, akan tetapi secara umum terdapat sekitar 300 orang yang terdaftar sebagai volunteer CCEJ. Rata-rata mereka mengalokasikan waktu untuk bekerja bagi CCEJ selama 10-20 jam per minggu.

### Kiprah CCEJ

Sejak didirikan tahun 1989, CCEJ telah menorehkan berbagai prestasi gemilang dalam mempengaruhi, menginisiasi, dan mengawal berbagai kebijakan utama yang berkaitan dengan agenda pemberantasan korupsi di Korea Selatan. Dalam waktu yang cepat, mereka mampu menciptakan perubahan lanskap politik. Diantara prestasi tersebut adalah:

### *Mendorong keterbukaan informasi dengan penggunaan nama asli dalam sistem transaksi finansial (Real name system of financial transaction)*

*Real name system* adalah sistem yang mempersyaratkan agar pengguna jasa finansial yang ingin mendaftar account pada bank, atau sistem keuangan lain, untuk mencantumkan identifikasi kredensial resmi, termasuk nama legal (asli) mereka ke pusat layanan jaringan.



Walaupun seseorang masih dapat menggunakan nama samaran, namun identitas asli seseorang akan tersedia jika aturan atau undang-undang memerintahkan dibukanya informasi asli tentang identitas orang itu, sehingga dia tidak bisa menyembunyikan harta (terutama yang diperoleh dari cara yang tidak sah).

Adalah CCEJ yang mendorong, mengusulkan dan menginisiasi diberlakukannya sistem *real-name* sejak tahun 1990, sehingga Korea Selatan dibawah Presiden Kim Young-sam telah menerapkan sistem *real-name* mulai tahun 1993. Sistem itu dipakai untuk membasmi kegiatan keuangan gelap dan tersembunyi dan membantu meningkatkan transparansi transaksi keuangan. Sebelum UU ini ada, nama-nama palsu telah digunakan oleh orang kaya untuk menghindari pajak dan menyamarkan korupsi dengan membagi kekayaan menjadi potongan-potongan dan deposito mereka ke rekening yang dimiliki oleh individu lain. Dengan diterbitkannya *Real Name Financial Transaction and Confidentiality Act* tahun 1993, lembaga keuangan seperti Bank harus bertanggung jawab dalam mengkonfirmasi identitas klien sebenarnya di balik semua transaksi. UU itu juga mewajibkan semua orang untuk melakukan transaksi properti dan keuangan secara real yang harus dilakukan di bawah nama asli berikut hukum yang relevan. Sistem *real-name* dalam transaksi properti dan transaksi keuangan diyakini berkontribusi terhadap pengurangan terjadinya spekulasi ekonomi dan korupsi.

Pada saat ini, undang-undang tersebut (yang direvisi tahun 2014) menyatakan bahwa, mereka yang terlibat dalam transaksi palsu dapat dipenjara hingga lima tahun atau denda ₩ 50.000.000 (US \$ 44.800). Selain itu, bagi seseorang yang meminjamkan nama mereka dapat juga dihukum, jika mereka tahu apakah itu untuk kegiatan keuangan ilegal.

Tidak hanya itu, Korea Selatan pada saat ini juga menjadi negara pertama yang menempatkan sistem *real-name* dalam komunikasi informasi internet. Sejak 28 Juni 2009, tiga puluh lima

website Korea telah menerapkan sistem registrasi nama asli yang sesuai dengan UU Jaringan Informasi dan Komunikasi yang baru diubah tahun 2009. Hal itu diberlakukan setelah terjadinya bunuh diri seseorang bernama Choi Jin-sil yang dikatakan terkait dengan komentar jahat tentang dia di papan Internet. Aturan baru ini bertujuan untuk meminimalkan jumlah informasi negatif untuk membuat netizen bertanggung jawab atas perilaku mereka di Internet.

### ***Mendorong independensi Bank Korea (Independence of Bank of Korea)***

Tidak seperti sebagian besar bank sentral, Bank of Korea memiliki sesanti untuk menjaga "harmoni" yang ditulis ke dalam anggaran dasarnya. Tapi ketika konsep harmonisasi itu berkaitan dengan pemerintah, bank sentral Korea Selatan dianggap memiliki kredibilitas yang rendah dalam melakukan tugas yang efektif dalam mengelola ekonomi negara dengan kapasitas terbesar keempat di Asia. Situasi ini mendorong CCEJ untuk melakukan desakan agar bank sentral dibebaskan dari pengaruh pemerintah. Sejak tahun 2005, bersama dengan OMS yang lain, CCEJ mengajukan draft perubahan undang-undang bank sentral. Usaha mereka berhasil ketika tahun 2008, parlemen menyetujui undang-undang yang memberikan kebebasan lebih besar bagi bank sentral untuk mengambil keputusan.

### **Mencegah spekulasi Real Estate**

CCEJ berhasil mendorong lahirnya hukum yang mencegah maraknya spekulasi real estate dan mempromosikan stabilitas perumahan bagi penyewa dan orang-orang miskin kota (pada tahun 1989-1990). Dengan undang-undang perumahan ini, perusahaan maupun individu tidak bisa menguasai aset pertanahan yang tidak digunakan dalam jangka waktu yang lama.



## Menginisiasi Reformasi Hukum

CCEJ juga mengajukan beberapa produk hukum untuk menciptakan reformasi politik dan ekonomi ke parlemen, seperti: Undang-undang transparansi administrasi publik, Undang-undang kebebasan informasi, Amandemen undang-undang Pemilu, pendanaan Parpol dan operasional Parpol.

### 2.2.3 Latihan

1. Terangkan, mengapa gerakan OMS di Korea Selatan relatif lebih kuat dan mengakar bila dibandingkan dengan OMS di Indonesia!
2. Coba jelaskan bagaimana lahirnya organisasi PSPD (*People's Solidarity for Participatory Democracy*)!
3. Mengapa PSPD memiliki visi utama untuk mengatasi 'pemusatan kekuatan ekonomi' akibat kebijakan pemerintah?
4. Apakah fokus perjuangan dan misi CCEJ (*Citizen Coalition for Economic Justice*)?
5. Sebutkan tiga pilar utama bagi kemandirian organisasi CCEJ!

## 2.4. PENUTUP

### 2.4.1. Tes Formatif

Pilihlah salah satu jawaban yang benar, dengan memberikan tanda silang!

1. *People's Solidarity for Participatory Democracy* (PSPD) adalah organisasi non-pemerintah dengan tujuan untuk:
  - A. Mengawasi kinerja KICAC
  - B. Menggalang solidaritas warga untuk memperjuangkan demokrasi partisipatif dan hak asasi manusia
  - C. Melawan dominasi partai politik
  - D. Melakukan perjuangan anti Korea Utara

2. Persoalan pokok yang ingin diatasi oleh PSPD adalah
  - A. Adanya 'pemusatan kekuatan ekonomi' akibat kebijakan pemerintah menganakemaskan *chaebol*.
  - B. Kesenjangan desa dan kota
  - C. Kebodohan dan keterbelakangan pendidikan
  - D. Pencemaran lingkungan akibat industrialisasi

3. Citizen Coalition for Economic Justice (CCEJ) adalah gerakan warga di Korea Selatan, yang didirikan pada tahun 1989 dengan tujuan berikut, KECUALI:
  - A. Membela rezim militer
  - B. Memberantas korupsi
  - C. Memperjuangkan keadilan ekonomi dan perlindungan lingkungan
  - D. Pengembangan demokrasi dan sosial.
4. *Led by ordinary citizen* (dipimpin oleh rakyat biasa) adalah salah satu prinsip CCEJ yang mengandung kensekwensi:
  - A. Bahwa CCEJ adalah merupakan organisasi yang merepresentasikan kekuatan riil rakyat yang bergerak dari bawah
  - B. CCEJ bukan alat politik dari kaum elite
  - C. Sepanjang sejarah CCEJ, pengurus teras mereka bukanlah pejabat dan politisi, melainkan kaum profesional dan mahasiswa
  - D. Jawaban A, B, C betul
5. *Use legal and non-violent methods* (menggunakan cara yang legal dan tanpa kekerasan) adalah salah satu prinsip gerakan CCEJ yang mengandung konsekwensi berikut, KECUALI:
  - A. CCEJ selalu memastikan bahwa kegiatannya tidak boleh melanggar hukum



- B. CCEJ hanya berkonsentrasi pada pembenahan peraturan dan hukum
- C. CCEJ tidak mengizinkan anggotanya terlibat kekerasan.
- D. CCEJ tidak mengizinkan adanya mobilisasi massa yang mengarah kepada kegiatan destruktif

### 2.3.2 Umpan Balik

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar ini.

Tingkat penguasaan =  $\frac{\text{Jumlah jawaban yang benar}}{\text{Jumlah soal}} \times 100\%$

5

Arti tingkat penguasaan:

- 90 - 100% : baik sekali
- 80 - 89% : baik
- 70 - 79% : cukup
- < 70% : kurang

### 2.3.3. Tindak lanjut

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, penguasaan anda cukup baik. Bagus! Jika masih dibawah 80%, Anda harus mengulang materi Kegiatan Belajar ini, terutama bagian yang belum dikuasai.

### 2.3.4. Rangkuman

Berbicara tentang gerakan anti korupsi di Korea tidak akan bisa lepas dari peran PSPD dan CCEJ. Kedua OMS di Korea Selatan tersebut secara internal telah melakukan diferensiasi dengan fokus perjuangan yang makin bermacam dan berkontribusi pada pengembangan sektor

*civil society* itu sendiri, serta menciptakan pluralisme sosial dan politik. PSPD lebih fokus pada usaha penguatan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan, sementara CCEJ memiliki fokus yang berkaitan dengan usaha penyebaran keadilan; khususnya dalam pemilihan tanah. Kedua OMS tersebut memiliki keunggulan dalam jaringan dan keanggotaan yang kuat. Jumlah anggota mencapai puluhan ribu dan secara konsisten memberikan iuran bulanan yang signifikan bagi pembiayaan gerakan mereka. Kedua OMS juga mampu berdikari dan menghindari intervensi pemerintah dengan menolak pemberian hibah dari dana pemerintah.

### 2.3.5 Kunci Jawaban tes formatif

- Nomor 1 jawaban B, Menggalang solidaritas warga untuk memperjuangkan demokrasi partisipatif dan hak asasi manusia.
- Nomor 2 jawaban A, Adanya 'pemusatan kekuatan ekonomi' akibat kebijakan pemerintah mengancam maskapai *chaebol*.
- Nomor 3 jawaban A, Membela rezim militer.
- Nomor 4 jawaban D, jawaban A, B, C betul.
- Nomor 5 jawaban B, CCEJ hanya berkonsentrasi pada pembenahan peraturan dan hukum

### DAFTAR PUSTAKA

Anderson C.J. and Y.V. Tverdova. 2003. 'Corruption and Political Allegiances, and Attitudes Towards Government in Contemporary Democracies', *American Journal of Political Science*, 47 (1), 91-109.



- Aspinal, E. 2005. *Opposing Suharto: Compromise, Resistance, and Regime Change in Indonesia*, California: Stanford University Press.
- Berendsen, B., Ton Dietz, Henk Schulte Nordholt and Roel van der Veen (eds) 2013. *Asian Tigers, African Lions: Comparing the Development Performance of Southeast Asia and Africa*. Leiden: Brill.
- Eigen, P. 2004 'Chasing Corruption Around the World: How Civil Society Strengthen Global Governance', Lecture transcript for Arthur and Frank Payne Distinguished Lecture Stanford Institute for International Studies, 4 October 2004 [Online, accessed 21 February 2008, at [www.iis-db.stanford.edu/evnts/3922/Eigen10'04.pdf](http://www.iis-db.stanford.edu/evnts/3922/Eigen10'04.pdf)]
- Gill, G. 2000. *The Dynamics of Democratization: Elites, Civil Society and the Transition Process*, London: MacMillan Press.
- Harvie, C. And Hyun-Hoon Lee. 2003. 'Export-led industrialisation and growth: Korea's economic miracle, 1962-1989' *Australian Economic History Review* 43 (3), 256-286.
- Hope, K.R. Sr., and B. Chikulo (eds.) 2000. *Corruption and development in Africa*, London: Palgrave.
- Jain, A.K. 2001. 'Corruption: A Review' *Journal of Economic Surveys*, 15 (1), pp. 71-121.
- Jip, Choi Jang. 1989. *Structure Change of Contemporary South Korean Politics*, Seoul: Ggachi
- Jip, Choi Jang 1993. *Theory of South Korean Democracy*, Seoul: Hangil.
- Johnston, M. (ed.) 2005. *Civil Society and Corruption: Mobilizing for Reform*, Lanham, MD: University Press of America.
- Joo, Sungsoo, Seonmi Lee, Youngjae, Jo. 2006. *The Explosion of CSOs and Citizen Participation: An Assessment of Civil Society in South Korea*, Seoul: Hanyang University.

- Linz, J. J. and A. Stepan. 1996. *Problems of Democratic Transition and Consolidation: Southern Europe, South America, and Post-Communist Europe*. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- McCusker, R. 2006. 'Review of anti-corruption strategies' Canberra: Australian Institute of Criminology [online, accessed 22 September 2015, at [http://www.aic.gov.au/media\\_library/publications/tbp/tbp023/tbp023.pdf](http://www.aic.gov.au/media_library/publications/tbp/tbp023/tbp023.pdf)]
- Moran, J. 1999. Patterns of corruption and development in East Asia, *Third World Quarterly*, 20 (3), 569-87.
- Moran, J. 2001. Democratic transitions and forms of corruption, *Crime, Law and Social Change*, 36 (4), 379-93.
- Pipidi, A.M. 2013. 'Controlling Corruption Through Collective Action' *Journal of Democracy*, 24 (1), 101-115.
- Pope, J. 2000. *Confronting Corruption: The Elements of a National Integrity System*, Berlin: Transparency International.
- Schedler, A. 1999. Restraining the State: Conflicts and Agents of Accountability, in Schedler, A., Diamond, L. and Plattner, M.F. (eds), *The Self-Restraining State: Power and Accountability in New Democracies*, Boulder: Lynne Rienner, 332-339.
- Seligson, M. A. 2002. The Impact of Corruption on Regime Legitimacy: A Comparative Study of Four Latin American Countries, *The Journal of Politics*, 64 (2), pp. 408-33.
- Setiyono, B. And McLeod, R. 2010. 'Civil society organisations' contribution to the anti-corruption movement in Indonesia' *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 46 (3), 347-370.
- Tanzi, V. 2000. *Policies, institutions and the dark side of economics*, Cheltenham, UK, Northampton, Mass., USA: E. Elgar.
- World Bank. 2000. *Anti-corruption in Transition: A Contribution to the Policy Debate*, Washington DC: World Bank.



## SENARAI

- clientelistic* : pola hubungan yang bersifat kekeluargaan dalam konotasi yang negatif
- Plutokrasi (plutocracy) : merupakan suatu sistem pemerintahan yang berdasarkan kekuasaan atas dasar kekayaan yang mereka miliki
- progresif : kegiatan yang cenderung lebih dipercepat
- real-name* : nama asli yang tertera di dokumen formal kependudukan

## GLOSARIUM

ABRI	Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
ACRC	Anti Corruption and Civil Rights Commission
ADB	Asian Development Bank
AJI	Aliansi Jurnalis Independen
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional
BPK	Badan Pemeriksa Keuangan
BPKP	Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
BPS	Biro Pusat Statistik
CCEJ	Citizen Coalition for Economic Justice
CPI	Corruption Perception Index
CSO	Civil Society Organisation
DPD	Dewan Perwakilan Daerah
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Regional Peoples Representative Assem
FITRA	Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran
GBHN	Garis-garis Besar Haluan Negara
Gempita	Gerakan Penyelamatan Harta Negara
GERAK	Gerakan Rakyat Anti Korupsi
GTZ	Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (German Society for Technical Cooperation)
ICESCR	International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
ICCPR	International Covenant on Civil and Political Rights
ICM	Indonesia Court Monitoring
ICW	Indonesian Corruption Watch
IMF	International Monetary Fund



Kejari	Kejaksaan Negri
Kejati	Kejaksaan Tinggi
KEPPRES	Keputusan Presiden
KHN	Komisi Hukum Nasional
KICAC	Korea Independent Commission Against Corruption
KIPP	Komite Independen Pemantau Pemilu
KK	Komisi Kejaksaan
KoAK	Komite Anti Korupsi
KON	Komisi Ombudsman Nasional (National Ombudsman Commission)
Kontras	Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan
KP2KKK	Komite Penyelidikan dan Pemberantasan KKN
KPI	Komisi Penyiaran Independen
KPK	Komisi Pemberantasan Korupsi
KPKPN	Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara
KSSK	Komite Stabilitas Sektor Keuangan
KUHAP	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KY	Komisi Yudisial
LARI	Lembaga Advokasi Reformasi Indonesia
LBH	Lembaga Bantuan Hukum
LPSK	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
LPSM	Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
MPR	Majelis Permusyawaratan Rakyat
MTI	Masyarakat Transparansi Indonesia
NGO	Non Governmental Organisation
NTT	Nusa Tenggara Timur
NU	Nahdlatul Ulama
PAHAM	Pusat Hukum dan Hak Asasi Manusia
PATTIRO	Pusat Telaah dan Informasi Regional

PERC	Political and Economic Risk Consultancy
PKB	Partai Kebangkitan Bangsa (National Awakening Party)
PKS	Partai Keadilan Sejahtera (Justice and Prosperity Party)
POLRI	Kepolisian Republik Indonesia (Indonesia National Police)
PPATK	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Centre for Financial Transactions Reporting and Analyses)
PPK	Program Pengembangan Kecamatan
PPP	Partai Persatuan Pembangunan (United Development Party)
PSPD	People's Solidarity for Participative Democracy
PuKAT	Pusat Studi Anti Korupsi
PWI	Persatuan Wartawan Indonesia
SBY	Susilo Bambang Yudhoyono
TNI	Tentara Nasional Indonesia
UNCAC	United Nations Convention Against Corruption
UNDP	United Nations for Development Programme
USAID	United States Agency for International Development
YLKI	Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia



## INDEX

### A

Amerika Serikat, 45, 46, 56, 68  
Anti Korupsi, 6, 165

### C

Chaebol, 44, 49, 53, 55, 62, 83,  
97, 103, 108  
Chun Doo-Hwan, 50, 82, 84,  
145, 160, 168  
Corruption Perception Index,  
24, 185

### D

demokratisasi, iii, 8, 9, 11, 23,  
28, 29, 30, 35, 37, 40, 42, 43,  
45, 48, 86, 147, 148, 159,  
175, 177, 179, 180

### E

*elite capture*, 27

### G

*grand corruption*, 14

### K

Korea Selatan, iii, 8, 9, 22, 41,  
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50,  
51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59,  
60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67,  
68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76,  
77, 78, 79, 80, 81, 84, 86, 87,  
88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96,  
97, 98, 99, 100, 101, 102,  
103, 104, 105, 106, 108, 109,  
110, 111, 112, 113, 114, 116,  
127, 140, 143, 144, 145, 149,  
150, 153, 159, 160, 165, 168,  
170, 171, 172, 173, 180  
Korea Utara, 44, 45, 46, 47, 48,  
49, 53, 55, 56, 58, 59, 90, 103  
Korupsi, i, iii, iv, 6, 11, 12, 14,  
19, 22, 23, 29, 34, 41, 63, 77,  
78, 80, 86, 93, 94, 105, 107,  
112, 113, 114, 115, 116, 118,  
120, 121, 127, 128, 133, 136,  
140, 143, 149, 159, 164, 168,  
169, 170, 173, 185, 186  
KPK  
Komisi Pemberantasan  
Korupsi, iii, 34, 115, 116,  
119, 133, 134, 135, 136,  
138, 141, 186

### M

*market-centered*, 13, 14, 18, 20  
*masyarakat sipil*, 9, 35, 143,  
144, 146, 157, 164, 166, 167,  
169, 170, 171, 172, 173, 179,  
180

### O

OMS

Organisasi Masyarakat Sipil,  
iii, 9, 10, 11, 12, 23, 24, 35,  
36, 39, 40, 84, 143, 144,  
146, 147, 148, 150, 151,  
157, 158, 159, 165, 172,  
174, 176, 177, 179, 180,  
181

otoriter, 7, 28, 29, 31, 33, 35, 38,  
45, 47, 49, 54, 56, 80, 179

### P

Park Chung-Hee, 48, 79, 80, 81,  
82, 84, 85, 90, 92, 103, 145  
PBB, 6, 45, 118  
Perang Dingin, 44  
*pety corruption*, 14, 18, 20  
PNS, 6, 15  
*public-interest-centered*, 13, 14,  
18, 20  
*public-office-centered*, 13, 14

### R

*regulatory capture*, 14

### S

*state capture*, 14, 18, 20  
Suharto, 188  
Syngman Rhee, 46, 47, 80, 85,  
91, 92, 103

### U

UNCAC, 6, 187  
Uni Soviet, 30, 45, 46

### W

World Bank, 6, 9, 21, 22, 31, 36,  
142, 178, 184

### Y

Yun Po-sun, 48



## BIOGRAFI PENULIS

### BUDI SETYONO

Budi Setyono adalah Dosen Senior di Departemen Ilmu Pemerintahan, dan Senior Fellow di Pusat Kajian Otonomi Daerah dan Kebijakan Publik, Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang. Selama sepuluh tahun terakhir, ia telah menjabat sebagai konsultan untuk sejumlah lembaga internasional, terutama pada reformasi pemerintahan dan proyek demokratisasi. Ia menerima gelar Master of Policy and Administration dari Flinders University of South Australia pada tahun 2003, dan gelar Ph.D di bidang Ilmu Social and International Relations di Curtin University Perth, Australia Barat pada tahun 2011. Pernah memberikan konsultasi politik untuk National League for Democracy (Partai Aung San Su Kyi) Burma. Saat ini menjadi Wakil Rektor Bidang Komunikasi dan Bisnis.

### MUHAMMAD ADNAN

Muhammad Adnan adalah Dosen Senior di Departemen Ilmu Pemerintahan UNDIP. Mendapatkan gelar Magister of Arts di bidang Political Science Hiroshima University. Pernah menjadi Ketua Tanfiziiah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Tengah selama 2 periode. Mengajar mata kuliah Politik Internasional dan Kebijakan Anti Korupsi.

### LUSIA ASTRIKA

Lusi adalah Dosen di Departemen Ilmu Pemerintahan UNDIP. Lulus sarjana (S1) dari Program Ilmu Pemerintahan dan Magister Ilmu Politik UNDIP.